

MOESLIM CHOICE

ISSN_2614-2783



Rp 75.000

APBN 2025
TUNGGU
KETUK
PALU

HENDAK
KE MANA
S ETELAH
20 OKTOBER

PANSUS
HAJI
SEGERA
BERAKHIR

MASIH ADA
KOTAK
KOSONG
PILKADA

JOKOWI HIJRAH KE IKN



MOESLIM CHOICE .COM

PORTAL NEWS



ALAMAT REDAKSI/IKLAN
PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No. 8,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :
moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :
[moeslimchoice](https://www.facebook.com/moeslimchoice)

TWITTER :
[@moeslimchoice](https://twitter.com/moeslimchoice)
you tube channel:
[moeslimchoice tv](https://www.youtube.com/moeslimchoice)

MCTV
MOESLIMCHOICE.TV

MOESLIM CHOICE
MAGAZINE

moeslimchoice.com

PENANGGUNG JAWAB

H. Usman Rizal

DIREKTUR

HM. Kamel Fahresy SH

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Hj. Melati Tagore

REDAKTUR PELAKSANA

Rahmat Romli

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Rizky Apriandani

REDAKTUR

Irmayani, Rosyidah Rozali,
Fahmi Jamba, M. Rahmat,
M. Husnie

REDAKTUR BISNIS

.H. M Firmansyah
Muhammad Rizky,
Muhammad Raden Solehin

REPORTER

Mario CH, Aldi Rinaldi,
M. Iqbal, Ida Iryani, M. Yadh,
Muhammad Fiqri,
Muhammad Khaidir

KEPALA BIRO SUMSEL

Rahmat Romli

FOTOGRAFER & VIDEOGRAFER

Al Amin

TATA LETAK/COVER

Kosasih Chiko

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Dra. Nur Khamidah

DIVISI PENGEMBANGAN IT

Irvan, Wahyu, M. Fikri

DISTRIBUSI

Itang AB, M. Isro

PERCETAKAN

PT. RESPATIH SAHABAT SEJATI

Isi di luar tanggung jawab
percetakan

>>SALAM REDAKSI

SAFAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Safar datang, Maulid menjelang. Safar pada 1446 Hijriyah beriringan dengan Agustus dan September 2024 pada kalender gregorian. Memasuki September, bulan Maulid atau Rabiul Awal pun segera datang.

Dari sudut makna kata, safar ada yang memaknainya sebagai kosong. Namun, ada juga yang mengartikannya sebagai perjalanan. Ini berkaitan dengan situasi Makkah yang kosong karena penghuninya melakukan perjalanan kafilah niaga.

Dalam catatan tarikh (sejarah) pun tercatat bahwa Rasulullah Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah pada Safar. Pernikahan Muhammad SAW dengan Siti Khadijah pun berlangsung saat Safar.

Nah, pada Abad XV Hijriyah, suasana kosong dan perjalanan dalam konteks Indonesia relevan dengan banyak hal. Boleh saja terungkapnya 48 kotak kosong yang akan menjadi pesaing para kandidat dalam pemilihan kepala daerah serentak yang terjadwal pada 27 November 2024.

Sedangkan yang relevan dengan Safar dalam makna perjalanan, salah satunya adalah peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan peringatan itu, kita sebagai entitas negara-bangsa melewati lagi tahapan perjalanan menuju 80 tahun Indonesia merdeka.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu berkaitan pula dengan kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah kepada Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dalam Perang Dunia II. Setelah itu, hampir tak ada perang besar yang mencakup kawasan luas lintas benua di dunia ini. Perang kemudian berubah menjadi persaingan untuk berlomba-lomba mencapai kemajuan ekonomi melalui teknologi.

Beriringan dengan suasana persaingan itu berlangsung pula revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan pengembangan artificial intelligence kecerdasan buatan yang dapat menjadi alat bantu, bahkan pengganti atau alternatif keterampilan dasar manusia: membaca, menulis (termasuk melukis), berhitung, berbicara, dan menyimak (bukan sekadar mendengarkan). Kemudian kecerdasan buatan pun memiliki kesanggupan menyimpan (memori) yang dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian, seharusnya, bangsa Indonesia di masa berkembangnya kecerdasan buatan, dapat menghasilkan produk dan jasa yang lebih bermanfaat untuk kemajuan bersama. Jika tidak, kita akan menjadi bangsa tertinggal lagi oleh penjajahan atau salah guna TIK. ♦

>>COVER EDISI INI



ALAMAT REDAKSI/IKLAN

PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No.
8, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12750

Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :

moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :

moeslimchoice

TWITTER :

@moeslimchoice

YOU TUBE CHANNEL:

moeslimchoice TV

>> DAFTAR ISI



06

LAPORAN UTAMA

Dinamika politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sempat memicu eskalasi temperatur politik hingga unjuk rasa setelah pembacaan dua putusan Mahkamah Konstitusi. Toh suhu mereda menjelang pendaftaran para kandidat.

20

EKONOMI SYARIAH

Berbagai tanda tanya menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi mulai terjawab.

24

SUMSEL SYARIAH

Di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Elen Setiadi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berkomitmen mengikis habis segala bentuk perjudian.

44

BIROKRASI KEMENDAGRI

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), secara resmi mengusung John Wempi Wetipo dan Ausilius You sebagai pasangan calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) Papua Tengah.



40 KEMENAG
Kementerian Agama (Kemenag) dan Forum Zakat (FOZ) menyepakati lima langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dan harmonisasi pengelolaan zakat.

84 PILKADA 2024
Sejauh ini tercatat 43 pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Kotak kosong tak terhindarkan

88 LAPORAN KHUSUS
Panitia Khusus Angket Haji DPR yang terbentuk pada awal Juli 2024 baru dapat bekerja sekitar 40 hari kemudian. Dalam sebulan, katakanlah pertengahan September 2024, Pansus harus menyelesaikan tugasnya.

68
MUALAF

Celine Evangelista, aktris cantik sekaligus presenter terkemuka, belakangan ini menarik perhatian publik karena keputusannya memeluk Agama Islam. Sebelumnya, ia beragama Katolik ikut agama ayahnya Mauro Ricci, juga ibundanya Virgencia Nurul.



REGULER

- 3 | SALAM REDAKSI
- 18 | UFUK
- 36 | WISATA HALAL
- 60 | PARLEMEN
- 64 | KAJIAN
- 72 | KESEHATAN
- 74 | PILKADA SUMSEL
- 78 | RESENSI
- 80 | INSPIRATIF
- 82 | KOLOM 1
- 98 | KOLOM 2

MENGHANGAT PASCA PUTUSAN MK

Dinamika politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sempat memicu eskalasi temperatur politik hingga unjuk rasa setelah pembacaan dua putusan Mahkamah Konstitusi. Toh suhu mereda menjelang pendaftaran para kandidat.



Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada Selasa 20 Agustus 2024, sepekan sebelum masa pendaftaran pasangan kandidat dalam Pilkada serentak 2024 itu memang dapat mengubah peta persaingan terutama antarpolisi pengusung. Alasannya, rancang bangun putusan MK Nomor 60 Tahun 2024 itu membuka kemungkinan partai-partai yang sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dapat mengajukan calonnya sendiri-sendiri di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ringkasnya, bisa pecah kongsi.

Satu lagi putusan MK pada hari yang sama adalah persyaratan batas usia minimal bagi calon kepala daerah. Putusan MK No 70 Tahun 2024 ini menyangkut kemungkinan maju-tidaknya putra bungsu

gubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Melalui putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah bersangkutan.

"Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suharto membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, sepekan sebelum pendaftaran paslon ke Komisi Pemilihan Umum terjadwal mulai dibuka pada

dan calon wakil gubernur:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di provinsi tersebut

c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memper-



Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, yang partainya sudah mengurus administrasi untuk memenuhi persyaratan maju sebagai kandidat di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kaesang baru akan berusia genap 30 tahun pada 25 Desember 2024 di Pilkada Gubernur. Sedangkan Pilkada terjadwal berlangsung pada Rabu, 27 Nopember 2024. Putusan MK menetapkan persyaratan calon untuk Pilgub berusia minimal 30 tahun pada saat penetapan calon oleh KPU yang terjadwal pada 22 September, saat Kaesang belum genap mencapai batas usia itu.

Nah, untuk Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, rancang bangunnya men-

Selasa 27 hingga 29 Agustus 2024.

Para pemohon yang dimaksud oleh Ketua MK adalah Partai Buruh dan Partai Gelora yang dalam Pemilu legislatif 2024 belum beroleh kursi parlemen. Partai Buruh diwakili Said Iqbal selaku Presiden dan Ferri Nurzali selaku Sekretaris Jenderal. Sementara itu, Partai Gelora diwakili Muhammad Anis Matta selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal.

Dalam putusannya, MK mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu (yang memiliki kursi maupun tanpa kursi parlemen) dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur

oleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut.

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi tersebut.

Sedangkan untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen di kabupaten/kota

tersebut

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

Pada perkara ini, Partai Buruh dan Partai Gelora mempersoalkan konstitusionalitas

Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

"Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon, sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal, yang jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 secara terus menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membaca-

kan pertimbangan hukum.

Karena keberadaan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada, maka MK menyatakan harus juga menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap Pasal 40 ayat (1) tersebut. MK mempertimbangkan, pengaturan ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah tidak rasional jika syarat pengusulannya lebih besar dari pada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan.

"Oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) UU 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu," kata Enny.

Sedangkan terkait persyaratan usia calon kepala daerah, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh KPU. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 ini, prosesnya menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

"Sebagai penyelenggara, KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," ucap Wakil Ketua MK Saldi Isra di Ruang Sidang Pleno MK.

Pada perkara ini, para pemohon, yakni A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee, yang keduanya merupakan mahasiswa, meminta MK menambahkan frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon" ke dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Pasal tersebut mengatur syarat usia minimum calon kepala daerah.

Saldi menjelaskan norma pasal diuji memang tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon". Namun, apabila ditelisik berdasarkan pendekatan sistematis, peraturan batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon kepala



daerah (cakada) selalu ditempatkan dalam bab yang mengatur mengenai persyaratan calon.

Pendekatan sistematis tersebut juga dapat dibaca dan dipahami dalam konteks tahapan pilkada. Dalam hal ini, MK menyatakan bahwa tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, serta penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu kelindan.

Karena berada dalam satu kelindan maka semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, menurut MK, penelitian keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon.

"Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10 Tahun 2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar Saldi.

Selain itu, MK juga mengatakan bahwa fakta empirik membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah selama ini dihitung atau ditentukan pada tahapan penetapan pasangan calon. "Dalam hal ini, misalnya, sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan serentak terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar Saldi.

Selain itu, MK juga menyatakan keterpenuhan syarat calon anggota legislatif, DPR, DPD, DPRD, maupun syarat calon presiden dan wakil presiden juga ditentukan ketika penetapan pasangan calon. "Artinya, segala persyaratan yang harus dipenuhi pada tahapan pencalonan harus tuntas ketika ditetapkan sebagai calon dan harus selesai sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan berikutnya," imbuh Saldi.

Lebih lanjut, MK memberi ultimatum kepada KPU untuk mengikuti pertimbangan MK dalam putusan ini. "Jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah," kata Saldi.

Di sisi lain, karena menurut Mahkamah norma pasal yang diuji ini telah secara jelas dan terang mengatur titik atau batas penen-

tuhan syarat calon kepala daerah dilakukan pada penetapan pasangan calon, maka tidak perlu lagi diberikan tambahan frasa seperti yang dimohonkan para pemohon. "Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari (dalam bahasa Minangkabau), cheto welo-welo (dalam bahasa Jawa), sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon," kata Saldi.

Penambahan frasa seperti yang dinginkan para pemohon justru akan menjadikan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada berbeda sendiri atau anomali di antara



semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah. Oleh karena itu, MK menyatakan seluruh dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan.

Pertimbangan hukum tersebut juga dijadikan landasan oleh MK untuk memutus perkara nomor 41/PUU-XXII/2024, 88/PUU-XXII/2024, 89/PUU-XXII/2024, 90/PUU-XXII/2024, dan 99/PUU-XXII/2024. Seluruh perkara terkait syarat usia calon kepala daerah itu turut dinyatakan ditolak. Dengan batas usia yang ditetapkan MK adalah 30 tahun saat penetapan calon, implikasinya Kaesang Pangarep tak memenuhi syarat untuk maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur.

Nah, sehari setelah MK membaca-

kan putusan tadi, Badan Legislasi DPR melangsungkan rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang dinilai melangkahi konstitusi. Rapat Baleg DPR RI menyepakati RUU Pilkada hanya akan mengakomodasi sebagian putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena kewenangan DPR itu membuat norma baru. Dalam setiap putusan MK itu DPR boleh membuat norma baru," ucap Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek, Rabu, 21 Agustus 2024.

Menurut dia, DPR akan mengesahkan RUU Pilkada dalam rapat paripurna yang diagendakan pada, Kamis, 22 Agustus 2024 pukul 09.30 WIB. Awiek menjelaskan bahwa agenda pengesahan RUU Pilkada telah disepakati Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Toh implikasi langkah DPR itu berpotensi menganulir sebagian atau bahkan seluruh putusan MK

Langkah kilat DPR itu berbalas, antara lain dengan viralnya mobilisasi masal mel-

alui media sosial dengan kode peringatan darurat. Maka pada Kamis, 22 Agustus berlangsung unjuk rasa di luar Gedung DPR hingga upaya menerobos pagar. Unjuk rasa yang sama berlangsung di berbagai kota di luar Jakarta. Tercatat setidaknya unjuk rasa mengawal putusan MK berlangsung di Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Makassar.

Aparat kepolisian berupaya mengatasi unjuk rasa itu toh korban luka dan penangkapan pengunjung rasa tak terelakkan. Sedangkan DPR gagal menggelar rapat paripurna dengan alasan tak mencapai kuorum sekaligus membatalkan pengesahan RUU Pilkada tanpa batas waktu.

Alhasil, suhu politik, setidaknya kerusuhan lebih besar dan lama menjelang Pilkada, akhirnya mereda. Masa pendaftaran calon pun tiba. ♦



DARI UNJUK RASA HINGGA PINDAHAN KE IKN

Serangkaian dengan unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi, banyak rentetan peristiwa terjadi. Media sosial ikut mengambil peran.

Media sosial memang dapat menjadi sarana mobilisasi massa. Setidaknya itulah yang terjadi dalam unjuk rasa menyusul langkah Badan Legislati (Baleg) DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada sehari setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya.

Putusan itu mengubah ambang batas (threshold) suara dukungan bagi pasangan calon serta batas usia minimal calon. Sedangkan Rapat Baleg DPR RI menyepakati RUU Pilkada hanya akan mengakomodasi sebagian putusan MK.

"Karena kewenangan DPR itu membuat norma baru. Dalam setiap putusan MK itu DPR boleh membuat norma baru," ucap Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek, Rabu, 21 Agustus 2024.

Menurut dia, DPR akan mengesahkan RUU Pilkada dalam rapat paripurna yang diagendakan pada, Kamis, 22 Agustus 2024 pukul 09.30 WIB. Awiek menjelaskan, agenda pengesahan RUU Pilkada telah disepakati Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Toh implikasi langkah DPR itu berpotensi menganulir sebagian atau bahkan seluruh putusan MK.

Nah bersamaan dengan berlangsungnya agenda rapat paripurna itu, gerbang depan maupun belakang Gedung DPR penuh dengan masa pengunjuk rasa. Aktor Reza Rahadian merupakan salah satu pesohor yang berpartisipasi langsung dengan orasinya yang sesuai belaka dengan latar belakang profesinya memainkan peran.

"Kalau Mahkamah Konstitusi sedang mengembalikan nobility-nya sebagai

Mahkamah Konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dinulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas, Anda-Anda di dalam (Gedung DPR) itu wakil siapa?" teriak Reza disambut sorak sorai ribuan demonstran di depan gerbang utama DPR, Kamis, 22 Agustus 2024.

Bagaimana ribuan massa dapat berhimpun dengan segera dan mengepung gedung kompleks parlemen malah di berbagai kota, media sosial yang berperan penting mempercepatnya. Dengan kode meme (gambar atau simbol) Garuda Biru dan tagar #KawalPutusanMK di platform X (twitter) juga Instagram, berlanjut dengan lambang Garuda Biru yang menjadi status para pengguna WhatsApp (WA), mudah dipahami mobilisasi melalui media sosial itu terbukti efektif.



Lembaga analis media sosial Drone Emprit, yang kompeten menelusuri jejak awal kicauan viral di media sosial X mengungkap, Garuda Biru Peringatan Darurat, yang menyatukan warganet buat melawan oligarki, pada awalnya tampak sebagai postingan jenaka (canda) sebagaimana yang pernah diunggah di platform audio visual YouTube pada Oktober 2022 lalu.

"Kronologinya dimulai pada 21 Agustus dini hari

sekitar pukul 3 pagi. Ada cuitan dengan nada 'canda' tentang pendudukan kantor-kantor pemerintahan oleh militer," tutur akun X Drone Emprit, Kamis, 22 Agustus 2024 malam.

"Cuitan ini dibalas oleh akun X @BudiBukanIntel dengan un-

gahan Garuda Biru Peringatan Darurat pada pukul 8 pagi. Sehingga konteks awal Garuda biru besar kemungkinan adalah canda," ungkap penjelasan Drone Emprit.

Toh meme garuda biru yang bergabung dengan tagar #KawalPutusanMK bertransformasi dari sekadar canda menjadi simbol mobilisasi serius berlanjut dengan kegiatan di dunia nyata hingga terjadilah rangkaian unjuk rasa.

Dalam penjelasan Drone Emprit, gambar unggahan @BudiBukanIntel itu kemudian diunggah ulang sejumlah akun influencer besar sejak Rabu, 21 Agustus 2024 siang. Di antaranya adalah akun @NajwaShihab, @ivooxid, @project_org.

Narasinya menghubungkan Garuda (Indonesia) dan darurat (politik, hukum, etika). "Sejak pukul 14 WIB, Garuda Biru diunggah influencer besar, berubah jadi simbol ajakan selamatkan Indonesia," kata keterangan itu.

"Dari sini, terlihat bahwa Garuda Biru Peringatan Darurat yang diangkat @BudiBukanIntel nampaknya dinilai selaras dan mewakili keadaan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia termasuk ke-daruratan demokrasi dan hukum."

Garuda Biru kemudian

menjadi simbol ajakan menyelamatkan Indonesia dari segelintir orang yang membahayakan negara,” lanjut penjelasan Drone Emprit.

Tak ayal putusan MK yang langsung berkaitan batas usia minimal calon dalam Pilkada segera dikaitkan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo. Kaesang sudah digadang-gadang akan maju sebagai kandidat calon dalam Pilkada Jawa Tengah.

Namun, putusan MK yang menegaskan usia minimal calon dalam Pilkada ada-

rakyat, sangat baik,” kata Joko Widodo usai menghadiri HUT Ke-26 Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus pembukaan Kongres Ke-6 PAN di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024. Presiden menekankan pemerintah pun akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pilkada setelah DPR RI batal mengesahkan revisi UU Pilkada.

Pada sisi lain, serangkaian dengan putusan MK, berlangsung Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum, dan pemerintah. Agendanya, pembahasan Rancangan PKPU Nomor 8 Ta-

“Kami sudah memenuhi janji kami. Jadi, tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70, dan sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2024.

Sebelum Rapat yang menyetujui Rancangan PKPU No 8 berlangsung, batalnya pencalonan Kaesang di Pilgub Jawa Tengah 2024. Mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang tetap maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah, sedangkan kursi calon wakil gubernur berganti kepada anggota DPD terpilih Taj Yasin Maimoen.

“Sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu itu kemudian kita putuskan Pak



lah 30 tahun pada saat penetapan calon, memupus peluang Kaesang yang baru berusia 30 pada 25 Desember 2024. Sedangkan penetapan calon terjadwal pada 22 September 2024 sehingga usia Kaesang belum 30 pada saat itu.

Lantas apa reaksi Presiden Joko Widodo? Ia menyebut penyampaian aspirasi publik, melalui unjuk rasa maupun di media sosial, terkait Undang-Undang Pilkada, sangat baik.

“Baik, itu penyampaian aspirasi dari

hun 2024 yang mengakomodasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah memenuhi janji kepada masyarakat dengan menyetujui Rancangan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah, yang di dalamnya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.



Karena kewenangan DPR itu membuat norma baru. Dalam setiap putusan MK itu DPR boleh membuat norma baru.

Luthfi dengan Gus Yasin,” kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.

Dia memastikan keputusan tak mengesang Kaesang bukan karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat minimal usia calon kepala daerah. Dasco mengatakan keputusan itu diambil sekitar satu pekan lalu.

Dasco menambahkan, Kaesang juga tidak berada di Indonesia menjelang waktu pendaftaran calon kepala daerah. “Pada saat ini kan Kaesang tidak sedang berada di Indonesia karena memang dia enggak ikut daftar,” ujarnya.

Toh rangkaian peristiwa itu memancing spekulasi bahwa hubungan Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto merenggang. Spekulasi itu sudah dibantah baik oleh Jokowi maupun Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Sedangkan di acara penutupan Kongres PAN, giliran Prabowo yang memban-

tah kerenggangan hubungannya dengan Jokowi. "Gue bingung, dia lebih tahu dari gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak, di mana retaknya?" kata Prabowo dalam penutupan Kongres ke-VI PAN, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Prabowo mengemukakan isu kerenggangan itu merupakan upaya adu domba. "Selalu mau ngadu domba, selalu adu domba. Kalau yang itu agak jengkel tapi kita ya udah biarin aja lah, nggak apa-apa," sambungnya.

Sedangkan dalam keterangan pers yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 27 Agustus 2024, Jokowi meminta agar pengunjung rasa yang ditahan oleh aparat kepolisian dibe-

Spekulasi mengenai kerenggangan Jokowi-Prabowo juga dibumbui oleh rencana perpindahan Presiden Jokowi ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. "Kalau yang saya tahu programnya Pak Presiden Jokowi, kalau nanti bandaranya (IKN) ini beroperasi pada minggu pertama September, beliau pindah ke sana," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat, 23 September 2024.

Pak Menteri mengemukakan akan melakukan pengecekan progres pembangunan landasan pacu atau runway Bandara IKN pada pekan ini. Saat ini progres konstruksi runway Bandara IKN yang baru terganggu 1.100 meter dari target sementara

tember," ujar Budi Karya di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024. Mengenai hasil uji coba pada Minggu, 25 Agustus 2024, Budi Karya menjawabnya dengan acungan jempol.

Sedangkan Presiden Jokowi menegaskan perpindahannya ke IKN masih menunggu kesiapan bandar udara di sana. Menurut dia, keputusan untuk mulai berkantor di ibu kota baru tersebut perlu mempertimbangkan kondisi lapangan.

"Lihat kondisi lapangan, karena memang banyak hal yang belum selesai. Misalnya, bandara belum. (Menunggu) airport," kata Jokowi dalam keterangannya usai meresmikan infrastruktur di Yogyakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.



baskan. "Untuk pendemo yang masih ditahan saya harap juga bisa segera dibebaskan," ujar Jokowi yang dalam kesempatan itu mengenakan kemeja biru muda, simbol pakaian pasangan Prabowo-Gibran.

Namun ia berpesan agar aksi penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang tertib dan damai sehingga tak mengganggu aktivitas warga. "Dan saya titip, hanya saya titip mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga dan lainnya," lanjut Jokowi melalui media sosial audio visual YouTube.

2.200 meter.

"Ini besok baru kita mau cek. Jadi mungkin kalau 2.200 meter targetnya hitungan ya, kalau tidak ada hujan konstruksi runway sepanjang 2.200 meter tersebut diharapkan dapat selesai pada tanggal 2 September. Jadi kita hitung terus. Nanti ketika runway-nya selesai, kemudian nanti dua hari pasang lampu-lampu semua," katanya.

Sedangkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi optimistik Bandara di IKN, segera siap didarati pesawat termasuk Pesawat Kepresidenan RI pada awal September 2024. "Awal Sep-

ta menjelaskan, keberadaan bandara akan memudahkan mobilitasnya saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai daerah. Jokowi berharap, setelah pindah ke IKN, perjalanan ke daerah-daerah seperti Papua, NTT, atau Aceh bisa dilakukan langsung dari sana.

"Kalau sudah pindah ke sana semestinya kalau kita mau ke Papua, dari IKN. Kalau mau ke NTT, dari IKN. Ke Aceh juga dari IKN. Kalau Airportnya belum jadi?" tutur Jokowi.

Ya mana bisa pindahan kalau bandara belum jadi. Lagi pula, tak ada situasi memaksa Presiden pindah ke IKN. ♦



HENDAK KE MANA SETELAH 20 OKTOBER?

Beberapa Presiden RI yang telah purna bakti biasanya aktif sebagai figur di partai politik. Seperti Presiden Megawati Soekarnoputri di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat. Bagaimana dengan Presiden Joko Widodo?

Semakin dekat dengan masa purna bakti sebagai Presiden RI, Joko Widodo belum menegaskan apakah akan aktif di salah

satu partai atau tidak. Yang muncul kemudian malah kesan ia merasa ditinggalkan.

Kesan ditinggalkan itu muncul saat Presiden Jokowi menyampaikan sambu-

tan di Kongres III Partai Nasional Demokrat (Nasdem). "Biasanya datang itu ramai-ramai, terakhir begitu mau pergi, ditinggal ramai-ramai. Tapi saya yakin itu tidak



dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem," kata Jokowi di acara yang berlangsung pada Minggu, 25 Agustus 2024.

Toh Jokowi mengungkapkan pula memorinya selama hampir 10 tahun berpolitik dengan Surya Paloh dan Nasdem: Pernah mencapai kesepakatan, hanya berselang sepekan, kesepakatan dapat berubah. Ia mengakui hal itu lumrah belaka dalam politik. "Saya pernah salaman hari ini salaman, sepakat, lalu seminggu kemudian beda. Enggak apa-apa, saya kira sangat bagus," kata Jokowi dalam pidatonya.

Perbedaan pilihan politik Paloh di Pilpres 2024 lalu yang mengusung Anies dengan membawa narasi perubahan

pun disebut dalam pidatonya. "Walaupun di 2024, sempat beda jalan. Bang Surya di satu perubahan, kemudian yang satunya di keberlanjutan. Ya ndak apa-apa, itu wajar. Kita bisa saling memahami dan kita bisa saling mengerti mengenai perbedaan itu," ujarnya.

Jokowi menegaskan pula, hubungannya dengan Paloh juga berjalan baik dan dekat satu sama lain. "Ketua partai yang banyak paling banyak bertemu dan berdiskusi dengan saya adalah Pak Surya Paloh. Partner diskusi politik saya yang



paling banyak kami bertukar pikiran mengenai masa depan bangsa," ucapnya.

Malah Jokowi juga mengisahkan pernah memayungi Ketum NasDem Surya Paloh saat hujan deras. Jokowi mengatakan selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, baru Surya Paloh yang dia payungi. "Setelah saya ingat-ingat, baru satu Ketua Partai yang selama 10 tahun ini dalam keadaan hujan dipayungi oleh Presiden, hujan deras sekali, saya memayungi Bang Surya, tapi katanya karena terlalu basah bajunya, beliau agak masuk angin," kata Jokowi

Selain itu Jokowi mengatakan memiliki banyak sejarah dan cerita panjang bersama Surya Paloh dan Nasdem. Dia mengatakan NasDem merupakan partai pertama yang mendeklarasikan dukungan saat Pilpres 2014. "Dimulai tahun 2014 saya ingat betul NasDem saat itu partai pertama yang mendeklarasikan dalam pencalonan sebagai Presiden. Kemudian tahun 2019 NasDem juga kembali mencalonkan saya. Dengan dukungan tanpa mahar, politik tanpa mahar. Itu yang saya kira sangat bagus untuk pendidikan politikan Indonesia," tutur Jokowi.

Tambahan pula, Jokowi merasakan bernostalgia saat berdiri di tengah-tengah kader NasDem dan di hadapan Paloh. Dia mengatakan tidak ada yang berubah. "Rasanya seperti rasa dulu yang pernah ada. Apalagi saat tadi kita mendengarkan Bang Surya berorasi, saya seperti ditarik ke masa lalu, karena suara, intonasi, pembawaan dan semangat Bang Surya tidak ada satupun yang berubah," kata Jokowi.

Memang, sebelumnya Paloh menyampaikan pidato dengan gaya dan retorika khasnya. Antara lain Paloh mengemuka-

kan belajar banyak dari kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir.

Jokowi, ujarnya, menunjukkan hubungan yang setara, satu kesepahaman antara pemerintah dan Partai Nasdem selama 10 tahun terakhir. Pada masa-masa itu, setiap orang bisa bebas bergerak dan berbicara, mengeluarkan pendapat sepakat dan kadang-kadang tidak sepakat.

Tak heran, sambungnya, ada kalanya terkadang ia harus melewati fase tersenyum dan terhenyak di saat lain. "Inilah yang menyebabkan satu proses perjalanan hampir 10 tahun ini, kadang-kadang bisa tersenyum lebar, kadang-kadang kita harus termangu-mangu, kadang-kadang kita harus bisa terhenyak duduk sedikit, memikirkan apa sebenarnya yang kurang dengan Nasdem ini?" kata Paloh.

Paloh juga mengemukakan dari Jokowi ia belajar hidup bukan hanya sekedar niat baik. Niat baik, menurut dia, harus sejujurnya dan semestinya, tapi juga harus ada strategi yang menyertainya.

Selanjutnya, Paloh menyatakan apa yang terjadi jika niat baik tidak diikuti strategi yang tepat, Ketua Umum Partai Golkar Bahliil Lahadalia yang juga hadir di

acara Kongres III Nasdem dapat menjadi contohnya. "Begitu niat baik saja, strategi tidak tepat, aaah, Bung Bahliil itu bisa menjawabnya sebagai adik saya," tutur dia.

Pidato Paloh juga menyinggung sejumlah pihak yang berakhir menyiasati peraturan undang-undang (UU) demi kepentingan tertentu. Padahal, kata dia, tak mungkin mengatasi permasalahan dengan membuat tambahan aturan. "Tidak mungkin kita mengatasi permasalahan ini hanya membuat tambahan UU. UU yang ada kita buat lagi dan kita buat lagi UU. Akhirnya justru kita terjebak untuk melihat betapa kita mulai mencoba mensiasati UU. Ini yang jadi permasalahan kita," kata Ketua Umum Partai Nasdem itu.

Menurut dia, semua pihak harus bahu-

usny. Dari forum ini, dari Kongres III ini, saya ingin katakan kita harus bersatu," ucap dia.

Toh Paloh menegaskan, Jokowi merupakan salah satu orang yang memiliki budi baik. Jokowi akan tetap menjadi sahabat Partai Nasdem di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Malah Paloh menyiapkan pantun khusus.

"Presiden Jokowi boleh dengar baik-baik. Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau, si angsa dua. Hancurlah badan di kandungan tanah. Budi yang baik dikenang jua," kata Surya Paloh membaca pantun.

Namun, dari Kongres III Partai Nasdem, belum jelas isyarat hendak ke mana Jokowi pasca 20 Oktober 2024 saat masa jabatannya sebagai Presiden selesai.

meninggalkan beliau, tapi lebih kepada melempar jokes segar dalam politik," kata Hasan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024

Hasan menegaskan bahwa memang biasanya ada momen banyak pihak atau partai politik meninggalkan pejabat yang hendak memasuki akhir jabatannya. Namun, pernyataan Presiden itu, kata Hasan, menegaskan bahwa partai politik, khususnya NasDem dan Ketua Umum Surya Paloh, tidak meninggalkan Presiden Jokowi yang segera mengakhiri masa jabatannya pada Oktober mendatang.

Momen Presiden Jokowi tidak ditinggalkan oleh partai juga terbukti saat Presiden yang hadir pada Pembukaan HUT



membahu membuat Indonesia lebih baik. Alasannya, tidak ada satu partai, kelompok, atau golongan manapun yang mampu menyelesaikan kehidupan kebangsaan sendiri-sendiri. Maka, sambungnya, perlu spirit kebersamaan dan spirit membangun kecintaan sebagai anak bangsa.

"Bangsa lain telah meletakkan obsesi besar yang mampu mereka aplikasikan, teknologi yang mereka kuasai, manusia darat sekarang bisa pergi ke bulan, ke bintang, tapi kita masih berputar dengan isu satu, ke isu dua, ke isu tiga, dan seter-

Malah pidato Jokowi yang menyebut ditinggal ramai-ramai justru menimbulkan tambahan pertanyaan.

Hingga kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan pernyataan Presiden Joko Widodo soal ditinggalkan ramai-ramai oleh partai politik saat jabatan selesai adalah bentuk candaan segar di dunia politik. "Menurut kami itu bukan berarti Pak Presiden mengatakan ada yang

Ke-26 dan Kongres Ke-6 PAN pada Jumat, 23 Agustus 2024. "Kalau misalnya pernyataan becandaan itu juga ada di PAN, misalnya juga akan seperti itu. PAN tidak seperti itu. Buktinya Presiden juga bersama PAN kemarin kan. Jadi itu lebih kepada jokes-jokes segar dalam politik saja," kata Hasan.

Selanjutnya, Jokowi menjelaskan maksud pernyataannya "datang ramai-ramai dan ditinggal ramai-ramai" itu. "Begini, jadi datang ramai-ramai, ya kan. Perginya juga ramai-ramai," ujar Jokowi di sela kun-

jungan kerja di Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis, 29 Agustus, 2024.

Jokowi menjelaskan bahwa maksud dari pernyataan itu adalah terkait kegotongroyongan seluruh masyarakat yang sangat diperlukan. "Jangan kalau pas ada senang ramai-ramai, tetapi begitu ada banyak masalah tidak ramai-ramai lagi. Semuanya mestinya gotong-royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama," ujarnya.

Sedangkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Presiden RI Joko Widodo merasa cocok dengan Prabowo Subianto karena bisa saling percaya dan menghormati satu sama lain meskipun terkadang ada perbedaan pendapat.

percaya, menghormati, dan pengertian satu sama lain. "Itu yang sangat jelas saya rasakan," ujar Presiden.

Rasa percaya itu pun yang meyakinkan Presiden bahwa Prabowo yang akan menjadi Presiden RI mampu meneruskan keberlanjutan pembangunan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Termasuk rasa percaya saya bahwa ke depan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Indonesia dengan keberlanjutannya akan mampu meraih cita-cita Indonesia Maju, Indonesia Emas di 2045. Saya sangat meyakini itu, insya Allah, semuanya sesuai yang kita cita-citakan yaitu Indonesia Emas pada tahun 2045," ucap Presiden.

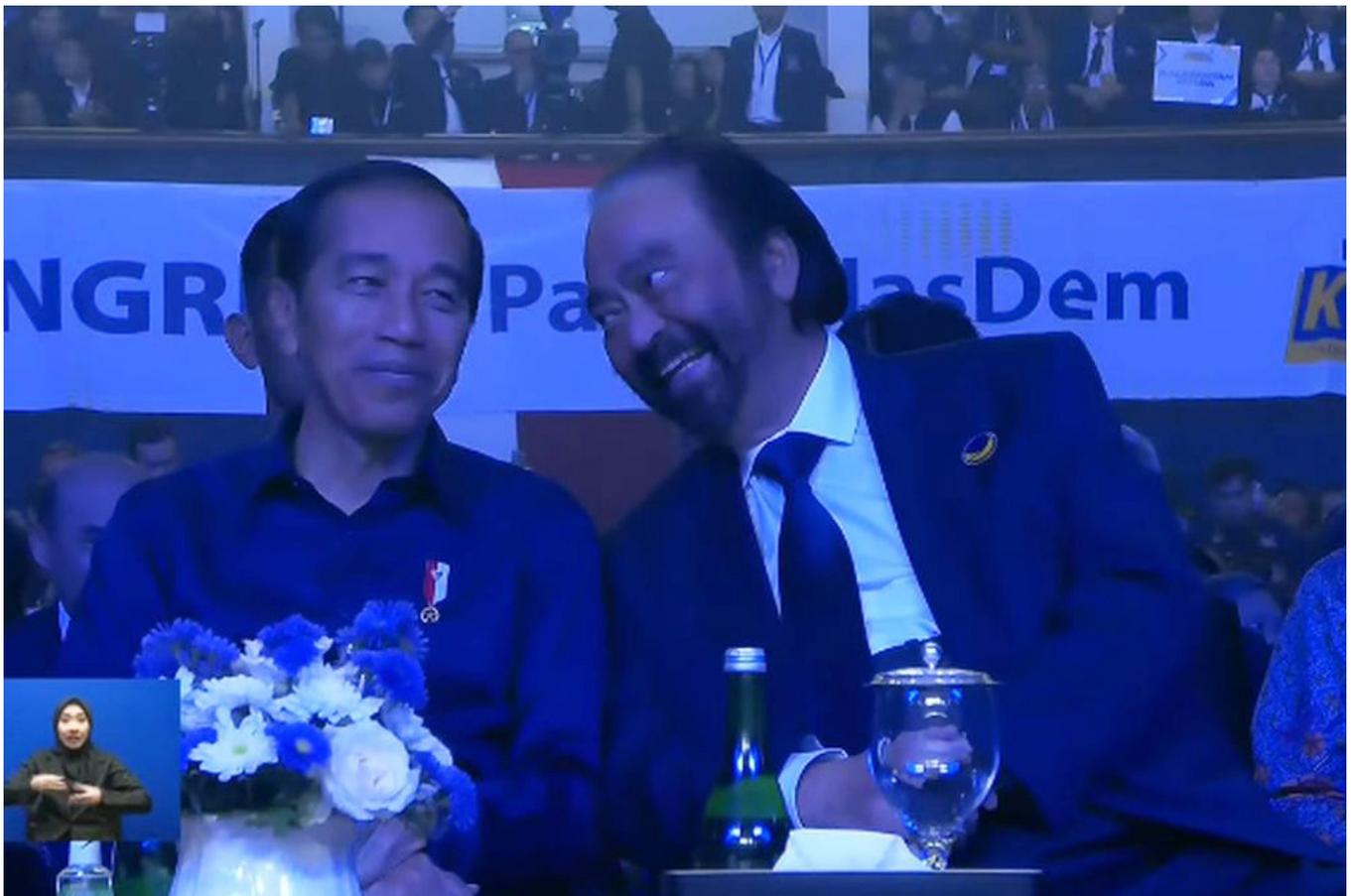
Saat menghadiri acara tersebut, Joko-

sangat menghormati Prabowo.

Toh kehadiran Jokowi di berbagai acara partai sepanjang Agustus 2024 merupakan dinamika politik tersendiri. Termasuk Munas Partai Golkar dan spekulasi dirinya akan menjadi figur di partai beringin itu.

"Katanya jadi ketua? Katanya jadi dewan pembina? Ah...," kata Jokowi usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat, 30 Agustus 2024.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, Jokowi tidak akan menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar. "Jadi enggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau



"Kalau dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. Ya begitu juga, itu juga yang saya rasakan," kata Presiden dalam sambutannya saat menghadiri apel kader dan penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu malam, 31 Agustus 2024.

Jokowi mengatakan bahwa kecocokan itu tumbuh karena adanya rasa saling

wi tampak bahagia. Presiden sering tersenyum hingga tertawa terbahak-bahak, terutama ketika Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato.

Jokowi juga tampak harmonis dengan Prabowo. Keduanya saling berbalas pujian. Prabowo dalam pidatonya mengakui Jokowi seorang guru politik dari Solo yang sangat hebat. Sementara itu, Jokowi dalam sambutannya menyampaikan Prabowo sangat spesial bagi dirinya, dan

jadi ketua dewan pembina itu, sampai dengan hari ini enggak ada. Saya berdiskusi kok, enggak ada, jadi enggak benar itu, pikiran itu," kata Bahlil dalam konferensi pers Munas Partai Golkar, Rabu, 21 Agustus 2024.

Jadi, ke mana Jokowi setelah menyelesaikan masa jabatan 10 tahun sebagai Presiden? Boleh jadi seperti ungkapan KH Zainuddin MZ semasa hidupnya: Tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana. Yang pasti, ini akan menjadi perbincangan ramai. ♦

RUMIT

GUNAWAN EFFENDI

Antum a'lamu bi umuri dunyakum (Kalian lebih tahu urusan duniamu).

Kerumitan hidup akhirnya sampai juga kepada kita. Malah, boleh jadi, pada gilirannya kita akan mengalaminya secara langsung. Untuk sementara, kita semakin mudah menemukan contoh-contoh kerumitan hidup itu karena revolusi teknologi informasi dan komunikasi memungkinkannya.

Dengan perangkat yang berada dalam genggaman tangan, telepon pintar, menggunakan mesin pencari, juga melalui media sosial, dalam sekejap kerumitan hidup itu terbentang. Sebut saja misalnya, tindakan sedot lemak yang berisiko kehilangan nyawa. Satu contoh lagi adalah pengelola rumah perawatan anak (daycare) yang entah bagaimana hingga akhirnya menjadi tersangka penyiksaan anak yang ditiptkannya.

Belum lagi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang naudzubillah min dzalik, semoga kita semua terhindar dari yang begini: suami membunuh istri, atau sebaliknya istri membunuh suami. Malah dalam satu kasus istri dan anak, serta calon menantu terlibat dalam pembunuhan suami, ayah, dan calon mertua.

Sebenarnya masih banyak yang dapat menjadi contoh kerumitan hidup selain yang telah dikemukakan tadi. Kembali lagi, revolusi TIK memungkinkan kita menjangkau pemahaman soal kerumitan-kerumitan itu.

Seiring dengan perjalanan waktu, kehidupan memang akan semakin rumit atau kompleks, njelimet. Namun, sudah menjadi naluri umat manusia dan makhluk hidup lainnya untuk mengatasi kerumitan atau kompleksitas kehidupan.

Teknologi, alat bantu di luar panca indra untuk memenuhi kebutuhan dan menambah kenyamanan hidup sejauh ini menjadi pilihan yang terbaik. Namun, teknologi memang netral. Ia dapat menjadi alat bantu pada satu sisi dan pada sisi lain justru dapat disalahgunakan dan merugikan lebih banyak manusia.

Pada konteks inilah, relevan untuk mengingat hadits yang intinya adalah sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Makna harfiahnya adalah kalianlah yang mengetahui urusan dunia kalian. Salah satu kisah di balik hadits ini adalah tentang teknologi budi daya kurma masyarakat Madinah di masa Rasulullah.

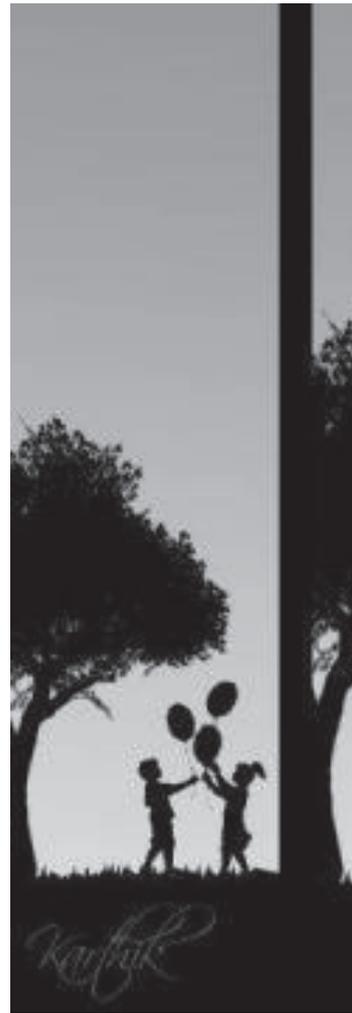
Dari Anas bin Malik ra., suatu ketika Nabi SAW melewati sahabatnya yang sedang mengawinkan kurma. Beliau lalu bersabda, "Seandainya kalian tidak melakukan seperti itu pun, niscaya kurma itu tetaplah bagus." Setelah beliau berkata seperti itu, kemudian mereka tidak mengawinkan kurma lagi, namun kurmanya justru menjadi jelek. Ketika melihat hasilnya seperti itu, Nabi bertanya, "Kenapa kurma itu bisa jadi jelek seperti ini?" Kata mereka, "Wahai Rasulullah, engkau telah berkata kepada kami begini dan begitu..."

Kemudian beliau bersabda, "Kamu lebih mengetahui urusan duniamu." (HR Muslim No. 2363)

Setidaknya ada dua hadits dengan konteks serupa. Pertama, dari Musa bin Thalhah dari ayahnya yang mengatakan: Aku pernah bersama Rasulullah melewati satu kaum yang sedang ada di atas pohon kurma. Lalu beliau bertanya, "Apa yang mereka lakukan?" Mereka berkata, "Mereka sedang melakukan penyerbukan kurma (yakni) menjadikan bunga jantan di atas bunga betina sehingga terserbuki." Rasulullah lalu bersabda, "Saya duga itu tidak berguna sedikit pun." Thalhah berkata, lalu mereka diberitahu hal itu. Kemudian mereka meninggalkan (penyerbukan itu). Selanjutnya Rasulullah diberitahu hal itu. Lalu beliau bersabda, "Jika hal itu berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka lakukan, sebab aku tidak lain hanya menduga. Jadi jangan kalian menyalahkan aku karena dugaan itu. Namun, jika aku berbicara kepada kalian sesuatu dari Allah, maka ambillah karena aku tidak akan pernah mendustai Allah 'Azza wa Jalla." (HR Muslim No. 2361).

Kedua, dari Rafi' bin Khadij yang mengatakan, Nabi datang ke Madinah, sementara mereka (penduduk Madinah) sedang melakukan penyerbukan kurma. Lalu beliau bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Mereka berkata, "Kami sedang melakukan penyerbukan kurma." Beliau bersabda, "Andai tidak kalian lakukan, itu mungkin lebih baik." Lalu mereka meninggalkan aktivitas penyerbukan itu. Kemudian ternyata pohon kurma itu berbuah buruk atau berkurang buahnya. Rafi' bin Khadij berkata, lalu mereka mengabarkan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, "Aku ini seorang manusia. Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu dari agama kalian maka ambillah. Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu berupa pendapat, maka aku hanyalah seorang manusia." (HR Muslim No. 2362).

Nah, dari hadits yang berkonteks penyerbukan kurma itu kita dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW mengisyaratkan ketika firman Allah terhenti dan Muhammad SAW telah tiada, dapat terjadi perkembangan teknologi yang jauh lebih dahsyat dari sekadar penyerbukan kurma untuk meningkatkan produktivitas buah. Dengan demikian, banyak persoalan yang terkait dengan perkembangan



teknologi, harus diselesaikan oleh umat yang hidup di masa itu. Ya, seperti urusan sedot lemak, daycare, dan KDRT yang menjadi contoh kerumitan hidup tadi.

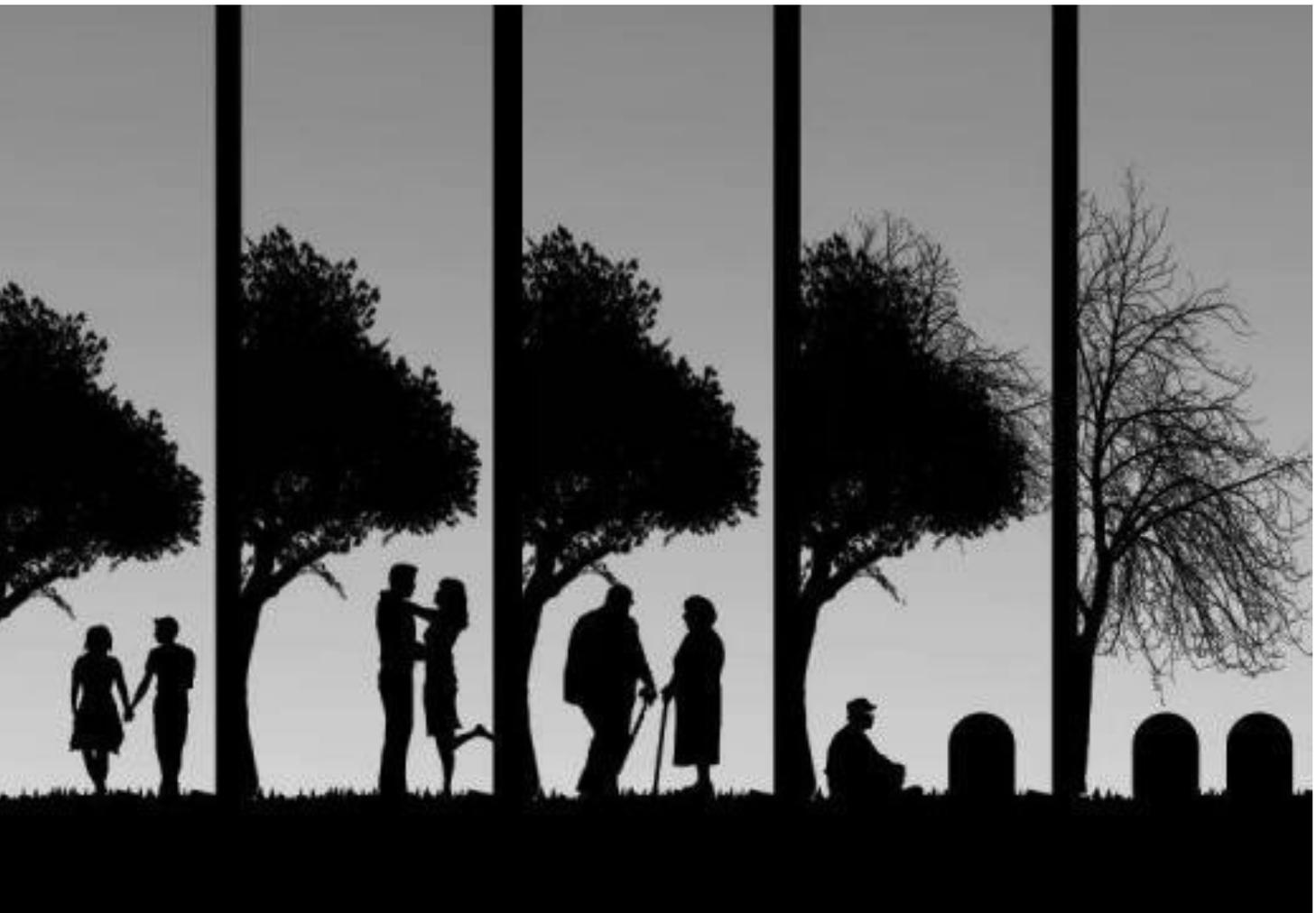
Kerumitan sedot lemak muncul antara lain oleh perkembangan ilmu dan teknologi khususnya di bidang kedokteran dan kesehatan bahwa lemak yang berlebihan di dalam tubuh memang dapat mengganggu kesehatan. Perkembangan teknologi memungkinkan penyedotan lemak di tubuh manusia. Dari sini saja kerumitan hidup sudah menyertai teknologi, misalnya, apa nilai (baik-buruk) penyedotan lemak. Halalkah, haramkah? Apa syarat menjadi halal dan menjadi haram dalam tindakan sedot lemak?

Begitu pula dengan daycare. Daycare sejauh ini merupakan jalan keluar dari kerumitan bagi suami-istri yang harus

berkeluarga. Dalam konteks Indonesia yang berada pada periode bonus demografi, warga berusia produktif (15-60) mendominasi jumlah penduduk, kondisi semacam ini adalah kerumitan hidup bagi sebagian besar dari kita.

Pada sisi lain, untuk memenuhi nafkah (belanja), banyak pengeluaran yang mungkin harus dilakukan, termasuk menyedot lemak dan menitipkan anak-anak balita di daycare. Kemudian, kerumitan itu muncul dengan risiko-risiko sebagaimana kasus pengelola daycare dan sedot lemak tadi.

Karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, maka kerumitan hidup itu niscaya menjadi persoalan umat Islam juga. Maka, sudah selayaknya para intelektual, pakar, dan ulama Islam memikirkan dan menemukan jalan keluar dari kerumitan itu. Rumit menunjukkan banyak rincian



bekerja di luar rumah pada saat yang sama. Dari sanalah daycare menjadi andalan untuk menitipkan anak sementara kedua orang tuanya bekerja. Kelanjutan daycare antara lain lembaga pendidikan usia dini (PAUD), taman pendidikan sebelum sekolah dasar, pre-school learning.

Di balik daycare, PAUD, sebenarnya tersembunyi masalah besar bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sandang-pangan-papan, sering kali tak cukup hanya suami atau istri saja yang bekerja. Tentu saja ini contoh kerumitan hidup bagi sebagian besar keluarga dan anak-anak muda yang pada saatnya akan

(detail) yang harus kita pahami. Maka semakin banyak pula keperluan menyediakan spesialis untuk mengatasi persoalan-persoalan spesifik di bidang teknologi, juga informasi, maupun komunikasi. Jangan lupa pula pentingnya spesialis lain dalam siklus kehidupan manusia, dari lahir dan dalam buaian hingga tepi kuburan.

The devil is in the details, setan (pengganggu) itu ada di rincian. Tak cukup hanya memahami garis besarnya, melainkan harus pula menguasai rinciannya. Semakin relevan pula sabda Rasulullah SAW antum a'lamu bi umuri dunyakum. ♦



NU DAN MUHAMMADIYAH SIAP KELOLA TAMBANG

Berbagai tanda tanya menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi mulai terjawab. Ringkasnya, ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama siap mengemban amanah itu.

Perpres itu sejatinya mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian bunyi petikan Pasal 5A ayat (1) Perpres Nomor 76 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 22 Juli 2024.

Belum sebulan setelah penandatanganan Perpres itu, terjadi reshuffle kabinet. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beralih dari arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia. Usai serah terima jabatan Menteri ESDM, Bahlil mengungkapkan izin tambang untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah rampung, sedangkan Muhammadiyah masih dalam proses.

Malah Bahlil sebagai Menteri ESDM menyebutkan, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PBNU sudah selesai sejak beberapa hari sebelumnya. Namun, masih menunggu pembayaran biaya Kompensasi Data Informasi (KDI) untuk bisa dikelola.

"Izin untuk ormas tambang untuk PBNU sudah selesai. Kalau tidak salah 3-4 hari lalu, tinggal mereka nyetor ke negara kan harus

KDI yang ditransfer kepada negara. Kalau sudah selesai ya selesai," ungkap Bahlil usai serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Senin, 19 Agustus 2024.

Sejauh ini pemerintah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas agama. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau lahan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama.

Adapun keenam WIUPK yang dipersiapkan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin



Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Beberapa hari kemudian, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengungkapkan, organisasinya akan mengelola tambang batu bara eks milik Bakrie Group dalam hal ini PT Kaltim Prima Coal (KPC). "Di Kalimantan Timur, eks KPC, relinquish dari KPC, luasannya 26 ribu hektare. Produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagai kecil saja dieksplor, sehingga kita belum tahu semuanya belum tahu. Sebagian kecil sekali. Tapi kita sudah bisa produksi dan eksplorasi lagi," kata Gus Yahya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.

Dia menjelaskan, lahan eks

KPC yang akan dikelola oleh pihak PBNU nantinya akan memiliki luas sekitar 26.000 hektare. KPC merupakan salah satu entitas tambang batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), milik Grup Bakrie yang kini dikendalikan bersama-sama dengan Grup Salim.

Tak lupa Gus Yahya mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan izin konsesi pertambangan untuk organisasi masyarakat, hingga terbitnya IUPK. "Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha

pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," ujarnya.

Gus Yahya menjelaskan, saat ini Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk kegiatan pertambangan tersebut sudah terbit. Ia berharap pada Januari 2025 proses eksplorasi dan produksi sudah bisa segera di mulai. "Segera-segera, karena IUP sudah keluar, mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja," katanya

Namun, sampai saat ini pihaknya belum membuat struktur lengkap perusahaan tambang milik PBNU yang akan mengelola tambang tersebut. Begitu juga dengan sosok yang mengurus perusahaan tersebut. Maklum, ormas keagamaan yang mau mengelola wilayah tambang harus membuat badan usaha lain yang mengelola kegiatan tersebut. "Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya," katanya.

Lebih lanjut, saat ditanya mengenai nantinya perusahaan tambang batu bara milik PBNU bakal melakukan kegiatan hilirisasi, ia masih belum bisa memastikan. "Iya, iya, belum kami belum sampai ke sana lah. Kami juga masih koordinasi juga dengan teman-teman jaringan bisnis yang dikenal NU apa saja yang harus kita lakukan," kata Gus Yahya.

Namun, terkait lokasi tambang batu bara di Kalimantan Timur itu, Gus

Yahya juga mengungkapkan PBNU berencana membeli 100 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk membangun fasilitas dan kantor untuk PBNU hingga peluang bisnis bagi organisasi. "Insya Allah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare misalnya, untuk kemudian kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas untuk organisasi," ujarnya

Gus Yahya mengatakan Presiden Jokowi merestui rencana PBNU tersebut untuk membangun fasilitas pendidikan, keseha-

ya mungkin kita butuh sekitar dua atau tiga triliun rupiah," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menambahkan bahwa NU meyakini pembangunan di IKN sebuah gagasan penting yang harus didukung, terutama dengan landasan undang-undang yang memastikan keberlanjutan pembangunannya.

Nah, bagaimana dengan ormas Muhammadiyah yang juga sudah bersedia menerima WIUPK? Menteri Bahlil mengemukakan Muhammadiyah segera mendapatkan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan

kata dia.

Menanggapi pernyataan Bahlil, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa mereka masih menunggu di mana lokasi dan alokasi tambang yang diberikan pemerintah, setelah sebelumnya menyatakan menerima pengelolaan Izin Usaha Tambang (IUP) pada Konsolidasi Nasional akhir Juli lalu.

"Nah sekarang kita belum tahu lokasinya di mana kan kita belum tahu. Dari lokasi dan alokasinya berapa dan di mana kita belum tahu," ujar Sekretaris Umum PP Muham-



tan dan keagamaan di IKN. Presiden Jokowi pun, kata Gus Yahya, memberikan saran terkait lokasi lahan yang bagus yang bisa dibeli oleh NU di IKN. Oleh sebab itu, PBNU segera berkomunikasi dengan Otorita IKN untuk membahas lebih lanjut rencana tersebut.

"Ada sejumlah saran-saran beliau mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN. Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN," kata Gus Yahya.

Selain membangun fasilitas, PBNU juga mempertimbangkan potensi bisnis di IKN dengan modal yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun sampai Rp3 triliun. "Yang sekarang kami punya adalah gagasan mengenai konsolidasi kapital untuk itu. Gimana caranya? Nah nilainya masih akan kita hitung,

Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

"Kemungkinan besar eks Adaro atau eks Arutmin," ujar Bahlil usai rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Ia mengemukakan sudah memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti, dan akan menginformasikan lebih lanjut perkembangannya ke depan. "Kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangannya sudah sejauh mana, nanti saya akan kembali informasikan," sambungnya.

Bahlil juga menegaskan tambang yang hendak diberikan kepada Muhammadiyah tersebut cukup luas, serta memiliki cadangan yang sesuai. "Tambang itu bukan soal luasnya, tapi yang penting cadangannya,"

muhammadiah Abdul Mu'ti di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

Mu'ti menegaskan PP Muhammadiyah belum mendapatkan IUP. Izin tersebut bakal menjadi landasan Muhammadiyah bisa mengelola pertambangan. Saat ini, kata Mu'ti, Muhammadiyah tengah bersiap serta terus berdiskusi dengan para ahli agar berbagai dampak lingkungan dan dampak sosial dapat diantisipasi sejak awal.

"Jadi Muhammadiyah tentu yang sekarang kita lakukan adalah menyiapkan dengan sebaik-baiknya agar berbagai dampak lingkungan dan dampak sosial yang menjadi konsekuensi dari pertambangan itu dapat kita antisipasi dari awal," kata dia. Dengan begitu, sambungnya, bisa meminimalkan tingkat kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan.

Mu'ti mengemukakan pengelolaan tambang yang akan diberikan kepada PP Muhammadiyah akan tetap memperhatikan aspek lingkungan serta sosial masyarakat sekitar.

"Satu hal yang diajarkan oleh Islam itu adalah keseimbangan. Keseimbangan dalam pengertian, ya, kita bisa mengeksplorasi tapi tidak mengeksploitasi. Itu saya kira prinsip yang diajarkan oleh Islam," ujarnya.

Menurut dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kekayaan alam untuk kesejahteraan dan sumber penghidupan bagi

"Dan sebagian dari sumber daya alam itu memang sumber daya alam yang ada di minerba (mineral dan batu bara) itu. Karena itu maka yang penting adalah bagaimana keseimbangan antara eksplorasi dengan konservasi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Hadar Nashir menyatakan ingin mewujudkan pengelolaan usaha pertambangan yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. "Kami ingin mengelola tambang yang pro-kesejahteraan sosial dan pro-lingkungan," kata Haedar di

ini. Tetapi kami juga menghargai 'political will' pemerintah untuk menjadikan tambang lewat PP Nomor 25 untuk kesejahteraan sosial," kata dia.

Dalam menjalankan usaha pertambangan, pihaknya bakal mengembangkan model reklamasi dengan melibatkan program studi tambang, pertanian, kehutanan, teknik lingkungan, dan geologi di sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah.

Muhammadiyah, kata Haedar, merupakan organisasi besar yang telah berpengalaman dan saksama dalam mengelola



mahluk hidup. Ia juga mengutip Surat Al Hadid yang menjelaskan perihal besi.

Oleh sebab itu, kata dia, Muhammadiyah ikut ambil bagian dalam pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah. Apalagi keberlangsungan ekonomi di Indonesia sebagian besarnya masih bergantung pada sumber daya alam.

"Karena itu kalau kita tidak boleh menambang sama sekali, ya, Indonesia ini saya kira tidak akan bisa survive. Karena keberlangsungan ekonomi kita ini masih sebagian besarnya tergantung dari sumber daya alam yang kita miliki," kata dia.

Toh, sambung Mu'ti, aspek keseimbangan harus menjadi faktor kunci dalam pengelolaan tambang. Muhammadiyah ingin eksplorasi dan konservasi dapat berjalan beriringan.

Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman, Minggu, 28 Juli 2024.

Komitmen itu ditegaskan Haedar setelah PP Muhammadiyah mengumumkan menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. "Kami ingin punya 'role model' pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial," ujar dia.

Dia menegaskan bahwa apabila pada akhirnya pengelolaan tambang itu lebih banyak dampak buruknya bagi lingkungan hidup maka Muhammadiyah akan mengembalikan IUP dari pemerintah. "Ini poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang

berbagai amal usaha berorientasi bisnis yang dimiliki. "Itu semua kami kembalikan untuk kepentingan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat," ujar dia.

Haedar berharap, semua pihak tidak memandang usaha pertambangan yang bakal dikelola PP Muhammadiyah bakal berorientasi pada keuntungan semata. "Jangan dibayangkan yang serba positif menggembirakan, apalagi serba duit dan insyaallah kami jauh dari itu," kata dia.

Sebaliknya, ia juga meminta sektor pertambangan tidak selalu dipandang sebagai suatu ancaman serta kesan buruk lainnya. "Jangan menganggap dan meletakkannya sebagai sesuatu yang serba pahit, penuh dengan ancaman, dan seakan-akan kiamat kalau kita masuk ke dunia itu," tandasnya. ♦



PEMPROV SUMSEL BERSAMA OJK DAN BI SERTA FORKOPIMDA FOKUS TANGANI JUDI ONLINE

DI bawah kepemimpinan Pj Gubernur Elen Setiadi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) berkomitmen mengikis habis segala bentuk perjudian. Terlebih judi online yang marak di masyarakat dan merasuki anak-anak hingga dewasa bahkan ibu rumah tangga.

Upaya pemberantasan sudah dimulai dengan diselenggarakannya rapat bersama dengan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel Babel serta Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel.

Rapat untuk merumuskan langkah-langkah antisipasi dampak judi online tersebut diselenggarakan di Kantor OJK Sumsel Babel Jalan Jenderal Sudirman Palembang, Jumat (23/8/2024) siang.

Dalam rapat tersebut, Pj Gubernur Elen Setiadi, S.H, M.S.E, menegaskan dampak maraknya judi online di antaranya penurunan tingkat kesejahteraan, yang berakibatnya sudah tentu angka kemiskinan naik.

"Sejalan dengan imbauan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Provinsi Sumsel mengambil langkah-langkah preventif. Saya minta Kepala Daerah dan OPD untuk

melakukan pemeriksaan secara random dan ketat kepada para ASN yang melakukan aktivitas judi online," tegas Elen.

Pemprov bersama Forkopimda Sumsel akan terus bersinergi mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat judi online.

"Pemprov Sumsel akan membuat Surat Edaran (SE) ke Kabupaten/kota tentang penanggulangan judi online," tambahnya.

Upaya pencegahan atau preventif penting sekali dilakukan. Caranya masyarakat dilibatkan dalam pengawasan. Jika didapati ada akun judi online, maka orang yang menemukannya bisa melaporkan ke OJK.

"Sosialisasi tentang bahaya judi online penting dilakukan, tak hanya di sekolah, namun bisa juga di tempat ibadah, di tempat fasilitas umum seperti mall misalnya. Gunanya tak lain untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya judi online. Bahkan dapat pula dibuatkan modul un-



tuk para pelajar yang menerangkan tentang bahaya judi online," kata Pj Gubernur.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, MH mengungkapkan, Pemprov Sumsel telah membuat Surat Edaran (SE) tertanggal 19 Agustus 2024 yang memuat hal penting, yang pertama ditujukan kepada seluruh perangkat daerah dan yang kedua ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah untuk menghimbau agar tidak melakukan judi online.

"Agar bisa menegur, melakukan pengawasan, dan melakukan edukasi/sosialisasi judi online atau bentuk perjudian lainnya. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh perangkat daerah. Hukumannya jelas baik pidana maupun penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang kedapatan melakukan judi online," ujar Edward.

PENJUDI ONLINE TERBANYAK PELAJAR DAN MAHASISWA

MAU dibawa ke mana negeri ini? Generasi muda terutama pelajar dan mahasiswa banyak terpapar dan kecanduan judi online.

Hal itu terungkap dari penjelasan Kepala OJK Sumsel Babel Arifin Susanto, yang memaparkan tentang dinamika dan penanganan judi online. Bahwa berdasarkan

data PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), jumlah transaksi judi online mencapai 600 triliun per tahun, dan terjadi 14 ribu transaksi.

"Berdasarkan statistik yang melakukan judi online sebanyak 3,7 juta orang, dengan 85% adalah laki-laki, dan 3,2 juta-nya



Pemprov Sumsel akan membuat Surat Edaran (SE) ke Kabupaten/kota tentang penanggulangan judi online.

perempuan. Pelaku judi online 80% merupakan kalangan menengah ke bawah. Kategori terbanyak adalah pelajar/mahasiswa, buruh tani, dan ibu rumah tangga," terang Arifin.

Maraknya judi online karena digitalisasi yang tidak mengenal batas, di mana semua kalangan dapat mengakses, dan bisa melakukan pembelian rekening. OJK

telah melakukan upaya dengan ikut serta memberantas judi online dengan memblokir 6.056 rekening bank, juga memiliki satgas judi online.

"Kami sudah melakukan penghentian pinjol yang ilegal. Kemudian memutus 3 rantai mata setan (lingkaran setan) yaitu pinjaman online yang ilegal, investasi online, dan judi online. Judi online terjadi di semua kalangan. OJK bersama kominfo juga sudah memblokir 1,5 juta konten iklan judi online," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala BI Perwakilan Sumsel Ricky P. Gozali menjelaskan pihaknya konsen terhadap judi online karena Indonesia Emas 2045 yang dicita-citakan bersama tidak akan terwujud bila anak-anak muda saat ini terlibat judi online. Terjadinya judi online ini karena sistem digitalisasi yang begitu mudah.

Judi online tidak hanya merusak diri sendiri tetapi juga orang lain, bahkan judi online lebih berat dari kejahatan narkoba," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu pihak TNI dan Polri juga sepakat bahwa, pemberantasan dan pencegahan judi online merupakan tugas bersama. Oleh sebab itu diperlukan komitmen dan langkah nyata tak hanya dari aparat penegak hukum namun juga dari para pemangku kebijakan lainnya. ♦

PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut DIDAMPINGI PJ KETUA TP PKK, PJ GUBERNUR LEPAS KEBERANGKATAN 382 ATLET

Penjabat (Pj) Gubernur Elen Setiadi didampingi Pj Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan Melza Setiadi. Pagi itu semua berkumpul di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan mengikuti secara resmi melepas keberangkatan 382 Atlet dan Oficial Kontingen Sumsel yang akan berlaga dalam PON XXI di Aceh-Sumut.

Upacara pelepasan ini berlangsung dalam suasana meriah dan penuh keakraban di Halaman Kantor Gubernur Sumat-

era Selatan pada Jumat (23/8/2024). Pj Gubernur memberikan motivasi kepada 382 atlet Kontingen Sumsel yang akan berlaga dalam PON XXI di Aceh-Sumut.

Dalam arahnya, Pj Gubernur Elen Setiadi berharap para atlet dari Sumsel mampu meraih medali dan kembali membawa Sumsel ke posisi 10 besar dalam



perolehan medali.

“Berjuanglah dengan penuh semangat untuk Sumsel. Jika pada PON XX kita berada di peringkat 20, maka kita semua berharap pada PON 2024 ini Sumsel bisa menembus 10 besar,” katanya.

Diungkapkan Pj Gubernur Elen Setiadi, dirinya yakin bahwa para atlet yang bertanding di PON XXI memiliki satu tujuan, yaitu memenangkan semua pertandingan dan lomba, untuk membawa pulang banyak medali emas.

Kendati memberi semangat agar semua atlet menggunakan segenap kemampuan untuk menjadi pemenang, Pj Gubernur juga mengingatkan agar senantiasa menjunjung tinggi sportivitas.

“PON bukan hanya kompetisi, tetapi juga ajang silaturahmi antar atlet. Jadilah

pahlawan olahraga yang mengharumkan nama Sumsel,” ia mengingatkan.

Elen Setiadi juga berjanji akan memberikan apresiasi berupa bonus kepada atlet yang berhasil meraih medali pada PON XXI.

“Saya secara pribadi dan sebagai Pj Gubernur Sumsel merasa bangga dapat melepas dan mengukuhkan kalian untuk berpartisipasi di PON Aceh-Sumut. Pemprov akan memberikan penghargaan kepada atlet yang berhasil menjadi juara,” tegasnya.

Atlet Sumsel Mengikuti 50 Cabang Olahraga

SEBANYAK 382 Atlet Sumsel akan berjuang di PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Mereka sudah dipersiapkan dan siap untuk bertanding dan berlomba di 50 cabang olahraga yang PON XXI ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia (KONI) Sumsel Yulian Gunhar, dalam laporannya di acara Pelepasan Keberangkatan Atlet Sumatera Selatan ke PON XXI Aceh-Sumut tersebut.

“Hari ini, kami melepas 382 atlet yang akan bertanding dalam 50 cabang olahraga di PON XXI. Kami berharap mereka bisa membawa nama baik Provinsi Sumatera Selatan,” ungkap Yulian.

Yulian juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumsel dan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumsel atas dukungan yang telah diberikan dalam persiapan para atlet untuk

PON XXI.

“Atas nama KONI Sumsel, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov, Pj Gubernur, dan Dispora Sumsel yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada para atlet serta membantu persiapan mereka untuk mengikuti PON XXI.

“Semoga kita dapat meraih posisi 10 besar,” harapnya. ♦



Berjuanglah dengan penuh semangat untuk Sumsel. Jika pada PON XX kita berada di peringkat 20, maka kita semua berharap pada PON 2024 ini Sumsel bisa menembus 10 besar.



PJ GUBERNUR SUMSEL ELEN SETIADI, S.H, M.S.E DORONG KERJASAMA PTBA -PTSM DI BIDANG ANGKUTAN BATU BARA DAN PENGELOLAAN LIMBAH

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H, M.S.E, menghadiri secara langsung Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BUMN dan BUMD pada Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah, di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Kuningan Jakarta, Kamis (22/8/2024) pagi.



Pada kegiatan yang diinisiasi oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tersebut bertujuan memperoleh komitmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam peningkatan perekonomian lokal.

Usai menghadiri acara itu, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sebelumnya telah menjalin kesepakatan bersama dengan PT Bukit Asam, Tbk (PTBA) pada tanggal 6 Mei 2024, untuk mendukung program prioritas pembangunan dan pengembangan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam kesepakatan tersebut, PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS) ditunjuk sebagai pilot project untuk melaksanakan kerjasama antara BUMD dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam program Strategi Nasional Penguatan BUMN-BUMD (Stranas PK).

Dikemukakan Elen Setiadi, kegiatan ini merupakan fasilitasi yang diberikan oleh KPK terutama untuk memberdayakan BUMD dengan memanfaatkan BUMN yang ada di wilayah masing-masing.

"Jadi hari ini kita PT SMS bekerjasama dengan PT Bukit Asam Tbk untuk angkutan batu bara, ini salah satu model kerjasama yang bisa kita kembangkan," katanya.

Elen mengungkapkan, PT SMS adalah BUMD Provinsi Sumatera Selatan, berencana melakukan kerjasama dengan BUMN PT Bukit Asam (PTBA) dalam bidang angkutan kereta api batu bara, angkutan hauling batu bara menggunakan truk, dan pengelolaan limbah B3.

"Pemerintah Provinsi Sumsel mendorong sinergi kerjasama ini dengan program pemerintah daerah terkait pengembangan BUMD dan peningkatan konektivitas



regional. Kemudian memastikan dampak positif kerjasama ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Sumatera Selatan,” tandasnya.

Diinisiasi dan Difasilitasi KPK RI

ACARA yang dihadiri Pj Gubernur Sumsel ini dibuka oleh pimpinan KPK. Kegiatan ini sekaligus merupakan pelaksanaan out-put ke-4 dari aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN dan BUMD), yaitu kolaborasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN - BUMD).

Aksi ini didasari pada belum optimalnya proses pengawasan terhadap badan usaha pemerintah, baik BUMN maupun BUMD. Selain penandatanganan perjanjian kerjasama, acara juga diisi dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri BUMN Erick Thohir, untuk mengajak lebih banyak Kerjasama BUMN-BUMD di seluruh daerah di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Us-



Jadi hari ini kita PT SMS bekerjasama dengan PT Bukit Asam Tbk untuk angkutan batu bara, ini salah satu model kerjasama yang bisa kita kembangkan.

aha Milik Daerah (BUMD), Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sebagai upaya pencegahan korup-

si, pada periode aksi 2023-2024, Stranas PK kembali mendorong aksi untuk memperkuat pengawasan badan usaha pemerintah mulai perizinan, dasar regulasi kolaborasi BUMN BUMD, dan penerapan manajemen risiko.

Stranas PK, diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi agar dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak.

Terdapat total 114 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 60 kementerian & lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 20 Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi mandat melaksanakan tiga Fokus seperti diamanatkan dalam Perpres 54 Tahun 2018 (Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi) kedalam 15 Aksi Pencegahan Korupsi / Aksi PK 2023-2024.

Aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN BUMD) merupakan salah satu aksi di fokus ke-3, yaitu fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi. ♦



JEMBATAN PRIMER 6 SUNGAI LALAN ROBOH, RAKYAT MENDERITA

Pj Gubernur Bentuk Satgas Percepatan Pembangunan Kembali

Robohnya Jembatan Primer 6 Sungai Lalan atau Jembatan P6 Lalan pada 12 Agustus menelan 5 korban jiwa dan 6 lainnya luka parah dan luka ringan, sementara banyak sepeda motor hilang terbawa arus sungai. Karena jembatan roboh seketika tertabrak tongkang angkutan batu bara, saat banyak warga memancing dan melintas di jembatan itu.

Dampak robohnya Jembatan P6 Lalan ini telah menimbulkan dampak sangat buruk bagi masyarakat. Tidak ada lagi akses jalan darat yang bisa digunakan warga, sehingga mobilitas dan perekonomian mereka terganggu. Terlebih anak-anak. Mereka kesulitan untuk menuju sekolah karena terpaksa menggunakan angkutan sungai, yang saat ini jumlahnya sangat tidak memadai.

Pj Gubernur Elen Setiadi bersama Pang-

dam II Sriwijaya dan Kapolda Sumatera Selatan didampingi Pj Bupati Sandi Fahlepi dan jajaran beserta Unsur Forkopimda Muba melakukan peninjauan. Rombongan datang ke lokasi kejadian di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel) itu.

Rombongan juga memberikan bantuan untuk semua keluarga korban meninggal dunia dan korban luka-luka.

Setelah meninjau langsung ke lokasi, Jumat (23/8/2024), Pj Gubernur mene-

gaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan kembali Jembatan Primer 6 Sungai Lalan. Ia memimpin rapat pembahasan penanganan dampak sosial kerusakan Jembatan P 6 Lalan di Auditorium Graha Bina Praja, Pemprov Sumsel.

"Hari ini kita akan mengambil langkah dan solusi ataupun kebijakan yang tepat dalam rangka percepatan pembangunan kembali dengan opsi pembangunan terhadap sisa konstruksi yang ada atau dengan pembangunan baru," ujarnya.



Elen menegaskan perbaikan Jembatan P6 Lalan harus segera dilaksanakan dan dilakukan oleh perusahaan yang menabrak jembatan dan Perusahaan lain yang melintas di Sungai Lalan tersebut. Kelayakan konstruksi bangunan jembatan selanjutnya akan dinilai oleh tenaga ahli.

"Jembatan ini sangat serius untuk diperbaiki karena jembatan tersebut merupakan akses jalan Masyarakat untuk beraktivitas sehari - hari sehingga sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat," jelasnya.

Elen katakan selama prosesnya, juga perlu diberikan santunan sosial bagi korban yang meninggal, luka berat, luka ringan dan penggantian kerugian barang-barang/ kendaraan yang hilang. Selain itu, dibutuhkan transportasi penyeberangan orang, barang dan kendaraan, dan pengangkatan puing-puing jembatan.

"Ada aspek perdata hukum bagi badan usaha yang menyebabkan hancurnya jembatan, untuk melakukan kajian dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk membangun kembali Jembatan. Selain itu, ada keinginan agar masyarakat juga dilibatkan dalam pros-

esnya," tuturnya.

Terdapat beberapa aspek yang akan diprioritaskan yaitu aspek perdata hukum, aspek pengelolaan, dan aspek pengawasan. Namun ada hal yang paling mendesak atas kejadian ini yaitu penanganan terhadap dampak sosial dan ekonomi sekaligus penyaluran santunan dan aspek kerugian yang dirasakan oleh masyarakat yang terdada.

"Jika semakin lama keputusan diambil, saya yakin pasti akan berdampak juga pada hal lainnya dan akan mengganggu aktivitas semua pihak. Oleh sebab itu, pada kegiatan ini silahkan berikan masukan agar persoalan-persoalan ini bisa kita sepakati," tandasnya.

Selain masyarakat sekitar tercatat Sungai ini juga tempat melintas bagi 21 perusahaan batu bara, CPO dan Pulp. Sehingga apabila tidak ditanggulangi ini akan berdampak luas bagi masyarakat dan juga perusahaan lainnya.

Jadi Perhatian Pemerintah Provinsi Sumsel

Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Sandi Fahlepi, S.P., M.Si., atas

nama Pemkab Muba mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi dan jajaran Forkopimda Sumsel, atas perhatian khusus terhadap penanganan kerusakan jembatan P6 Lalan.

Ia menjelaskan Kronologis Kejadian yaitu pada Senin malam telah terjadi musibah tersebut. Lokasinya di Desa 12 Agustus 2024 Pada Pukul 20.40 telah terjadi penabrakan pada bagian tengah Jembatan Primer 6 Sungai Lalan Desa Sukajadi, oleh kapal yang bermuatan batu bara yang ditarik oleh Tb Modelin Spirit dan Tongkang Santana Jaya Cargo milik BSL (Bara Sentosa Lestari) yang diassist oleh Tugboat Paris 22.

Kapal Tersebut melintas di Bawah Jembatan P6 Lalan pada malam hari saat Kondisi Air Sedang Pasang. Kondisi Kapal dan Tongkang sudah diamankan Polairud. Kapten kapal diamankan oleh Direktorat Polairud Polda Sumsel guna investigasi lanjutan.

"Untuk mengantisipasi beberapa dampak yang mungkin terjadi, telah dilakukan berbagai Upaya bersama dari berbagai pihak Pemprov Sumsel, Pemkab MUBA, Kapolda Sumsel, Kodam II Sriwijaya dan stakeholder terkait," katanya. ♦



PJ Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi AJAK MASYARAKAT MEMBUDAYAKAN PEMBAYARAN NON-TUNAI

Penjabat (Pj) Gubernur Elen Setiadi, didampingi Pj Ketua Dekranasda Sumatera Selatan, Melza Elen Setiadi, menghadiri Pekan QRIS Nasional 2024 dengan tema “Digital Kito Galo 5th 2024”.

Agenda Pekan QRIS Nasional ini disatukan pula dengan Launching Penggunaan QRIS pada LRT Palembang dan diselenggarakan di Main Atrium Palembang Indah Mall, Jumat, 23 Agustus 2024.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Elen Setiadi mengatakan bahwa cepatnya pergerakan roda ekonomi ritel yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, tidak lepas dari akselerasi sistem pembayaran digital.

“Saya mengapresiasi acara ini sebagai langkah penting dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama dengan adanya kemajuan digital di sektor perbankan yang memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan,

kepraktisan, personalisasi, hingga keamanan,” katanya.

Sejalan dengan pertumbuhan sektor ritel, kanal-kanal pembayaran nontunai berbasis digital tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan kanal nontunai konvensional.

“Dengan diluncurkannya QRIS LRT Sumsel, yang merupakan yang pertama di Indonesia, mewakili Pemerintah Provinsi Sumsel, kami berharap penerapan pembayaran digital di Sumatera Selatan dapat semakin meluas. Mari kita dukung bersama percepatan digitalisasi pembayaran di Sumatera Selatan. ‘Pakai QRIS untuk Indonesia Maju #Payo Pakai QRIS,’” katanya.

Menurutnya, saat ini Pemerintah terus berupaya dan mendorong transformasi

digital di Sumatera Selatan, khususnya pada transaksi dilingkungan pemerintah.

Berdasarkan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) periode Semester I-2024, seluruh Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera Selatan telah masuk ke dalam kategori Digital sebagai tingkatan tertinggi.

Seluruh belanja daerah dan penerimaan pajak sudah dapat dilakukan secara nontunai, namun penerimaan retribusi masih perlu didorong agar dapat seluruhnya menerima transaksi nontunai.

Berkaitan dengan kegiatan Digital Kito Galo 5th 2024, Gubernur Elen mengatakan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan Transformasi Digital yang menjadi strategi utama menuju visi Indonesia 2045, yaitu menjadi negara dengan pendapatan domestik bruto ke-5 di dunia.

Ia juga berharap bahwa kegiatan tersebut dapat menjadi wadah edukasi bagi masyarakat Sumsel, sekaligus meningkatkan implementasi QRIS dari sisi usage dan quality.

"Saat ini, implementasi telah memasuki tahap usage yang perlu diperluas akseptasinya baik dari segi pengguna maupun transaksi menuju ke tahapan quality dengan didukung penguatan literasi mengenai manfaat dan keamanan bertransaksi menggunakan Qris", tuturnya.

Dilaksanakan Serentak

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Ricky Perdana Gozali menyampaikan bahwa Kegiatan Digital

Kito Galo 5th 2024 merupakan bagian dari kegiatan Pekan Qris yang diselenggarakan serentak di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Kegiatan Digital Kito Galo 5th 2024 dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 23-25 Agustus 2024. Yang diisi dengan berbagai kegiatan dari bootcamp, layanan perbankan, pembayaran pajak motor, pajak bumi dan bangunan serta dimeriahkan dengan berbagai per-



Kegiatan tersebut dapat menjadi wadah edukasi bagi masyarakat Sumsel, sekaligus meningkatkan implementasi QRIS dari sisi usage dan quality.

lombaan.

Ia juga mengatakan bahwa ditahun ini pelaksanaan Kegiatan Digital Kito Galo 5th 2024 terasa lebih spesial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hal tersebut disebabkan oleh, pertama telah disepakati oleh seluruh mall yang ada di Sumsel untuk berkomitmen menjadi mall siap QRIS di mana 11 mall di Sumsel telah menjadi mall siap QRIS, yang semua tenant telah menggunakan dan menyediakan QRIS untuk transaksinya.

Hal kedua yang membuat Kegiatan Digital Kito Galo 5th 2024 menjadi lebih spesial ialah telah dilaunchingnya oleh Pj. Gubernur Sumsel, Elen Setiadi Penggunaan QRIS untuk pembelian Tiket LRT Kota Palembang dan inovasi tersebut merupakan yang pertama di Indonesia.

Ricky P. Gozali, menjelaskan bahwa Digital Kito Galo 5th 2024 dengan tema "Pakai QRIS untuk Indonesia Maju, QRIS-nya Satu, Menangnya Banyak #Payo Pakai QRIS" adalah bukti nyata dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat digitalisasi pembayaran.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperluas penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran, serta menjadi stimulus bagi inovasi di bidang ekonomi dan keuangan digital.

"Format kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna QRIS di masyarakat, sehingga dapat mendorong penggunaan QRIS di berbagai sektor, baik di kalangan anak-anak, remaja, dewasa, masyarakat umum, perbankan, maupun UMKM," katanya.

Turut hadir Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Arifin Susanto, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel, Rahmadi Murwanto, Ak., MAcc., MBA, PhD, Kakanwil, Ditjen Kekayaan Negara Sumsel, Jambi dan Babel, Ferdinan Lengkong, S.H, Dirut Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. ♦



Pemprov Sumsel Gandeng Perusahaan China TBEA Co. Ltd.

MEMANFAATKAN EBT DENGAN PLTS BERKAPASITAS 300 MW

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Elen Setiadi berkomitmen untuk memanfaatkan potensi energi baru terbarukan (EBT). Dalam hal ini Pemprov Sumsel menjajaki pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 300 Megawatt (MW), bekerjasama dengan perusahaan China Tebian Electric Apparatus (TBEA) Co. Ltd.

Kerjasama pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan ini direalisasikan dengan penandatanganan komitmen bersama di Ruang Rapat Gubernur Sumsel pada Rabu tanggal 21

Agustus 2024 oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sumsel Elen Setiadi dan Direktur Marketing TBEA Co.,Ltd. Alex Chen Chuan.

Pj Gubernur

Elen Setiadi menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumsel terhadap rencana pembangunan PLTS 300 MW. Menurutnya, kerja sama strategis yang dimulai dengan komitmen bersama ini, menandai langkah maju dalam memanfaatkan solusi energi terbarukan dan pengembangan sumber daya energi bersih.

Dikatakan Gubernur Elen Setiadi, listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk menopang produktivitas masyarakat.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Provinsi Sumsel dengan kapasitas 300 Megawatt tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat Sumsel khususnya. Tetapi juga pemerataan pembangunan di daerah terpencil, dan juga bisa membantu provinsi terdekat Sumsel.

Menurut Pj Gubernur Elen, Pemerintah Provinsi Sumsel akan mendukung penggunaan energi ramah lingkungan atau clean energy, melalui penurunan faktor emisi karbon, sehingga bumi menjadi bersih dan sehat, serta yang paling utama adalah meningkatkan perekonomian.

"Pemprov Sumsel mendukung proyek ini. karena melalui proyek ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumsel," tuturnya.



Elen berharap Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Provinsi Sumsel dengan kapasitas 300 Megawatt, akan segera masuk ke tahap pembangunan dan sudah bisa ground breaking sebelum akhir tahun 2024.



Terima kasih kepada Tebian Electric Apparatus yang telah memilih Provinsi Sumsel untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Provinsi Sumsel dengan kapasitas 300 Megawatt.

“Terima kasih kepada Tebian Electric Apparatus yang telah memilih Provinsi Sumsel untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Provinsi Sumsel dengan kapasitas 300 Megawatt. Kita harapkan ini awal untuk kedepannya, Kalau bisa sebelum akhir tahun 2024 sudah ground breaking,” katanya.

Mendorong Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan

RENCANA pembangunan Pembangkit

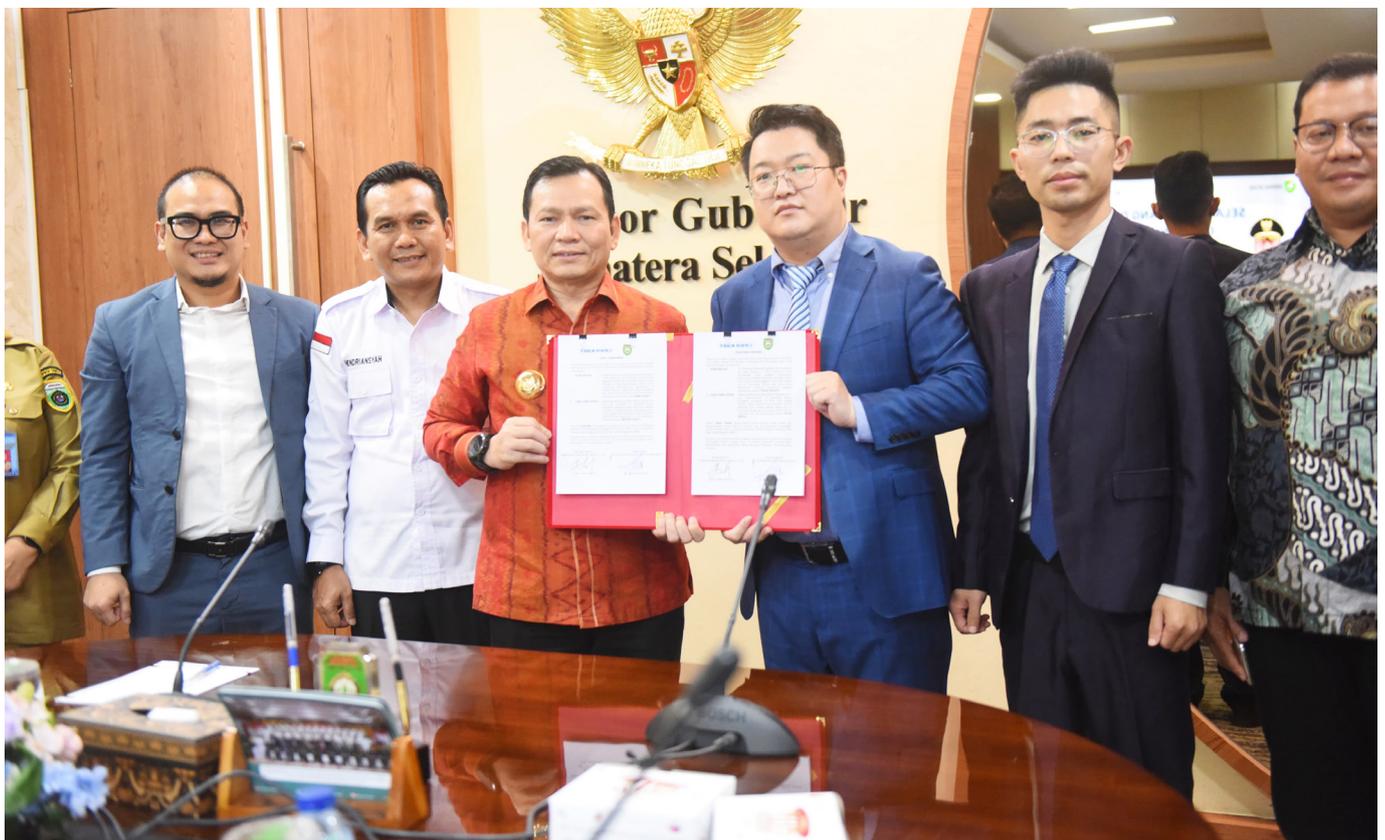


Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 300 megawatt ini akan menjadi langkah maju Pemerintah Provinsi Sumsel dalam pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT.

Dikemukakan Direktur Marketing, TBEA Co.,Ltd. Alex Chen Chuan, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Sumsel punya komitmen bersama . Yaitu pengembangan bisnis melalui investasi dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Provinsi Sumsel berkapasitas 300 Megawatt.

Proyek pembangunan PLTS 300 Megawatt ini disebutnya sebagai langkah konkret Pemerintah Provinsi Sumsel dan TBEA dalam mendorong percepatan transisi energi terbarukan di Indonesia.

“Dalam waktu dekat kita akan segera survei lapangan terutama mengkaji dan memetakan kawasan yang tepat untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan kapasitas 300 Megawatt di Provinsi Sumatera Selatan,” katanya. ♦



12 DESTINASI WISATA HALAL DI SUMATERA BARAT

Dari Masjid Raya Hingga Miniatur Mekkah

Sebagai provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Sumatera Barat terus berbenah mengembangkan potensi wisata yang dimiliki. Ranah Minang terus menggali dan mengembangkan pariwisatanya, mulai dari wisata alam, budaya, hingga modern.

Dan upaya tersebut membuahkan hasil, Sumatera Barat berhasil meraih 4 penghargaan pada Anugerah Desa Wisata Tahun 2021, terus melengkapi kemampuan dunia pariwisatanya dalam melayani para wisatawan, salah satu kelengkapan ini adalah memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan muslim.

Yang lebih menguatkan adalah prestasi pada tahun 2016, dimana Sumatera Barat berhasil meraih 3 best kategori di ajang World Halal Tourism Award dengan menyabet 3 kategori penghargaan yaitu,

World's Best Halal Destination, World's Best Halal Tour Operator, dan World's Best Halal Culinary Destination.

Keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang membanggakan tentunya, tapi Sumatera Barat tidak mau terbuai dengan keberhasilan tersebut.

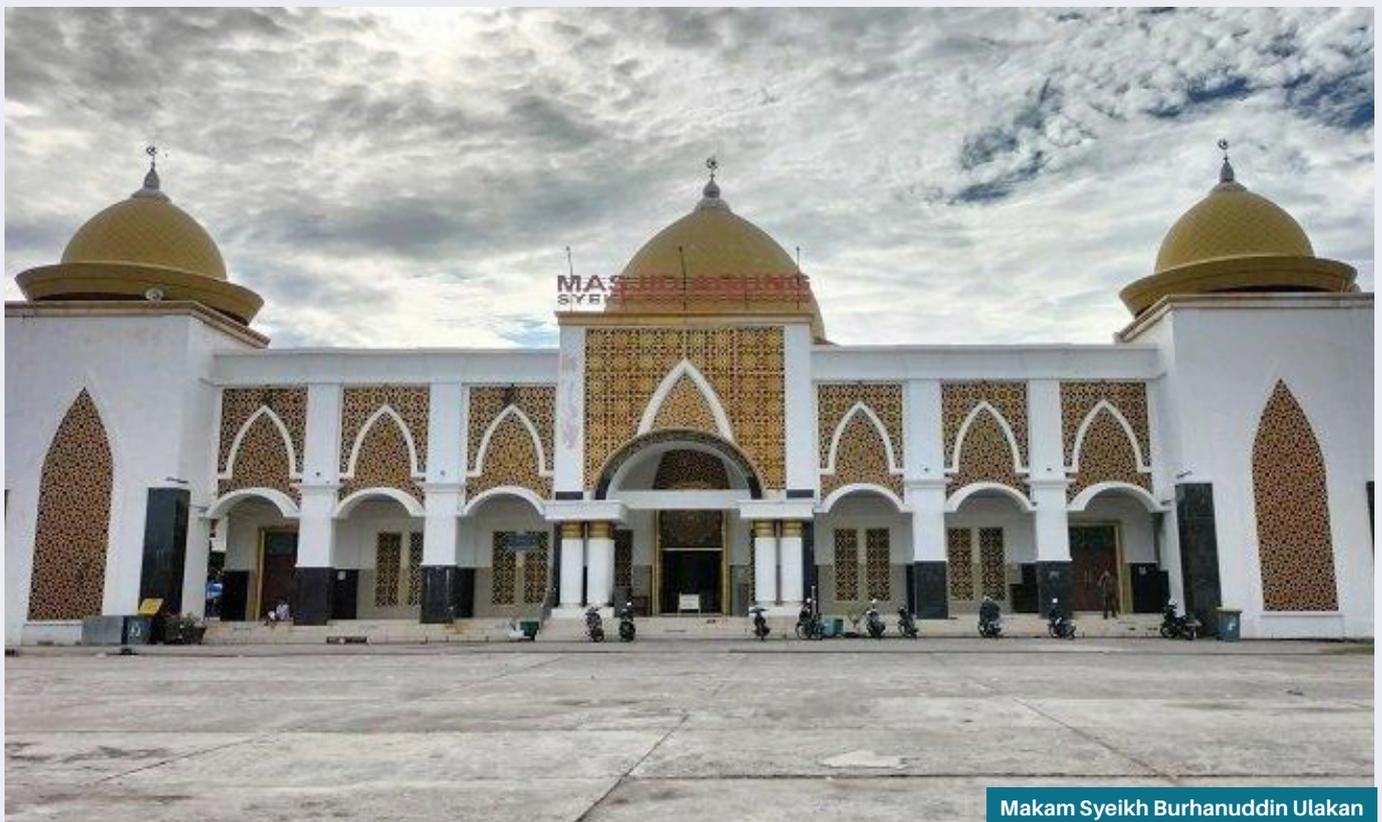
Pengembangan wisata halal di Sumatera Barat akan terus berlanjut, dan saat ini adalah momentum yang tepat karena Pemerintah Pusat melalui Kemenparekraf/Baparekraf menjadikan wisata halal sebagai salah satu program utama.

Dengan adanya dukungan penuh dari

Kemenparekraf, Sumatera Barat sangat siap menyambut wisatawan dari berbagai kalangan. Wisatawan Muslim tidak perlu lagi khawatir akan ketersediaan fasilitas ibadah dan kuliner halal di tempat wisata yang mereka kunjungi.

Dari sekian banyak tempat wisata di Sumatera Barat, sebagian besar telah menerapkan konsep wisata halal. Sebuah konsep yang selaras dengan prinsip "Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah" orang Minang.

Konsep Wisata Halal sendiri menurut Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin, adalah



Makam Syekh Burhanuddin Ulakan

konsep wisata halal pada layanan yang ditawarkan, bukan merubah objek atau tempat wisata tersebut. Halal tersebut berupa penyediaan kuliner atau makanan, ketersediaan tempat ibadah, hotel atau penginapan, serta fasilitas kesehatan yang semuanya telah memenuhi standar kehalalan.

Wisata Halal di Sumatera Barat, hampir semuanya menyediakan kemudahan untuk beribadah dan kuliner halal bagi warga Muslim. Jadi tidak heran jika wisata religi bernuansa Islami di Sumatera, gudangnya ya di Tanah Minang ini. Perjalanan wisata religi di Sumatera Barat tak akan membosankan.

Destinasi wisata halal di kawasan Sumatera Barat menyuguhkan tradisi Minangkabau dan Islam yang telah berbaur sejak berabad silam.

Berikut 12 Destinasi Wisata Halal di Sumatera Barat:

1. Makam Syeikh Burhanuddin Ulakan

Syeikh Burhanuddin Ulakan merupakan salah satu ulama, penyebar agama Islam di Sumatera Barat. Ulama yang berasal dari Pariaman ini, meninggal pada tahun 1704 dan dimakamkan di dekat Surau Gadang Syeikh Burhanudin di Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman. Tradisi setempat, ziarah ke makam Syeikh Burhanuddin ini disebut Basapa atau Bersafar, yang dilakukan setiap tanggal 10 Safar.

2. Masjid Raya Sumatera Barat

Masjid Raya Sumatera Barat di Padang adalah masjid terbesar di provinsi Sumatera Barat. Masjid yang terletak di jantung kota Padang ini, memiliki arsitektur rumah Bagonjong gaya Minangkabau dan teknologi modern.

Masjid seluas 4.430 meter persegi ini sangat megah dengan ukiran kaligrafi, mihrab masjid yang menyerupai Hajar Aswad dan tahanan gempa hingga 10 SR. Untuk melihat keindahan dan keunikan Masjid Raya Sumatera Barat, tak perlu membayar alias gratis, hanya saja pengunjung diminta untuk mengisi kotak infaq jariah seikhlasnya.

3. Miniatur Mekkah

Miniatur Mekkah berada di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Padang. Miniatur Mekkah ini biasanya digunakan untuk manasik haji dan untuk beribadah, dibangun pada 13 Desember 2000 serta mulai beroperasi sejak 8 September 2001.

Yang menjadikan tempat tersebut luar biasa adalah karena memiliki pemandangan alam yang asri. Di sekitar tempat wisata religi tersebut, juga terdapat pemandan-

gan hijau perbukitan dan hawanya sangat sejuk.

4. Pantai Padang

Terletak di kawasan perkotaan, tepatnya di Kecamatan Padang Barat, Pnatai Padang dikenal dengan sebutan Taplau (Tapi Lauik) yang artinya tepi laut.

Pantai ini memiliki garis pantai yang panjang dan tulisan ikonik "Padang Kota Tercinta" di salah satu sisinya. Dari Bandar

Udara Internasional Minangkabau, hanya perlu menempuh jarak 23 km atau 30 menit perjalanan dengan menggunakan mobil untuk sampai di pantai ini.

Bagi pencinta kuliner, juga terdapat beragam makanan tradisional yang dapat dinikmati di sepanjang Pantai Padang ini. Beberapa di antaranya adalah lontong pical, jagung bakar, rujak, sate, dan ikan laut segar, hasil tangkapan nelayan setempat. Saat di pantai ini, jangan lupa untuk berfo-



Masjid Raya Sumatera Barat



Miniatur Mekkah



Pantai Padang

to di monumen bertuliskan "Kota Padang" yang menjadi favorit wisatawan.

5. Pantai Air Manis

Selain menjadi favorit wisatawan lokal, Pantai Air Manis juga menjadi destinasi favorit bagi wisatawan mancanegara. Daya tarik pantai ini adalah gelombang ombak yang rendah dengan latar pemandangan indah Gunung Padang. Selain itu, di sekitar Pantai, juga terdapat pulau kecil bernama

Pisang Kecil dengan luas satu hektar yang bisa ditelusuri dengan berjalan kaki.

Obyek lainnya yang tidak boleh kalah cantiknya adalah di pantai ini terdapat patung batu Malin Kundang. Dalam legenda masyarakat setempat, batu tersebut dipercaya sebagai sosok Malin Kundang, yang menyerupai anak laki-laki bersujud menghadap ke tanah karena dikutuk oleh ibunya.

Tak jauh dari patung tersebut, juga bisa dijumpai batu-batu berserakan yang di-

yakini sebagai pecahan kapal Malin Kundang.

6. Jam Gadang

Salah satu objek wisata di Padang yang paling terkenal adalah Jam Gadang. Lokasi wisata di kota Padang ini, bisa ditemukan di Bukit Tinggi. Ikon dari Sumatera Barat ini adalah peninggalan jaman penjajahan Belanda.

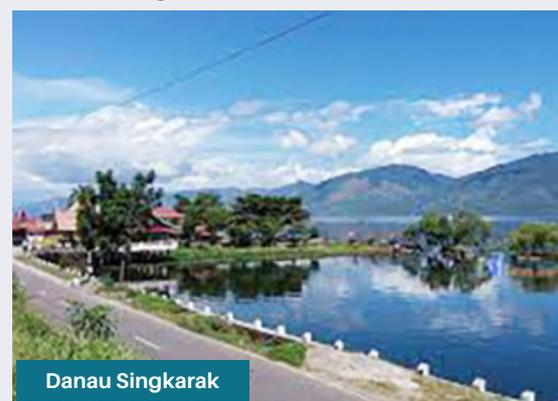
Objek wisata di Padang ini memiliki nilai histori yang tinggi. Jam Gadang mempunyai keunikan tersendiri. Angka yang ada di Jam Gadang menggunakan angka romawi tapi simbol angka IV tertulis dengan III. Selain itu, di dekat Jam Gadang, juga bisa ditemukan tempat wisata lain yang tak kalah menariknya.

7. Museum Adityawarman

Berlokasi di Jalan Diponegoro no.10, Kota Padang ini, Museum Adityawarman mulai dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan pada 16 Maret 1977. Pada tahun 1979 museum tersebut diberi nama "Adityawarman". Nama tersebut diambil dari nama seorang Raja besar yang pernah berkuasa di Minangkabau, sezaman dengan Kerajaan Majapahit pada era Patih Gajah Mada.

Museum Adityawarman merupakan museum budaya terpenting di Sumatera Barat. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau, cagar budaya Mentawai, dan cagar budaya Nusantara.

8. Danau Singkarak



Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok sangat terkenal. Danau terluas kedua di Pulau Sumatera ini, juga mempunyai sejarah panjang dan keindahan yang tiada duanya.

Setiap tahun, Danau Singkarak menjadi destinasi wisata yang paling diminati, terutama bagi pecinta olahraga sepeda. Para



Pantai Air Manis



Jam Gadang



Museum Adityawarman

pebalap sepeda bisa mengikuti lomba Tour De Singkarak yang menunjukkan keindahan Danau Singkarak. Danau hasil proses teknotik ini, sekarang menjelma menjadi salah satu keindahan alam khas Sumatera Barat.

9. Pulau Cubadak



Pulau Cubadak

Pulau Cubadak menjadi salah satu tempat wisata di Padang yang sangat terkenal. Pulau ini menjadi surganya pecinta dunia bawah laut. Objek wisata ini sendiri dikelola investor asal Italia, berlokasi di Kawasan Mandeh, tepatnya di sisi selatan. Keindahan alam disana bisa dinikmati dengan menaiki perahu, Motor Boat, memancing, dan yang lainnya.

10. Jembatan Siti Nurbaya

Jembatan Siti Nurbaya bisa dinikmati pada sore atau malam hari. Di sini juga bisa melihat pemandangan kota Padang yang cantik dari Jembatan Siti Nurbaya ini. Selain menikmati pemandangan kota, pengunjung juga bisa berwisata kuliner. Suasana di jembatan ini tidak jauh berbeda dengan Puncak (Bogor Jawa Barat), yang penuh dengan warung yang menjajakan jagung bakar.

11. Istana Basa Pagaruyung

Istana Basa Pagaruyung yang lebih terkenal dengan nama Istana Besar Kerajaan Pagaruyung adalah museum berupa replika istana Kerajaan Pagaruyung yang terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Istana ini berjarak lebih kurang 5 kilometer dari Batusangkar. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat.

Istana Basa yang berdiri sekarang sebenarnya adalah replika dari yang asli. Istana Basa yang asli terletak di atas bukit Batu Patah dan dibakar habis pada tahun 1804 saat terjadi Perang Padri.



Jembatan Siti Nurbaya



Istana Basa Pagaruyung



Islamic Center Padang Panjang

12. Islamic Center Padang Panjang

Kehadiran Islamic Centre melengkapi destinasi wisata religi yang menyandang predikat Kota Serambi Mekkah secara resmi sejak Maret 1999 silam dan sebagai daerah pencetak tokoh bangsa.

Islamic Center Padang Panjang merupakan sebuah kompleks tempat ibadah berupa masjid dengan arsitektur yang megah dan indah. Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang lengkap

seperti area parkir, toilet, taman yang asri dan lain-lain.

Keindahan bangunan dan suasana Islamic Center menjadi daya tarik utama masyarakat untuk berswafoto, bahkan akhir-akhir ini menjadi tempat favorit untuk melaksanakan akad nikah masyarakat Padang Panjang dan sekitarnya. Saat ini, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mencanangkan Islamic Center menjadi Icon Wisata Religi baru yang terus dibenahi. ♦



KEMENAG DAN FORUM ZAKAT SEPAKATI LIMA LANGKAH PERKUAT KOLABORASI TATA KELOLA

Kementerian Agama (Kemenag) dan Forum Zakat (FOZ) menyepakati lima langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dan harmonisasi pengelolaan zakat.

Lima langkah tersebut merupakan peningkatan kolaborasi dalam program Kampung Zakat, digitalisasi sertifikat tanah wakaf, advokasi hasil audit syariah, pelaksanaan roadshow bersama di tingkat Kabupaten/Kota untuk meningkatkan literasi zakat, dan penyediaan medium komunikasi bersama antarpimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur, menekankan akan pentingnya harmonisasi dalam pengelolaan zakat. Ia juga mengingatkan, prinsip harmoni sudah diajarkan dalam Al Quran, yang mengajak semua pihak untuk menurunkan ego sektoral demi menca-

pai kesamaan dalam kebaikan dan ketakwaan.

"Kita perlu menurunkan ego sektoral dan mengoptimalkan komunikasi untuk mencapai harmoni dan kolaborasi yang lebih baik dalam ekosistem zakat. Kolaborasi bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi juga tentang menemukan kesamaan dalam visi dan tujuan yang lebih besar," kata Waryono dalam audiensi antara Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag dengan FOZ di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Waryono juga menyoroti pentingnya optimalisasi komunikasi, termasuk pembentukan medium komunikasi khusus pimpinan LAZ. Selain itu, kolaborasi dalam

program Kampung Zakat dan advokasi hasil audit syariah, juga menjadi langkah untuk memperbaiki dan merekonsiliasi pengelolaan zakat.

Selain itu, dibahas pula digitalisasi sertifikat tanah wakaf, pengembangan program pembangunan rumah susun di Universitas Darussalam (UNIDA), dan penataan data aset wakaf.

Waryono menekankan, integrasi data dalam tata kelola zakat dan kolaborasi berbasis data sangat penting. Ia menggarisbawahi pentingnya pengawasan, pengendalian, dan audit untuk memastikan hak muzaki dan mustahik terpenuhi.

"Audit menjadi alat penting untuk memastikan bahwa hak muzaki dan mustahik



terpenuhi dengan baik," tambah Waryono.

Sementara itu, Ketua Umum FOZ, Wildhan Dewayana, juga menekankan bahwa harmoni adalah tema utama dalam kepengurusan baru FOZ. Tantangan terbesar dalam pengelolaan zakat, menurutnya, adalah mengatasi ego sektoral dan meningkatkan komunikasi antarlembaga.

Wildhan menambahkan, audit internal harus dilihat sebagai bagian dari proses perbaikan yang berkelanjutan, bukan sebagai momok.

"Teknologi juga akan dikolaborasi dalam proses audit untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Audit kemudian menjadi alat penting untuk memastikan bahwa hak muzaki dan mustahik terpenuhi dengan baik," kata Wildhan Dewayana.

Kembangkan Kampung Zakat di Jabar dan DIY, Kemenag, ZIS Indosat, dan Rumah Zakat Teken MoU

Dalam rangka pengembangan Kampung Zakat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan Gunung Kidul, DI Yogyakarta, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama (Kemenag), Waryono Abdul Ghafur, CEO ZIS Indosat, Wakhid

Effendi; dan CEO Rumah Zakat, Irvan Nugraha menandatangani Memorandum of Understanding (MoU).

Penandatanganan dilakukan di sela-sela kegiatan Talkshow Zuhur di Masjid Nurul Taqwa Indosat, Jakarta, Rabu (28/8/2024), yang disaksikan langsung oleh 50 peserta.

Waryono mengatakan, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan



MoU ini merupakan komitmen bersama dalam menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya mustahik di dua wilayah tersebut.

menggandeng berbagai pihak.

"MoU ini merupakan komitmen bersama dalam menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya mustahik di dua wilayah tersebut," kata Waryono di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Waryono menjelaskan, Kampung Zakat merupakan salah satu program sinergi antara Ditjen Bimas Islam Kemenag dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebagai upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi umat di berbagai daerah, termasuk wilayah 3T.

Menurut Waryono, kebaikan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga sosial harus diiringi dengan keikhlasan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Kebaikan tanpa batas, lanjut Waryono, adalah memberi kebaikan tanpa syarat, mengulurkan tangan tanpa pamrih, dan selalu mendoakan kebaikan bagi orang lain, termasuk bagi mereka yang berzakat (muzaki). Tak hanya itu, kebaikan tersebut harus berlanjut dan memberi dampak positif bagi masyarakat luas.

"Dalam Islam, ada istilah 'hasanah' 'khair', 'makruf', dan 'birru', yang semuanya

mencerminkan kebaikan dari berbagai perspektif,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Waryono mengatakan, kebaikan yang dilakukan bersama-sama akan memperkuat solidaritas dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Sedangkan CEO ZIS Indosat, Wakhid Effendi, mengungkapkan pentingnya sinergi dalam menyalurkan dana zakat.

“ZIS Indosat telah menunaikan zakat dengan baik sejak tahun 2015 hingga 2024, dan kini disempurnakan dengan adanya izin untuk mengelola dana ini dalam program-program yang berman-

mendatang. Program ini menjadi salah satu dari berbagai inisiatif sosial yang digagas oleh ZIS Indosat.

Sementara CEO Rumah Zakat, Irvan Nugraha, menyampaikan, bahwa LAZ Rumah Zakat saat ini tengah mengembangkan program Badan Usaha Milik Masyarakat BUMMas, sebuah program pemberdayaan berbasis desa.

“Setiap intervensi program mampu mengubah desa tertinggal menjadi desa berkembang, serta mendorong kesejahteraan yang berkelanjutan,” kata Irvan Nugraha.

Surabaya, dan angkatan 2 yang dilaksanakan pada 26 - 28 Agustus 2024 di Jakarta, Yogyakarta, dan Bangka Belitung.

PISA adalah suatu studi internasional di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). PISA mengukur kemampuan siswa usia 15 tahun dalam menggunakan pengetahuan dan kecakapannya untuk memecahkan permasalahan kehidupan nyata.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Asrijanty, mengungkapkan bahwa PISA 2025 ada tiga domain utama yang diuji, yaitu: literasi membaca, matematika, dan



faat,” kata Wakhid Effendi.

Wakhid menambahkan, saat ini, ZIS Indosat telah mengelola 38 titik wilayah binaan di berbagai daerah, yang merupakan bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Penandatanganan MoU ini juga mencakup realisasi ambulans pesisir di Dusun Bondan, Cilacap. Ambulans ini diharapkan dapat mempercepat respons darurat di wilayah pesisir, yang seringkali sulit dijangkau,” tambahnya.

Selain itu, Wakhid juga mengumumkan rencana peluncuran program ‘Gigi Sehat untuk Anak’ yang akan dimulai Jumat

Kemenag dan Kemendikbudristek Bersinergi Persiapkan PISA 2025

Untuk mempersiapkan pelaksanaan programme for International Student Assessment (PISA) 2025, Kementerian Agama (Kemenag) menjalin sinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Dalam rangka persiapan pelaksanaan PISA 2025, Kemendikbudristek menyelenggarakan sosialisasi main survey PISA 2025 yang terbagi menjadi 2 angkatan. Yaitu angkatan 1 dilaksanakan pada 22-24 Agustus 2024 di Jakarta dan di

sains. Selain itu, ada satu domain inovatif, yaitu: pembelajaran dalam dunia digital (learning in digital world). PISA 2025 merupakan studi PISA yang ke-9, sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2000.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Anindito Aditomo, menyatakan bahwa persiapan pelaksanaan main survey PISA 2025 dimaksudkan agar nantinya pelaksanaan berjalan lancar dan tidak ada kendala teknis.

“Persiapan dilakukan dengan menyiapkan data murid, mendata dan menyiapkan infrastruktur, dan melakukan simulasi aplikasi PISA,” kata Anindito Aditomo.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Muhammad Sidik Sisdiyanto, menyatakan bahwa Kemenag akan mendukung PISA 2025 dan akan memberikan treatment untuk Madrasah sasaran PISA 2025.

"Kami akan mendukung 75 Madrasah yang terpilih menjadi sampel PISA 2025 dari 421 jumlah seluruh Sekolah dan Madrasah yang terpilih menjadi sasaran PISA 2025," kata M Sidik Sisdiyanto.

Doktor Manajemen Pendidikan ini, menambahkan bahwa PISA ini merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan mewujudkan generasi emas di masa yang akan datang.

"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan persiapan PISA 2025 sebagai tugas mulia. Mari kita bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi, demi masa depan pendidikan yang lebih baik," pungkasnya.

HUT RI ke 79, Menag Pimpin Doa Apel Kehormatan dan Renungan Suci di IKN

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Menteri Agama (Menag) Yaquut Cholil Qoumas didaulat memimpin pembacaan doa pada Apel Kehormatan dan Renungan Suci yang digelar untuk pertama kalinya di Memorial Park, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Diawali dengan Basmalah, Menag melangitkan harapan agar Tuhan merahmati para pejuang bangsa dan memberikan ampunan.

"Anugerahi kami jalan keteladanan. Kuatkah hati dan langkah kami meraih kejayaan. Agar tak sia-sia air mata dan pengorbanan. Agar tak durhaka generasi kami yang hanya melanjutkan," demikian doa yang dipanjatkan Menag Yaquut Cholil Qoumas, di Penajam Paser Utara, Sabtu (17/8/2024) dini hari.

"Ya Allah, Tuhan yang memuliakan para pahlawan. Tuntunlah kami menuju masa depan terang penuh harapan. Mewujudkan cita-cita para syuhada pembela kebenaran. Bangsa merdeka yang makmur dan berkeadilan," se bait doa yang dipanjatkan Menag.

Apel Kehormatan dan Renungan Suci dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Renungan suci ini dihadiri pula oleh para pimpinan lembaga negara dan jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Selain Apel Kehormatan dan Renungan Suci, pada peringatan HUT RI tahun

ini, juga untuk pertama kalinya upacara detik-detik Proklamasi dilangsungkan di IKN, Kalimantan Timur. Menag juga akan didaulat untuk membacakan doa pada upacara yang dijadwalkan berlangsung

Joko Widodo ini, Menag berdoa agar cita-cita Nusantara Baru Indonesia Maju dapat terwujud tanpa rintangan.

"Bimbing dan pandu kami melewati masa-masa peralihan ini, agar bisa berger-



pada pukul 10.00 WIB, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Menag Doakan Nusantara Baru Indonesia Maju Terwujud

Sementara itu, pada upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia, yang digelar perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Menag Yaquut Cholil Qoumas juga didaulat untuk membacakan doa.

Dalam upacara yang dipimpin Presiden

ak menuju kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan, menyatukan segala gerak langkah, dan tekad dalam mewujudkan Nusantara Baru Indonesia Maju tanpa rintangan, " kata Menag Yaquut di IKN, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024).

Hadir pula dalam acara tersebut, Ibu Iriana Jokowi, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan Lembaga Tinggi Negara, serta perwakilan duta besar negara sahabat. ♦



GERINDRA USUNG JOHN WEMPI WETIPO JADI CAGUB PAPUA TENGAH, BERKOMITMEN SELESAIKAN KONFLIK

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), secara resmi mengusung John Wempi Wetipo dan Ausilius You sebagai pasangan calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) Papua Tengah.

Surat rekomendasi tersebut, diserahkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani kepada John Wempi Wetipo dan Ausilius, di Kantor DPP Partai Gerindra, di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Di hadapan awak media, John Wempi Wetipo, menegaskan komitmennya dalam membangun Provinsi Papua Tengah, salah satunya menyelesaikan konflik di daerah tersebut.

"Kami sudah petakan untuk penanaman," ujar John Wempi Wetipo, di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

John Wempi berharap, dengan dukungan semua pihak, nantinya dapat mengawal pemerintahan yang lebih baik.

Selain itu, John Wempi juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang

telah memberikan kepercayaan kepada dirinya dan Ausilius You, untuk ikut berkontestasi pada Pilkada Serentak 2024.

John Wempi berkomitmen, untuk menjalankan amanah tersebut dengan baik, bersama masyarakat Provinsi Papua Tengah.

"Semoga dengan pertolongan Tuhan, [kepercayaan yang diberikan] bisa kita lakukan dengan baik," tandasnya.

John Wempi Wetipo sendiri tiba di Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Jakarta pada Jumat (23/8/2024).

Kedatangan John Wempi Wetipo disambut meriah tarian adat Papua, hingga menciptakan suasana yang kental dengan nuansa budaya dan semangat persatuan.

Para penari dengan pakaian adat, mengiringi langkah John Wempi Wetipo,



yang juga mengenakan ikat kepala khas Papua, saat memasuki Kantor DPP Gerindra. Ia juga disambut antusias oleh para pendukung dan pengurus partai Gerindra.

Kedatangan John Wempi ini, untuk menerima rekomendasi dari Partai Gerindra sebagai calon Gubernur Papua Tengah pada Pilkada Serentak 2024.

Rekomendasi ini, menjadi tanda dukungan penuh dari Partai Gerindra, terhadap pencalonan John Wempi yang dinilai sebagai kandidat yang tepat untuk memimpin Papua Tengah.

Keputusan rekomendasi tersebut, diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani kepada John Wempi. Selain itu, Gerindra juga merekomendasikan Ausilius You sebagai calon Wakil Gubernur Papua Tengah, mendampingi John Wempi.

Dalam kesempatan tersebut, Ausilius You, juga hadir mendampingi John Wempi. Usai menerima rekomendasi, John Wempi mengungkapkan, rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum Partai Gerindra.

Ia berharap, dengan restu dari Tuhan,

amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik.

"Melalui rakyat yang ada di Papua Tengah, kita akan memegang teguh amanah yang diberikan pada hari ini, semoga dengan pertolongan Tuhan bisa kita lakukan dengan baik," kata John Wempi Wetipo, di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga berpesanan kepada para calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung, agar dapat berjuang dalam Pilkada 2024.

Pihaknya meminta dengan hormat kepada seluruh struktur pengurus partai di daerah, untuk membantu calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung.

"Doa kami menyertai, semangat Prabowo menyertai," kata Ahmad Muzani.

Saat akan meninggalkan Kantor DPP Gerindra, John Wempi kembali disambut dan diantarkan dengan tarian khas Papua. John Wempi juga ikut menari, yang diiringi alat musik yang dimainkan para penari.

Sebagai informasi, John Wempi Wetipo adalah orang asli Papua, yang memiliki pengalaman panjang di dunia pemerintahan.

Saat ini, John Wempi menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), yang salah satunya bertugas mengawal pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

Sebelumnya, John Wempi menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang juga salah satunya, fokus mengawal pembangunan infrastruktur di Papua.

Wamendagri Dampingi Menhan Prabowo Kunjungan Kerja ke Australia dan PNG

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, dalam kunjungan kerja (kunker) ke Australia dan Papua New Guinea (PNG).

Menhan Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Angkatan Udara RAAF Base Fairbairn, Canberra, pada Senin (19/8/2024) pukul 19.04 waktu setempat.

John Wempi menyambut kedatangan Prabowo di Hyatt Hotel, Canberra. Selain John Wempi, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid dan Direktur Jenderal (Dirjen) Strahan Kemhan, Mayjen TNI Ujang Dar-

wis, serta sejumlah pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra, juga turut menyambut kedatangan Prabowo di hotel tersebut.

Sebelumnya, saat tiba di Pangkalan Angkatan Udara RAAF Base Fairbairn, Canberra, Prabowo disambut sejumlah pejabat pemerintah Australia. Mereka di antaranya, Minister for Defence Industry and Capability Australia Pat Conroy MP dan Chief of the Defence Force, Admiral David Johnston.

Turut menyambut Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia, Penny Williams; Dubes Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono; Athan Australia di Jakarta, BG Matt Campbell, dan Athan RI di Canberra, Laksma TNI Yusliandi Ginting beserta jajaran.

integritas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh jajaran terkait. Hal tersebut ditekankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Konsolidasi Nasional dalam Rangka Kesiapan Pilkada 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Menurut Mendagri, konsolidasi internal dan netralitas dalam menjalankan tugas, merupakan hal penting untuk menjaga kredibilitas Pilkada dan mencegah timbulnya konflik.

"Yang pertama jelas adalah konsolidasi, supaya KPU seluruh Indonesia satu visi, solid dalam menjalankan tugas kenegaraan ini," kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

semua petugas bekerja dengan jujur dan adil.

Mendagri mengingatkan, pentingnya mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang melanggar aturan, tapi harus tetap sesuai situasi dan kondisi lapangan.

"Itulah saya mohon, dari KPU mohon secara internal memiliki mekanisme kontrol yang tegas untuk menyangkut masalah netralitas ini," ungkap Mendagri.

Di lain sisi, Mendagri menegaskan, suksesnya Pilkada tak hanya bergantung pada KPU, tapi juga semua pihak. Karenanya, dibutuhkan kontribusi dari banyak pihak sesuai tugas dan perannya masing-masing.

Tak lupa, Mendagri juga mengingatkan KPU dan pihak penyelenggara lain-



Selama kunker tersebut, Menhan Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, serta Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Richard Marles.

Adapun kunker Prabowo ke PNG ini, dijadwalkan akan berlangsung keesokan harinya setelah dari Australia.

Mendagri Tekankan Kesatuan Visi dan Integritas KPU sebagai Kunci Keberhasilan Pilkada 2024

Keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, sangat bergantung pada kesatuan visi dan

Menurut Mendagri menyamakan persepsi dan visi di antara petugas yang terlibat tidaklah mudah. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya bimbingan teknis yang kuat dan menyeluruh, untuk memastikan semua petugas memahami aturan dan teknis Pilkada.

"Mulai ketidaknetralan terjadi, ya. Mulai masalah, bisa dua, satu, tidak tahu aturan teknis, makanya perlu adanya bimbingan teknis," tambah Mendagri.

Selain itu, Mendagri juga menyarankan, agar KPU memiliki mekanisme kontrol internal yang kuat dan tegas untuk menjaga netralitas, dan juga memastikan

nya, untuk selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan, seperti TNI dan Polri.

Ini termasuk saat mengambil keputusan yang sensitif atau berpotensi memicu konflik, sehingga bisa diantisipasi.

"Jangan sampai membuat keputusan, aparat keamanannya enggak tahu, sudah meledak duluan, setelah itu kemudian baru [kasih tahu] aparat keamanan, berat sekali harus untuk menyelesaikannya, padahal sebetulnya bisa dicegah," pesannya.

Mendagri juga menjelaskan, bahwa tugas utama pemerintah adalah menyediakan anggaran Pilkada. Pihaknya terus

memastikan pemerintah daerah (Pemda), agar segera memenuhi pembiayaan tersebut.

Ia juga telah mengingatkan Pemda untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara, termasuk distribusi logistik.

Mendagri juga mengimbau Pemda untuk membantu penyelenggara Pilkada memverifikasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

"Nah, yang perlu kita (pemerintah) lakukan kami membantu KPUD, KPUD melakukan validasi, verifikasi di lapangan, orangnya ada enggak, dan lain-lain, apakah dia pindah, sudah jadi anggota TNI, Polri, pindah alamat, kemudian ada yang meninggal, dan lain-lain," jelas Mendagri.

Mendagri berharap, seluruh proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar.

"Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, meskipun ini pengalaman pertama bagi kita," harap Mendagri.

- 7 Elemen Pendukung Keberhasilan Pilkada

Dalam rapat tersebut, Mendagri juga menekankan sinergi tujuh elemen pendukung keberhasilan Pilkada Serentak 2024. Tujuh elemen pendukung Pilkada tersebut adalah penyelenggara (KPU, Bawaslu, DKPP), pengawas (Bawaslu, DKPP, lembaga non-Bawaslu), pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan (TNI/Polri, Satpol PP, Satlinmas), partai politik (Parpol) dan pasangan calon (Paslon), media/pers, serta masyarakat.

"[Election] itu adalah orkestra dari berbagai elemen yang bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dengan baik, itu yang selalu saya sampaikan," kata Mendagri.

Mendagri menambahkan, setidaknya ada 7 elemen, penyelenggara sendiri yaitu KPU, kemudian pengawas baik yang formal Bawaslu, DKPP, juga ada lembaga-lembaga yang mengawasi di luar formal, NGO, dan lain-lain.

Mendagri juga mengungkapkan, tentang peran penting KPU dan KPU Daerah (KPUD). Peran yang paling utama yaitu mampu membuat perencanaan dan aturan untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada secara demokratis, jujur, adil, dan transparan.

Menurut Mendagri, peran penyelenggara Pemilu dalam merencanakan, mengeksekusi, dan melaksanakan tersebut mudah diucapkan, tetapi sukar dilaksanakan. Atas kerja-kerja yang selama ini dilakukan, Mendagri memberikan apre-

siasi kepada KPU dan KPUD.

"Paling penting sekali dari 7 itu adalah peran dari penyelenggara, KPU dan KPUD," imbuhnya.

Mendagri mengatakan, bahwa pada zaman Orde Baru, penyelenggaranya adalah pemerintah, namun setelah reformasi Kemendagri yang menyelenggarakan.

"Dan kemudian setelah ada reformasi dibuat adanya penyelenggara sendiri, terpisah dari pemerintah, yaitu Komisi Pemilihan Umum, yang memiliki jajaran

berpotensi konflik kepada aparat keamanan, sebelum masalah meluas dan menimbulkan kegaduhan.

Hal itu dilakukan, agar masalah tersebut bisa diantisipasi melalui kerja sama dengan pihak terkait, termasuk aparat keamanan.

"Jangan sampai membuat keputusan, aparat keamanannya tidak tahu, sudah meledak duluan, setelah itu kemudian baru [kasih tahu] aparat keamanan, berat sekali harus untuk menyelesaikannya. Padahal sebetulnya bisa dicegah," pung-



sampai ke bawah," jelas Mendagri.

Mendagri menekankan agar petugas KPUD mampu menjaga netralitas, terutama di daerah-daerah rawan.

"Saya mohon dari KPU, mohon secara internal memiliki mekanisme kontrol yang tegas, untuk menyangkut masalah netralitas ini dan juga Bawaslu jangan segan-segan untuk mengambil tindakan termasuk DKPP," tekan Mendagri.

Mendagri berharap, Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan dengan baik. Ia pun berpesan kepada petugas KPUD, untuk segera melaporkan masalah sensitif dan

kas Mendagri.

Sebagai informasi, Rapat Konsolidasi ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Hadi Tjahjanto; Ketua KPU, Mochammad Affudin; Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja; dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, serta pejabat terkait lainnya. ♦

Buka Muslim LifeFest 2024

MENDAG ZULKIFLI HASAN: KITA FOKUS MAJUKAN EKONOMI UMAT

Kementerian Perdagangan mendukung penyelenggaraan Muslim LifeFest 2024 yang diselenggarakan pada 30 Agustus - 1 September 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, mengimbau masyarakat muslim Indonesia untuk turut memajukan bidang ekonomi, pendidikan, dan makanan halal.

Hla tersebut disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat membuka dan memberi sambutan di acara Muslim LifeFest, di BSD Tangerang, Jumat (30/8/2024). Muslim LifeFest 2024 diselenggarakan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI).

"Kegiatan seperti ini perlu kita lakukan lebih sering, agar Masyarakat muslim bisa mengembangkan diri lebih baik di bidang ekonomi, pendidikan, dan makanan halal. Kita geser pertenggaran menjadi energi untuk memajukan bidang makanan halal, ekonomi, kewirausahaan, mode, kemudian pendidikan. Kita fokus pada cara mengembangkan ekonomi umat, baik melalui pendidikan, ekonomi, maupun bidang halal," kata Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan mengapresiasi KPMI yang telah menyelenggarakan Muslim LifeFest 2024. Ia juga mengatakan, akan mendukung penuh KPMI dalam mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia.

"Saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPMI yang konsisten mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia melalui kegiatan ini. Kita harus produktif dan berkembang. Kita harus menguasai pasar lokal dan pasar dunia. Saya gembira dan dukung penuh yang dilakukan oleh KPMI," ungkap Mendag.

Mendag juga berharap, Muslim LifeFest 2024 dapat memaksimalkan potensi besar

industri halal dan ekonomi syariah di Indonesia. Menurutnya, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pelopor dalam industri halal dan ekonomi syariah.

Untuk itu, kata Mendag, pemerintah telah berupaya mendukung dan memperkuat ekspor produk halal. Upaya yang pertama adalah dengan melakukan diplomasi perdagangan yang dapat memperkuat 'toll way' kerja sama perdagangan.

Caranya adalah melalui perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara mitra.

Menurut Mendag, perjanjian perdagangan berperan bagi

produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa tembus ke pasar dunia, membuka akses pasar fesyen muslim, dan mengoptimalkan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) bagi produk halal unggulan.

Lebih lanjut, Mendag mengungkapkan, Kemendag bersama Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama untuk Negara Arab di Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah meluncurkan perundingan Indonesia - Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement (I-GCC FTA) pada 31 Juli 2024.

"Pemerintah optimistis kerja sama ini akan meningkatkan pasar ekspor Indonesia ke seluruh negara anggota GCC," ungkap Mendag Zulkifli Hasan.

Upaya kedua, yaitu melalui promosi perdagangan. Fokus dengan memperhatikan peluang ekspor di negara-negara non-tradisional, termasuk dengan menggelar penajakan bisnis (business matching), pameran, dan promosi digital.

Upaya yang ketiga adalah perlindungan perdagangan dalam negeri melalui penerapan bea masuk tindakan pengamanan dan bea masuk, serta Upaya terbaru melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.

Terkait promosi, tahun ini Kemendag akan kembali menyelenggarakan dua pameran besar yang akan dikunjungi ribuan pembeli dari pasar domestik maupun internasional,



yaitu Trade Expo Indonesia (TEI) dan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW).

Kedua pameran ini akan diselenggarakan serempak pada 9-12 Oktober 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Pameran-pameran tersebut akan menampilkan produk ekspor unggulan Indonesia, termasuk produk halal. Di kedua pameran tersebut, pelaku usaha dapat mengikuti beragam seminar dan fasilitas business matching akan menghubungkan pelaku usaha dengan para importir dari berbagai negara.

Mendag Zulkifli Hasan juga mengajak anggota KPMI untuk mengikuti TEI dan JMFW 2024.

"Untuk itu, pada kesempatan ini, saya

Kamis (29/8/2024).

"Menghadapi tantangan dan peluang yang ada, Kementerian Perdagangan telah melakukan sejumlah langkah baik secara diplomasi, maupun dalam bentuk kebijakan," kata Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag menambahkan, untuk perdagangan luar negeri, pemerintah melaksanakan langkah diplomasi, agar hambatan perdagangan dengan negara mitra segera diselesaikan.

Menurutnya, pemerintah melakukan diplomasi agar hambatan perdagangan bisa diselesaikan dengan baik.

"Selain itu, Indonesia saat ini berperan aktif di berbagai fora perdagangan in-

datangani Protokol Perubahan Perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (EPA) serta meluncurkan perundingan Indonesia-Gulf Cooperation Council (GCC) Free Trade Agreement.

Indonesia juga memiliki beberapa prioritas perundingan yang dijadwalkan selesai pada tahun ini, seperti Indonesia-European Union (EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia-Canada CEPA, dan Indonesia-Peru CEPA. Indonesia juga tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), salah satu perjanjian perdagangan terbesar, melibatkan 10 negara anggota ASEAN dan lima negara mitra ASEAN mencakup 29



ingin mengundang Saudara sekalian untuk hadir di TEI dan JMFW agar dapat memperluas jaringan dan menjadi bagian dari tumbuhnya industri halal Indonesia," tutur Mendag Zulkifli Hasan.

Perkuat Perdagangan Luar Negeri, Kemendag Siapkan Langkah Hadapi Hambatan

Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai langkah strategis dalam menghadapi hambatan-hambatan di sektor perdagangan luar negeri.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan dalam acara Trade Corner Special Dialogue CNBC Indonesia 'Strategi dan Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga Tantangan di WTO', di Jakarta, hari ini,

ternasional untuk meningkatkan nilai ekspor dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi nasional," imbuh Mendag.

Mendag juga menjelaskan, Indonesia telah menyelesaikan perjanjian dagang dengan 26 negara/ekonomi dan 45 negara yang masih dalam proses perundingan. Mitra dagang utama Indonesia juga bergeser dari negara G7 ke negara berkembang (Tiongkok, India, Pakistan, Bangladesh, Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, Nigeria, Arab Saudi, Vietnam, dan Filipina).

Pergeseran ini didorong oleh pembaruan modal, teknologi, dan rantai pasok dari negara non-G7 seperti Tiongkok, serta kebijakan unilateral Uni Eropa yang menghambat laju perdagangan.

Saat ini, Indonesia baru saja menan-

persen populasi dunia, 27 persen perdagangan dunia, 30 persen produk domestik bruto (PDB) dunia, dan 29,8 persen foreign direct investment (FDI) dunia.

Langkah lainnya adalah memperluas ekspor ke pasar nontradisional (Asia Selatan dan Tengah, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur).

"Indonesia harus memperluas pasar nontradisional. Kita harus dapat memanfaatkan perkembangan pasar potensial, salah satunya di kawasan ASEAN karena kita sudah mempunyai standar yang sama. Asia selatan juga patut dikembangkan. Surplus terbesar salah satunya dari India yang merupakan pasar yang sangat besar. Begitu juga pasar potensial di Timur Tengah dan Afrika," pungkas Mendag Zulkifli Hasan. ♦

RESMIKAN GEDUNG BARU RS DHARMAIS

Presiden Jokowi : Serasa di Hotel Bintang Lima

Didampingi Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menko PMK, Muhadjir Effendi; dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan gedung Pelayanan Kanker Ibu dan Anak RS Kanker Dharmais, Jakarta. Gedung baru ini dihadirkan dengan desain modern dan dilengkapi peralatan super canggih untuk membantu proses penyembuhan pasien.

Pembangunan Gedung Pelayanan Kanker Ibu dan Anak RS Kanker Dharmais merupakan bagian dari program peningkatan kualitas layanan kanker di Indonesia.

Program ini mencakup digitalisasi sistem rumah sakit, pembentukan pusat registrasi kanker nasional, modernisasi infrastruktur dan peralatan kesehatan, percepatan program pendidikan terkait kanker, pengembangan pusat keunggulan, serta penerapan pelayanan berbasis penelitian dalam bidang Cancer Precision Medicine.

Gedung dengan luas 37.918 m² yang mengusung konsep Smart and Green Hospital ini, dilengkapi dengan alat canggih seperti Tomotherapy technology radiation therapy, virtual bronchoscopic navigation, intraoperative radiotherapy, surgical microscope, dan hyperthermia pump. Selain itu, tersedia juga layanan rawat jalan berupa poliklinik Center of Ex-

cellence cervix, breast, smoke-related, dan pediatric.

Gedung yang terdiri dari 18 lantai dan 3 basement ini, dilengkapi dengan 100 tempat tidur rawat inap, 25 tempat tidur ruang isolasi, 4 ruang operasi, 1 ruang operasi hybrid, serta 23 ruang rawat intensif meliputi Intensive Care Unit (ICU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Post Anesthesia Care Unit (PACU), dan High Care Unit (HCU).

"Tadi saya masuk ke gedung baru Rumah Sakit Dharmais serasa masuk ke hotel bintang 5. Bangunannya rapi, desainnya bagus," kata Presiden Jokowi, Jumat (30/8/2024).

Gedung baru ini dibangun sejak 2022 dengan dukungan dana dari Islamic Development Bank (IsDB) melalui proyek Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Unit Teknis Vertikal.

Anggaran yang dihabiskan untuk Pembangunan Gedung tersebut, juga tidak



kecil. Jokowi merinci, bahwa anggaran untuk gedung menghabiskan sebesar Rp. 427 Miliar, peralatan rumah sakit mencapai Rp.313 Miliar, dan SDM Rp.37 Miliar.

Pendanaan ini bertujuan menyediakan layanan terbaik untuk mencapai standar internasional dan mendukung tujuan Indonesia Emas 2045.

"Pemerintah berinvestasi mengeluarkan anggaran tidak ada masalah asalkan anggaran itu betul-betul tepat sasaran, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pelayanan Kesehatan, terutama kanker bagi ibu dan anak-anak," tambah Presiden.

Tidak hanya RS Kanker Dharmais, Jokowi juga mengapresiasi pembangunan rumah sakit lain, yang pembiayaannya dibantu IsDB, seperti RS Sardjito Yogyakarta dan RS Hasan Sadikin Bandung, yang desainnya mirip hotel bintang 5.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bahwa RS Kanker Dharmais merupakan rumah sakit ketiga dari 12 rumah sakit yang dibangun oleh Kemenkes sejak awal 2022.

Ada enam RS yang pembiayaannya dibantu IsDB, yakni RS Dharmais, RS Persahabatan Jakarta, RS Hasan Sadikin Bandung Jawa Barat, RS Sardjito Yogyakarta, RS Profesor Ngoerah di Bali, dan RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

"Antara gedung ini dan gedung sebelah ada jalanan yang kurang tertata dan banyak pedagang. Jalanan akan kita upgrade dan menempatkan pedagang di tempat yang lebih bagus. Jadi, pedagang kita jadikan bagian dari komunitas rumah sakit," ujar Menkes Budi.

Presiden Islamic Development Bank, Muhammed Al Jasser mengatakan, peresmian RS Kanker Dharmais merupakan kebanggaan bagi semua orang yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan.

"Dengan peresmian Gedung Pelayanan Kanker Ibu dan Anak, kami memastikan bahwa ibu dan anak Indonesia memiliki akses terhadap layanan kesehatan kelas dunia. Kami telah menambahkan lebih dari 1.000 tempat tidur rumah sakit, terutama didedikasikan untuk meningkatkan perawatan anak-anak," kata Al Jasser.

Menurutnya, fasilitas-fasilitas kesehatan yang diresmikan akan berperan penting meningkatkan kesehatan masyarakat. Tak hanya sekadar infrastruktur, namun

lebih untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan.

Antisipasi Mpx, Pendatang dari Luar Negeri Wajib Isi SATUSEHAT Health Pass

Pemerintah memperketat pemeriksaan kesehatan di pintu masuk negara, khususnya di bandara-bandara, bagi para pendatang dari luar negeri. Hal ini untuk mencegah masuknya varian baru Mpx ke Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemkes) RI, M. Syahril menjelaskan, skrining ketat dilakukan dengan mewajibkan setiap pelaku perjalanan internasional baik WNI maupun WNA yang masuk ke Indonesia harus mengisi formulir swadeklarasasi elektronik bernama SATUSEHAT Health Pass.

"Skrining ketat dilakukan menyusul ditemukannya varian Clade Ib di luar kawasan Afrika. Virus Mpx Clade Ib terindikasi memiliki derajat keparahan yang lebih tinggi, penularan lebih cepat, termasuk

untuk mencegah penularan Mpx di Indonesia.

Salah satunya, menyosialisasikan dan menginformasikan kepada setiap pelaku perjalanan yang akan terbang ke Indonesia untuk mengisi SATUSEHAT Health Pass sebelum keberangkatan.

"Para penumpang harus mengisi SATUSEHAT Health Pass, sebelum atau saat check-in di keberangkatan. Hal ini untuk mencegah penumpukan penumpang di pintu masuk negara," tambahnya.

Pengisian formulir swadeklarasasi elektronik SATUSEHAT Health Pass, juga dapat dilakukan secara online, melalui laman <https://sshp.kemkes.go.id>, sehingga pelaku perjalanan tidak perlu mengunduh aplikasi baru.

Penumpang hanya perlu mengisi form yang tersedia. Setelah form diisi, akan muncul barcode yang berisi riwayat kesehatan dan perjalanan penumpang. Barcode tersebut akan dipindai oleh petugas di pintu kedatangan bandara. Setelah barcode dipindai, selanjutnya silakan disimpan.

M. Syahril menambahkan, apabila dalam waktu 21 hari setelah bepergian ke luar negeri, atau berasal dari negara atau daerah endemik dan terkena dampak, penumpang mengalami sakit, maka harus segera mencari perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan menunjukkan barcode SATUSEHAT Health Pass kepada petugas kesehatan.

"Pengisian form elektronik ini merupakan bagian dari early warning system kami

dalam mendeteksi Mpx. Untuk itu, bila dalam 21 hari sejak kedatangan ke Indonesia mengalami sakit, atau merasakan panas dan gejala Mpx lainnya maka kami mengimbau untuk segera ke rumah sakit dan menunjukkan barcode-nya," jelas M. Syahril.

Adapun, langkah Mengisi SATUSEHAT Health Pass Bagi Pelaku Perjalanan Internasional, yaitu:

- Akses <https://sshp.kemkes.go.id> dari peramban dan klik tombol mulai
- - Pilih penggunaan bahasa yang diinginkan
- Lengkapi seluruh isian yang ada
- Setelah melengkapi form, muncul kode QR dan
- Silakan disimpan atau jangan tutup halaman sampai berhasil dipindai oleh petugas. ♦



menular ke populasi anak-anak," kata M Syahril, di Jakarta.

M. Syahril menambahkan, Kemenkes telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemhub), terkait penerapan SATUSEHAT Health Pass bagi pelaku perjalanan luar negeri dengan mengirimkan surat pada 26 Agustus 2024.

Kemhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor:SE 5 DJPU Tahun 2024 tentang Penggunaan SATUSEHAT Health Pass Pada Pelaku Perjalanan Luar Negeri, pada Selasa (27/8/2024).

Dalam surat edaran tersebut, Kemhub meminta Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, yang melayani penerbangan ke luar negeri agar melakukan empat upaya

DORONG RETAIL UMKM TERUS TUMBUH, MENKO AIRLANGGA AJAK UNTUK 'BELANJA DI INDONESIA SAJA'

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, yakni diperkirakan berjumlah 281 juta jiwa di 2024, dan dengan jumlah yang sebesar itu merupakan pangsa retail yang bagus untuk diberdayakan.



"P

ertumbuhan sektor konsumsi di Indonesia sejak 2002 lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi yakni 12%. Mal di Indonesia, khususnya di Jakarta, lebih baik dan modern daripada berbagai mal di negara lain. Kita harus tepuk tangan untuk para peretail. Hal itu didukung oleh pendapatan per kapita di Jakarta yang sudah di atas USD20 ribu. Jadi, berapa banyak toko retail yang sudah dibuka di suatu daerah dapat mencer-

minkan berapa pendapatan per kapita dari daerah itu," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keynote speech pada acara pembukaan Indonesia Retail Summit 2024, di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

bertema "Navigating the Future of Retail: Strategies for Competitiveness and Innovation", di Jakarta, Rabu (28/08).

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menetapkan beberapa kebijakan guna

memberikan kemudahan pada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan di dalam negeri.

Pemerintah juga mendorong pelaku usaha pusat perbelanjaan, untuk bermitra dengan pelaku UMKM. Melalui kemitraan dan kolaborasi ini, diharapkan akan menciptakan peluang pasar bagi produk UMKM, membuka lapangan usaha baru, menyerap tenaga kerja, serta mewujudkan iklim usaha yang sehat.

"Produk dan positioning itu penting un-



tuk retail. Harus ada keberpihakan alokasi untuk para UMKM ini di berbagai pusat perbelanjaan. Untuk jumlah toko retail memang terus berkembang dan berjalan baik. Kita ingin bukan cuma di Jakarta saja, tapi juga seluruh Indonesia, karena ada daerah lain yang pendapatan per kapitanya juga menengah ke tinggi. Supaya sektor retail terus tumbuh, maka harus terus digenjot dari sisi produktivitas dan inovasi," tambah Menko Airlangga, di acara Indonesia Retail Summit 2024, yang bertema "Navigating the Future of Retail: Strategies for Competitiveness and Innovation" itu.

Pada 2024 terdapat peningkatan jumlah pengunjung pada pusat perbelanjaan, terutama pada saat libur hari besar keagamaan dan libur sekolah. Hal itu tercermin dari peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juli 2024 yang berada

pada level 123,4, dan ini termasuk kategori zona optimis.

Mendukung hal ini, Pemerintah berupaya merumuskan dan mengimplementasikan regulasi yang kondusif bagi seluruh pelaku usaha retail, baik skala besar maupun UMKM.

Pemerintah juga menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan produk dan layanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Selain itu, pelaku usaha retail juga diharapkan aktif berinovasi menciptakan konsep baru dalam pemenuhan kebutuhan dan gaya hidup konsumen. Inovasi ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan teknologi pembayaran yang canggih untuk meningkatkan pengalaman belanja, hingga penawaran produk dan layanan yang eksklusif dan sesuai tren terkini.

Pada kesempatan tersebut, juga diluncurkan Program "Belanja di Indonesia



Produk dan positioning itu penting untuk retail. Harus ada keberpihakan alokasi untuk para UMKM ini di berbagai pusat perbelanjaan.

Saja". Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Pemerintah mendukung program tersebut, untuk mendorong konsesi di dalam negeri.

"Karena kelas menengah kita cukup besar ada 164 juta orang, termasuk aspir-

ing middle class, jadi dari sisi Pemerintah tinggal mendongkrak daya beli mereka dengan berbagai program insentif atau subsidi," pungkas Menko Airlangga.

Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca, Menko Airlangga Tekankan Pentingnya Akselerasi Inovasi Renewable Energy dan Transisi Energi

Indonesia terus berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca, guna menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), yaitu sebesar 31,89% pada tahun 2030 dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional, serta mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

"Akselerasi inovasi renewable energy dan transisi energi menjadi penting, karena energi adalah kontribusi utama dari gas rumah kaca di Indonesia, mencapai 34 persen dari total energi gas rumah kaca. Dan suka-tidak suka transisi hijau ini ada-



lah upaya yang paling efektif," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara Seminar Nasional Renewable Energy dan Transisi Energi dan Rapat Kerja Nasional Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia (BKM-PII) di Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (29/8/2024).

Terkait hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi di antaranya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang di antaranya dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon.

Saat ini, juga sedang dikaji PLTU yang akan diusulkan untuk dipensiunkan (early retirement) dengan didanai melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP), dimana Indonesia telah mendapatkan komitmen dukungan pendanaan senilai USD21,6 miliar yang merupakan hasil dari KTT G20 Indonesia Tahun 2022.

"Indonesia bersama Jepang menjadi bidan kelahiran Asia Zero Emission Com-

Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi di antaranya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

munity (AZEC). Dan dalam AZEC itu chair dan co-chairnya (dari pihak) Jepang dan Indonesia, dan saya menjadi chair dan co-chair dari AZEC ini. AZEC minggu lalu kita baru second ministerial meeting di Jakarta. Dan tentunya ini menjadi pemilih,

kurator dari proyek-proyek. Di dalam kurator kemarin seluruhnya kita sudah melihat ada 78 proyek transisi energi dari berbagai negara Asia dan 34 proyeknya itu dari Indonesia. Jadi kita berharap 34 proyek ini bisa mendapatkan dana JETP melalui AZEC," tambah Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga mengatakan ke depan Indonesia akan menyiapkan Sustainable Aviation Fuel (SAF) untuk 5 persen dari penggunaan aftur yang diharapkan Indonesia menjadi supplier terbesar di ASEAN.

Kemudian Indonesia juga akan mengembangkan hydro energy yang diharapkan bisa mencapai total kapasitas mendekati 10 gigawatt.

"Tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk PII sebagai sumber daya manusia. Kita butuh lebih banyak lagi sains, teknologi, engineering, dan matematik terutama untuk digitalisasi dan the future industry termasuk dalam transisi energi. Jadi cetaklah insinyur sebanyak-banyaknya," pungkas Menko Airlangga. ♦



KURANGI POLUSI, MENHUB IMBAU ANGKUTAN PERKOTAAN BERALIH KE KENDARAAN LISTRIK

Pemerintah sangat serius dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan polusi. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, saat menghadiri acara Pesta Rakyat: Percaya Indonesia Merdeka dari Polusi Bersama Mitra Grab, di Jakarta.

Oleh karenanya, Menhub mengimbau agar angkutan perkotaan beralih menggunakan kendaraan listrik.

"Pemerintah konsisten menjadikan kendaraan listrik angkutan mayoritas masyarakat. Memang tidak mudah. Oleh karenanya, kita mengimbau angkutan umum perkotaan khususnya, agar menggunakan kendaraan listrik," kata Menhub Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Menhub juga mengapresiasi langkah Grab Indonesia, dalam mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai upaya mengurangi polusi udara.

Sejak 2019 hingga saat ini, Grab telah melayani masyarakat Indonesia dengan lebih dari 10.000 kendaraan listrik, khususnya di 8 kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta, Bandung, Bali, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan Solo. Grab juga akan melakukan penambahan 1.000 unit kendaraan listrik ke depannya.

"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Grab, berkaitan dengan pengadaan

kendaraan listrik untuk lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, dimana pemerintah telah menargetkan pengoperasian 2 juta mobil listrik di Indonesia hingga tahun 2030," tambah Menhub.

Pada kesempatan tersebut, Menhub juga berpesan kepada Grab Indonesia dan seluruh mitra pengemudi Grab, untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami harapkan pihak Grab Indonesia, agar juga memberikan edukasi secara berkala kepada mitra, khususnya mengenai aturan keselamatan berkendara, kemudian pemberian layanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, sehingga tak hanya armada yang bagus, tapi servis yang diberikan juga semakin bagus dan meningkat," pungkas Menhub.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI terpilih 2024-2029, Gibran Rakabumi Raka; Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi; Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo; Pj Gubernur



DKI Jakarta, Heru Budi Hartono; dan Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi.

Kemenhub Usulkan Tambahan Anggaran Tahun 2025 Sebesar Rp. 7,68 Triliun

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam Pagu Anggaran TA 2025 sebesar Rp.7,68 Triliun.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, di Senayan Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 19 Juli 2024, Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.24,76 Triliun. Sedangkan pada tahun 2024 alokasi anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 38,6 Triliun, dimana pagu tersebut mengalami rekomposisi sehingga pagu efektifnya sebesar Rp. 43,47 Triliun.

Menhub menyatakan bahwa Pagu Anggaran Tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Menhub memahami

bahwa ini terjadi hampir di seluruh Kementerian dan Lembaga, namun demikian ia mengatakan, masih banyak terdapat kegiatan prioritas dan mendasar, yang belum bisa terakomodir di dalam pagu anggaran tersebut.

“Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami menyampaikan



Pemerintah konsisten menjadikan kendaraan listrik angkutan mayoritas masyarakat. Mengingat tidak mudah.

permohonan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam Pagu Anggaran TA 2025 sebesar Rp.7,68 Triliun,” tambah Menhub.

Menhub mengatakan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang diwujudkan melalui 3 (tiga)

arah kebijakan prioritas pembangunan.

“Untuk mendukung tema tersebut, Kementerian Perhubungan akan senantiasa berupaya mewujudkan melalui 3 poin utama tersebut, yaitu SDM berkualitas, infrastruktur berkualitas, dan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Menhub.

Menhub juga menyampaikan, bahwa APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024, realisasi anggaran per 21 Agustus 2024 adalah sebesar Rp22,58 Triliun atau telah mencapai 51,95%.

Rincian realisasi anggaran tersebut, yakni untuk belanja pegawai 74,04%, belanja barang 50,84%, dan belanja modal 48,48%. Untuk realisasi penarikan dana mencapai Rp22,58 Triliun, melampaui target bulan Agustus 2024 sebesar Rp22,57 Triliun.

“Angka ini masih sesuai dengan target yang kami tetapkan di awal. Kami optimis, dalam prognosa nanti kita akan mencapai 96%” tegas Menhub.

Hadir pula dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Perhubungan, Novie Riyanto; Inspektur Jenderal, Arif Toha; Dirjen Perhubungan Darat, Risyapudin Nursin; Dirjen Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi; Dirjen Perkeretaapian, Risal Wasal; Dirjen Perhubungan Udara, Maria Kristi Endah, dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Robby Kurniawan. ♦





ERICK DORONG PENGUATAN HUBUNGAN RI DAN KORSEL MELALUI KEMITRAAN BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mendorong peningkatan kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara Indonesia dengan Badan Usaha Korea Selatan, guna mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kedua negara.

Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dan sumber daya manusia yang memadai, sementara Korea Selatan memiliki teknologi yang canggih.

Hal tersebut diungkapkan Menteri BUMN, Erick Thohir dalam acara Team Korea-Indonesia Economic Partnership Forum di Jakarta.

"Tentu saja ini dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara. Saat ini, volume perdagangan kita sekitar 20 miliar dolar AS. Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan, jumlahnya bisa dua kali lipat," kata Erick Thohir, di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Rabu (28/8/2024).

Menteri Erick juga optimistis, mengenai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, memprediksi pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai 10.000 dolar AS pada 2029-2030. Kerja sama

dengan BUMN Korea Selatan, menurutnya, akan menjadi salah satu kunci untuk mencapai target tersebut.

Selain itu, Erick juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara BUMN kedua negara yang telah berkontribusi pada keuntungan bersama dan pembangunan berkelanjutan melalui pertukaran teknologi. Khususnya, dalam industri energi ramah lingkungan antara Pertamina dan Korea National Oil Corporation (KNOC), yang telah bekerja sama dalam mengembangkan teknologi carbon capture and storage (CCS).

Sementara itu, dalam sektor kesehatan, kerja sama juga telah terjalin antara Biofarma Indonesia dan International Vaccine Institute (IVI) yang berbasis di Korea untuk pengembangan vaksin tifoid.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Duta Besar Korea Selatan untuk Indone-

sia, Park Soodeok, mengatakan, meski Korea telah menjadi mitra utama dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia, tantangan seperti ketegangan geopolitik dan ketidakstabilan rantai pasokan tetap perlu diwaspadai.

Oleh karena itu, tambah Park Soodeok, penting untuk memperluas kerja sama kedua negara, termasuk investasi dan kegiatan usaha perusahaan Korea di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Korea di Indonesia terus meningkat dalam dua tahun terakhir.

Pada 2022, realisasi investasi Korea di Indonesia mencapai 2,3 miliar dolar AS, naik menjadi 2,5 miliar dolar AS pada 2023. Hingga paruh pertama 2024, inv-



estasi Korsel di Indonesia telah mencapai 1,7 miliar dolar AS.

Investasi Korea Selatan di Indonesia didominasi oleh sektor manufaktur, di antaranya industri otomotif, elektronik, mesin-mesin industri, serta produk kulit dan alas kaki.

Dukungan DPR, Erick Thohir: Kuatkan BUMN Menjadi Benteng Ekonomi Masa Depan Indonesia

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan dukungan DPR RI dalam terus menguatkan peran nyata perusahaan BUMN sebagai benteng ekonomi nasional di masa mendatang menjadi garansi kemajuan ekonomi Indonesia Emas di 2045.

Pandangan, opini, sokongan, bahkan kritik membangun yang dalam empat tahun terakhir disumbangkan para wakil rakyat, terutama Komisi VI, berandil besar dalam tercapainya kinerja positif Kementerian BUMN dalam melampaui target pemberian deviden kepada negara.

Hal tersebut disampaikan Erick Thohir dalam Forum Group Discussion (FGD) antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN di Sanur, Bali.

"Dari 88 Proyek Strategis Kementerian BUMN, kami sudah menyelesaikan 92% atau 81 proyek telah rampung. Dalam kesempatan rapat ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua stake-

holder. Mulai dari anggota DPR, para Menteri terkait, pihak swasta, partner luar negeri dan UMKM yang sudah menjadi bagian ekosistem BUMN sehingga amanah yang diberikan kepada kami



Tentu saja ini dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara. Saat ini, volume perdagangan kita sekitar 20 miliar dolar AS. Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan, jumlahnya bisa dua kali lipat.

mampu dijalankan dengan baik," kata Menteri BUMN, Erick Thohir di Bali, Sabtu (3/8/2024).

Erick menjelaskan, dari segi pendapatan BUMN mengalami peningkatan dari

Rp 1.930 Triliun pada 2020 menjadi Rp 2.933 Triliun pada 2023. Dengan laba bersih keseluruhan dari Rp 13 Triliun pada 2020 naik menjadi Rp 327 Triliun pada 2023.

Aset yang dimiliki Kementerian BUMN juga meningkat dari Rp 8.312 Triliun pada 2020 menjadi Rp 10.402 Triliun pada 2023. Tak hanya itu, laba bersih Tahun 2023 sebesar Rp327 Triliun meningkat signifikan sebesar Rp314 Triliun dengan CAGR 191% selama 4 tahun.

"Menuju roadmap Kementerian BUMN satu dekade berikutnya, 2024-2034, kami mengapresiasi support Komisi VI sebagai mitra yang selalu berkolaborasi, sehingga BUMN semakin kuat menjadi benteng ekonomi nasional menghadapi tantangan global agar cita-cita Indonesia Emas di 2045 bisa tercapai," ungkap Erick.

Sejak diamanahkan memimpin Kementerian BUMN di akhir 2019, Erick Thohir menilai DPR telah menjadi mitra yang sangat efektif dan konstruktif, sehingga program transformasi yang menjadi agenda besar BUMN bisa berjalan baik.

"Artinya, Kementerian BUMN dan DPR sudah sejalan dalam memastikan langkah-langkah penyehatan dan transformasi ekonomi ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan apresiasi kami jika lakukan kelebihan," pungkas Erick. ♦



PENGESAHAN APBN 2025 TUNGGU KETUK PALU

Pembahasan RAPBN 2025 tampak mudah menemukan titik temu antara fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah. Pengesahan RAPBN 2025 menjadi APBN berdasarkan Undang-Undang, segera ketuk palu pada awal September 2024.

Sejauh ini seluruh fraksi DPR menyatakan setuju terhadap RAPBN 2025 dan nota keuangannya. Dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibacakan Adisatriya Suryo Sulisto menyebutkan RAPBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan. Pemerintahan saat ini yang menyusun RAPBN 2025, tapi yang menjalankan dan mempertanggungjawabkan pemerintahan 2024-2029.

"Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII itu dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Selasa, 20 Agustus 2024.

Menurut juru bicara fraksi terbesar di DPR itu, RAPBN 2025 dan Nota Keuangannya hanya sebatas menjelaskan alokasi anggaran dari berbagai bidang tanpa ke-

jelasan transformasi struktural yang akan dicapai. Dia berharap petani, nelayan, buruh, UMKM, kegiatan ekonomi rakyat dan lainnya mendapat akses untuk mencapai kesejahteraan melalui alokasi program berkualitas dalam APBN. Fraksi PDIP setuju RUU APBN 2025 dibahas lebih lanjut.

Sedangkan juru bicara fraksi Golkar, Agung Widyantoro, menilai RAPBN 2025 ini lain dari biasanya karena disusun dan dilaksanakan oleh presiden serta pemerintahan yang berbeda. Hal ini akan menimbulkan tantangan secara internal berupa sinkronisasi kebijakan serta program-program dengan anggaran dan pembiayaan yang tersedia.

Toh Fraksi Golkar mengapresiasi sikap pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin memberikan keleluasaan serta mengkomodir program-program Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Fraksi partai Golkar menyatakan menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2025

dan Nota Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut,” ujar anggota Komisi II DPR itu.

Selanjutnya, Fraksi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili Sri Meliyana, mengatakan fraksinya mengapresiasi kebijakan Jokowi yang memberikan ruang terhadap pemerintahan baru dalam menentukan program kerja ke depan. Sehingga pemerintahan baru bisa langsung bekerja merealisasikan janji-janji kampanye yang disampaikan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Misalnya program makan bergizi gratis untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan koperasi serta meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. “Demikian pandangan fraksi Gerindra DPR agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku,” usulnya.

Sikap yang sama juga disampaikan juru bicara fraksi partai Nasdem, Fauzi Amro. Menurutnya APBN 2025 krusial dalam proses transformasi ekonomi di Indonesia. APBN 2025 menjadi tahun pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 se-

nya untuk dibahas lebih lanjut,” harapnya.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ikut mengamini RUU APBN 2025 serta Nota Keuangannya untuk ditindaklanjuti pembahasannya. Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, yang berpendapat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,2 persen dalam RUU APBN 2025 relatif lebih tinggi dari estimasi lembaga keuangan internasional (IMF) yang memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen. Fraksi PKB justru mengusulkan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2025 dipatok 5,3 persen.

Ratna meminta pemerintah untuk memberi perhatian lebih terhadap investasi sehingga mampu memberikan nilai tambah yang tinggi khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. Tercatat tahun 2013 setiap Rp1 triliun investasi yang masuk bisa menyerap 4.594 orang tenaga kerja. Tapi ta-

hun 2023 setiap Rp1 triliun investasi hanya menyerap 1.285 tenaga kerja.

Pemerintah ke depan, sambungnya, harus meningkatkan investasi di sektor padat karya karena mampu menyerap tenaga kerja lebih tinggi begitu juga multiplier effect yang ditimbulkan. “Fraksi PKB menyatakan persetujuannya agar RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku,” imbuh anggota Komisi VII DPR itu.

Persetujuan terhadap RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya juga diberikan fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Vera Febyanthy. Partai besutan Presiden RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono itu berpendapat APBN 2025 disusun pada masa transisi kepemimpinan dari Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subi-



Fraksi partai Nasdem menyatakan menyetujui RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut.

hingga diharapkan memberikan pondasi yang kuat dalam menjamin keberlanjutan pembangunan.

APBN 2025 dituntut menyiapkan ruang fiskal yang optimal sehingga tahun pertama pemerintahan baru dapat segera melaksanakan berbagai program kerja prioritas. Keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan mampu mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045. “Fraksi partai Nasdem menyatakan menyetujui RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya



anto.

Penyusunan setiap kebijakan diharapkan memberi ruang kepada pelaksana program kebijakan pemerintahan selanjutnya. Vera mengingatkan kebijakan yang disusun dalam APBN 2025 harus mampu menjawab tantangan nasional dan global serta menyesuaikan dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2030. "Fraksi Partai Demokrat DPR menyatakan dapat menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat I dan II di DPR," harapnya.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Riski Sadig, menilai APBN 2025 penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang menuju yang akan datang. Fraksi PAN berharap RUU APBN 2025 beserta nota keuangannya menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Tujuannya untuk memberantas kemiskinan, memperkecil ketimpangan sosial dan ekonomi serta membuka lapangan kerja. "Fraksi PAN menyetujui RUU

terus dilakukan menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan penerimaan negara, belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan. "Fraksi PPP dapat menyetujui RUU APBN 2025 untuk dibawa pada tahap pembahasan selanjutnya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah untuk memperhatikan kalangan kelas menengah untuk menjaga kinerja konsumsi domestik dalam menopang



yang diwakili Netty Prasetiyani, menyebut secara umum RAPBN 2025 butuh penajaman agar lebih sehat, kredibel, dan berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat. Penetapan target tahun 2025 harus lebih kredibel dan dapat direalisasikan.

Tahun 2025 merupakan periode awal pemerintahan baru sehingga membangun optimisme kepada masyarakat dan dunia usaha agar ekonomi bisa bergerak lebih cepat. Berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan ketimpangan dapat diatasi lebih cepat. "Demikian pandangan umum fraksi PKS DPR RI terkait keterangan pemerintah mengenai RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya," ujarnya.

APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut ke tahap berikutnya," paparnya.

Persetujuan terakhir disampaikan fraksi PPP melalui juru bicaranya, Muhammad Aras, yang menjelaskan penyusunan RAPBN 2025 beserta Nota Keuangannya jadi yang terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. RAPBN 2025 ini akan mengantarkan proses transisi kepemimpinan menuju pemerintahan baru. Partai ber lambang Ka'bah itu meminta pemerintah tetap menjaga keberlanjutan reformasi baik pendapatan dan belanja serta melakukan inovasi untuk pembiayaan defisit APBN 2025.

Konsolidasi dan reformasi fiskal harus

pertumbuhan ekonomi. "Pertumbuhan ekonomi selalu bergantung pada konsumsi domestik, tapi itu terancam menurun seiring dengan turunnya kelas menengah Indonesia. Sejak enam tahun lalu, jumlah kelas menengah kita turun 8 juta jiwa. Padahal merekalah sebenarnya kelas penggerak konsumsi domestik," ujar Said, di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

Dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen. Sementara Said mencatat Indonesia hanya pernah sekali melampaui pertumbuhan ekonomi di atas target itu sepanjang 2015 hingga 2023, tepatnya 5,31 persen pada 2022.

Menurut dia, persoalan struktural menjadi faktor yang membuat Indonesia sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi. Ekonomi berbiaya tinggi, ketidakpastian hukum, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM) juga disebut sebagai faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar lebih progresif menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketua Banggar merekomendasikan agar pemerintah berfokus menjaga konsumsi domestik dengan inflasi yang bertahan pada level

lifting minyak 600 ribu barel per hari, dan gas bumi 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Pada kesempatan lain, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulisto meminta agar asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2025 diubah sesuai yang telah disepakati dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025. Saat menjadi juru bicara untuk fraksinya dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, Adisatrya Suryo Sulisto menyoroti keputusan pemerintah

sentral Amerika Serikat, atau yang biasa disebut The Fed.

"Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan pemerintah agar kembali pada kesepakatan dalam KEM PPKF, yaitu pada rentang nilai tukar Rp15.300 sampai dengan Rp15.900 per dolar AS," ucap Ady.

Tidak hanya menyoroti tentang nilai tukar rupiah, pihaknya juga meminta pemerintahan mendatang untuk tetap menjamin kesejahteraan masyarakat meskipun alokasi subsidi untuk sejumlah sektor berkurang dibandingkan dengan tahun ini. Adisatrya mengatakan bahwa



rendah, investasi yang menopang pembukaan lapangan kerja baru, serta memberikan nilai tambah atas produk ekspor.

"Setidaknya kita membutuhkan kontribusi investasi minimal 1,5 persen, dan ekspor 0,5 persen sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi tiap tahun. Dengan demikian, tulang punggung permintaan bukan hanya konsumsi domestik," kata Said Abdullah.

Sedangkan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada RAPBN 2025, lebih tinggi dari proyeksi tahun ini sebesar 5,1 persen. Inflasi dipatok pada level 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.100 per dolar AS, SBN 10 tahun 7,1 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 82 dolar AS per barel,

yang menetapkan nilai tukar rupiah pada 2025 jauh lebih tinggi daripada nilai saat ini.

"Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah Rp15.700 per dolar AS. Pemerintah malah menetapkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2025 senilai Rp16.200 per dolar AS," ujarnya di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024

Fraksi PDIP menilai bahwa penetapan nilai tukar rupiah yang melemah tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah selama ini untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Selain itu, kini kebijakan moneter global tengah dalam tren pelonggaran, terutama akibat adanya optimisme pasar terhadap penurunan suku bunga bank

dalam RAPBN 2025 perkiraan realisasi belanja modal turun Rp148 triliun, belanja subsidi turun Rp4,8 triliun, belanja bansos turun Rp700 miliar, dan subsidi pupuk turun Rp6,45 triliun. Sementara itu, lanjutnya, belanja pegawai naik Rp52,4 triliun dan pembayaran bunga utang naik Rp53,9 triliun.

"Pemerintah harus dapat memastikan bahwa alokasi belanja negara yang turun tersebut tidak mengurangi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, bansos, bantuan pupuk, dan lain sebagainya," katanya.

Ringkasnya, beda pandangan tipis-tipis saja. Awal September 2024, kita tunggu ketuk palunya. ♦

Bulan Safar, Bulan Sial?

BEGINI MENURUT PENJELASAN ULAMA DAN HADIST NABI

Bulan Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah setelah bulan Muharram. Di balik penamaan bulan Safar ada alasan khusus, sebagaimana disampaikan oleh Imam Abul Fida Ismail bin Umar ad-Dimisyqi, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Ibnu Katsir.

Di balik penamaan bulan Safar, tidak lepas dari keadaan orang Arab zaman dulu pada bulan ini. Safar yang berarti 'sepi' atau 'sunyi' sesuai dengan keadaan masyarakat Arab yang selalu sepi dan sunyi pada bulan Safar. Sepi dalam arti senyapnya rumah-rumah mereka karena orang-orang keluar meninggalkan rumah untuk perang dan bepergian.

Imam Ibnu Katsir menjelaskan: "Safar dinamakan dengan nama tersebut, karena sepiunya rumah-rumah mereka dari mereka, ketika mereka keluar untuk perang dan bepergian."

Sementara itu, Ibnu Manzhur, menyampaikan alasan yang lebih banyak. Menurutnya, ada beberapa alasan mendasar di balik penamaan bulan Safar, di antaranya:

1. Sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir;
2. Orang Arab memiliki kebiasaan menanam semua tanaman yang mereka tanam, dan mengosongkan tanah-tanah mereka dari tanamanan pada bulan Safar; dan
3. Pada bulan Safar, orang Arab memiliki kebiasaan memerangi setiap kabilah yang datang, sehingga kabilah-kabilah tersebut harus pergi tanpa bekal (kosong), karena mereka tinggalkan akibat rasa takut pada serangan orang Arab.

Sebagaimana diketahui, banyak orang beranggapan dan bahkan ada yang meyakini, pada bulan safar akan terjadi musibah yang luar biasa dan akan terjadi cobaan melebihi bulan-bulan lainnya.

Dalam hal ini Ibnu Rajab al-Hanbali mengatakan, bulan Safar dan bulan lainnya, tidak memiliki perbedaan sama sekali.

Ibnu Rajab menegaskan: "Adapun mengkhususkan kesialan dengan suatu zaman tertentu bukan zaman yang lain, seperti (mengkhususkan) bulan Safar atau bulan lainnya, maka hal ini tidak benar."

Ibnu Rajab tidak membenarkan keyakinan seperti itu, sebab semua bulan, zaman, dan tahun merupakan makhluk Allah SWT, yang di dalamnya bisa saja terjadi suatu kesialan, bencana, dan

musibah.

Maka sangat tidak logis, jika musibah hanya dikhususkan pada bulan Safar dan meniadakannya pada bulan-bulan lainnya.

Dari penjelasan para ulama di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa penyebab suatu zaman tidak diberkahi oleh Allah SWT adalah dikarenakan banyaknya kemaksiatan yang dilakukan manusia.

Begitu juga penyebab suatu zaman bisa diberkahi, apabila di dalamnya orang sibuk dengan melakukan ketaatan dan kebaikan. Karenanya sangat wajar jika pada penjelasan di atas, Ibnu Rajab menolak anggapan atau keyakinan bahwa bulan Safar dianggap sebagai bulan kesialan yang di dalamnya tidak ada keberkahan sama sekali.



Hadits Nabi

Anggapan atau keyakinan tentang Bulan Safar adalah Bulan Sial, sebenarnya tidak lepas dari tradisi orang Arab yang memiliki keyakinan bahwa bulan Safar merupakan bulan kesialan dan penuh cobaan.

Keyakinan salah itu, akhirnya mengakar dan menyebar ke mana-mana, bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengikutinya.

Namun anggapan tersebut mendapat bantahan serius dari kalangan ulama, bahkan Rasulullah SAW. Keyakinan akan kesialan bulan Safar ini, juga merambah di kalangan masyarakat Indonesia.

Awal mula anggapan atau keyakinan tersebut, sebenarnya tidak lepas dari tradisi orang Arab, yang memiliki keyakinan bahwa bulan Safar merupakan bulan kesialan dan penuh cobaan.

"Keyakinan salah itu akhirnya mengakar dan menyebar ke mana-mana, bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengikutinya," kata Ustadz Sunnatullah, seperti dilansir dari NU Online.

Rasulullah SAW pun menegaskan dirinya menolak anggapan tersebut. Pe-

nolakannya itu dinyatakan dalam sebuah haditsnya sebagai berikut.

"Tidak ada wabah (yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah), tidak pula tanda kesialan, tidak (pula) burung (tanda kesialan), dan juga tidak ada (kesialan) pada bulan Safar. Menghindarlah dari penyakit judzam sebagaimana engkau menghindar dari singa."

Syekh Abu Bakar Syata ad-Dimyathi, sebagaimana dikutip dari Ustadz Sunnatullah, mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Hâsiyyah l'ânatuth Thâlibin juz 3, bahwa hadits di atas ditujukan untuk menolak keyakinan dan anggapan orang-orang jahiliah, yang mempercayai setiap sesuatu dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya; baik keburukan maupun kebaikan.

Selain itu, Syekh Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi juga mengatakan, bahwa hadits di atas juga menegaskan penolakan Rasulullah SAW terhadap setiap penisbatan suatu kejadian kepada selain Allah.

Artinya, semua kejadian yang terjadi murni karena kehendak Allah yang sudah tercatat sejak zaman azali, bukan dis-

ebabkan waktu, zaman, dan anggapan salah lainnya.

- Bukti Bulan Safar Bukan Bulan Sial

Habib Abu Bakar Al-Adni dalam salah satu Kitabnya mengatakan, ada beberapa bukti peristiwa yang menolak keyakinan masyarakat Jahiliah atas keyakinannya yang menganggap bahwa Bulan Safar adalah Bulan Sial.

Inilah 5 Bukti bahwa Bulan safar bukan Bulan Sial:

1. Rasulullah SAW melangsungkan pernikahan dengan Sayyidah Khadijah pada bulan Safar;
2. Pernikahan antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah az-Zahra juga dilangsungkan pada bulan Safar;
3. Hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah bertepatan dengan bulan Safar;
4. Perang pertama, yaitu perang Abwa terjadi pada bulan Safar, di mana umat Islam justru mendapatkan kemenangan telak atas kaum kafir.
5. Pada bulan Safar juga terjadi peperangan hebat yaitu perang Khaibar, dan kemenangan diraih oleh umat Islam. ♦



MARAH YANG DILARANG DAN DIBOLEHKAN DALAM ISLAM

Salah satu sifat alamiah dalam diri manusia adalah amarah. Dalam Bahasa Arab, amarah merupakan terjemahan dari kata *ghadlab*, yang bisa diartikan sebagai benci (*sukhth*), tidak meridlai sesuatu, menggigit (*'adld-la*), muram (*'abus*), dan membengkak.

Demikian sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Mandzur dalam *Lisan al-Arab*, juz II, hal. 648-651. Sementara arti marah menurut istilah, Ali ibn Muhammad al-Jurjani dalam kitab *At-Ta'rifat* mendefinisikannya sebagai berikut: "Marah ialah perubahan yang terjadi ketika darah jantung mendidih, untuk menghasilkan kesembuhan pada dada."

Dengan kata lain, seseorang berada dalam kondisi marah, ketika terjadi perubahan emosi dalam dirinya yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh di dalam dada.

Sementara itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* menjelaskan hakikat marah sebagai berikut: "Sesungguhnya marah adalah nyala api yang diambil dari api neraka Allah yang dinyalakan, kemudian naik ke hati. Sesungguhnya marah itu bertempat di lipatan hati, seperti bertempatnya bara api di bawah tungku yang berabu. Juga, marah itu dikeluarkan oleh kesombongan yang tertanam dalam hati setiap orang yang perkasa lagi keras kepala, seperti mengeluarkannya batu akan api dari besi. Bagi orang-orang yang memandang dengan cahaya keyakinan, telah tersingkap bahwa manusia itu ditarik urat darahnya kepada setan yang terkutuk. Siapa saja yang dikobarkan oleh api kemarahan, maka telah kuat padanya berdekatan dengan setan, di mana setan berkata: "Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan ia (Adam As) dari tanah." (QS. Al-A'raf: 12).

Sesungguhnya keadaan tanah adalah tenang dan berwibawa sementara keadaan api adalah menyala-nyala, mencari, bergerak dan bergoncang." (Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* juz III, hal. 64).

Keadaan marah sebagaimana yang digambarkan oleh Imam al-Ghazali di atas, dalam Al Quran sering diistilahkan secara spesifik sebagai *nafs 'amarah*.

Hal ini sebagaimana tergambar dalam surat Yusuf ayat 53: "Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dalam literatur hadits, terdapat banyak

sekali keterangan yang menyebutkan tentang bahaya marah. Di antara yang paling terkenal ialah peristiwa ketika ada seorang lelaki yang meminta wasiat kepada Rasulullah.

Rasulullah kemudian bersabda: "Janganlah engkau marah!" sebanyak tiga kali.

Namun demikian, tidak semua marah dinyatakan tercela. Marah dibolehkan jika kemarahan itu diarahkan sesuai dengan



proporsinya, maka justru hal tersebut menjadi sebuah kebaikan.

Imam Syafi'i mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin: "Berkata Imam Syafi'i Ra : Siapa saja yang dibuat marah, lalu ia tidak marah, maka ia adalah keledai. Siapa saja yang tidak mempunyai kekuatan marah dan kesombongan sama sekali, maka ia adalah sangat kurang. Padahal Allah SWT berfirman: "Adalah tegas terhadap orang-orang kafir, dan berkasih sayang dengan sesama mereka." (QS. Al-Fath: 29).

Allah juga berfirman kepada Nabi-Nya: "Perangilah orang-orang kafir, dan orang-orang munafik, serta bersikap tegaslah ter-

hadap mereka, dan tempat mereka adalah neraka jahanam. Itulah seburuk-buruknya tempat Kembali." (QS. Al-Taubah: 73).

"Sesungguhnya keras dan kasar termasuk salah satu di antara pengaruh kekuatan semangat. Dan, itulah marah". (Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin..., juz III, hal. 64)

Imam Al-Ghazali juga menambahkan bahwa marah yang tidak dibolehkan ialah marah yang masuk dalam kategori ifrath atau berlebihan: "Adapun berlebihan, ialah apabila sifat (marah) ini menjadi pemenang, sehingga keluar dari kebijaksanaan akal, agama dan ketaatan. Dan tidak tersisa baginya penglihatan hati, per-

timbangan dan pemikiran, serta pilihan. Ia bahkan menjadi orang yang dipaksa (oleh kemarahannya)".

Jadi bisa dipahami bahwa marah adalah sifat alamiah seorang manusia. Islam secara umum melarang kita untuk mengikuti kemarahan tersebut. Namun, dalam hal-hal tertentu, seperti sikap kita menghadapi masalah kemungkaran dan akidah, maka kita diperbolehkan menunjukkan kemarahan itu.

Bentuk marah yang sama sekali tidak diperkenankan dalam Islam ialah marah yang berlebihan, karena memang pada dasarnya Islam melarang segala sesuatu yang berlebihan. Wallahu a'lam. ♦





CELINE EVANGELISTA MUALAF, LEBIH TEPAT KEMBALI KE ASAL

Celine Evangelista, aktris cantik sekaligus presenter terkemuka, belakangan ini menarik perhatian publik karena keputusannya memeluk Agama Islam. Sebelumnya, ia beragama Katolik ikut agama ayahnya Mauro Ricci, juga ibundanya Vincentia Nurul.

Mengapa keislaman Celine bikin orang senegeri ini terganggu? Karena selama ia menjadi selebriti, masyarakat mengenal artis cantik satu ini sebagai penganut Agama Katolik. Bahkan ketika menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan mantan suaminya Stefan William.

Ketika digosipkan dekat dengan Marshel Widiyanto pun, publik menganggapnya wajar. Karena Marshel memang beragama Katholik. Celine seorang janda, dan ketika itu Marshel masih lajang.

Saat kabar Celine mualaf mulai terdengar santer, Raffi Ahmad pernah memposting foto Celine mengenakan mukena pada bulan Ramadhan lalu.

Tapi kepastian Celine sudah mualaf

dibeberkan oleh istri Almarhum Ustadz Jeffrey Al Buchori, Umi Pipik. Ibunda Abidzar itu menceritakan bahwa Celine Evangelista yang berdarah Bugis dari ibunya dan Italia dari ayahnya Mauro Ricci, telah mualaf.

Menurutnya, setelah mualaf yaitu mulai memeluk Agama Islam Celine sangat antusias belajar dan mendalami Agama Islam. Ia berkeinginan mengenakan hijab. Tapi masih takut belum istiqamah.

"Tapi memang aku pengen pake jilbab, aku cari-cari pengajian supaya aku bisa pake jilbab Umi, tapi sekarang aku belum bisa karena pekerjaan'," kata Umi Pipik menirukan Celine.

Umi Pipik menjelaskan, Celine saat ini sedang giat memperdalam agama Islam. Umi Pipik senang lantaran Celine banyak bertanya untuk belajar.

"Saya lihat dia shalat, belajar agama, memang sedang antusias untuk belajar. Sering kok (komunikasi sama saya), Celine itu banyak tanya, dia masih belajar juga," kata Umi Pipik.

Untuk diketahui, informasi awal Celine Evangelista sudah memeluk agama Islam disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Umi Pipik yang turut berperan dalam proses hijrahnya. Saat itu, Umi Pipik memberi doa terbaik agar Celine bisa istiqomah.

"Kalau soal dia mualaf itu benar. Dia mualaf memang sudah dalam waktu yang lama," kata Umi Pipik dikutip dari tayangan YouTube.

"Dia memang berusaha ingin terus belajar mendalami agama Islam. Semoga terus istiqomah," tambah Umi Pipik.

Senada yang diungkapkan Umi Pipik,

Raffi Ahmad mengatakan bahwa sebagai teman keluarganya, Celine Evangelista diketahui rajin Shalat Tahajjud.

Ibunda Celine, Vincentia Nurul anak tokoh terkenal di Makassar, Sulawesi Selatan, yang sebelumnya menganut Katolik sudah mualaf pada 2017.*

Berasal dari Keluarga Muslim Terpendang

Ketika Celine Evangelista dikabarkan mualaf, seantero negeri menerimanya sebagai kabar yang melegakan. Karena ternyata aktris cantik ini memang berasal dari keluarga besar beragama Islam. Kakek



Tapi memang aku pengen pake jilbab, aku cari-cari pengajian supaya aku bisa pake jilbab Umi, tapi sekarang aku belum bisa karena pekerjaan.

Buyut dan Kakeknya yaitu Haji Fadeli Luran dan Haji Sultani Fadeli Luran. Keduanya tokoh berpengaruh di Makassar bahkan merupakan Pahlawan Nasional.

Celine Evangelista sendiri lahir di Roma, Italia, pada 1992 sebagai seorang bayi Katolik dari ayahnya Mauro Ricci dan ibunya Vincentia Nurul. Tapi saat dirinya masih kecil, Celine mendapati ayah dan ibunya tidak bersama lagi. Bertahun-tahun ia tidak pernah mendapat kabar dari ayahandanya.

Setelah melakukan pencarian melalui media sosial saat menjadi artis remaja, Celine akhirnya mendapat kontak dengan ayahnya via Facebook. Lalu sang ayah terbang ke Jakarta, dan bertemulah keluarga ini dalam kerinduan mendalam dan kasih sayang yang begitu kuat.

Celine mendapat penjelasan bahwa ayah dan ibunya telah berpisah karena

sesuatu sebab yang mengharuskan itu. Apakah karena ibunya memilih beragama Islam, lalu mereka berdua memutuskan bercerai? Celine tak mengungkap itu. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya memahami keputusan kedua orangtuanya, dan ia menghormati itu.

Celine kecil beragama Katolik tapi hidup dan besar bersama keluarganya yang beragama Islam. Shalat, Puasa, Haji, Zakat, dan ibadah-ibadah Islam lainnya tidak asing di telinga Celine. Mayoritas keluarga besarnya adalah Muslim.

"Aku terbiasa dari kecil, sekolahku di sekolah Muslim, belajar Al Quran juga termasuk juga belajar agama Katolik dan mengimani Katolik," terangnya.

Celine sempat menceritakan, dirinya dibesarkan dalam kehidupan dua agama. Kakeknya meruoan pejuang Muslim salah satu pemersatu Islam di Indonesia.

Celine merupakan cucu dari tokoh Islam di Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu pahlawan nasional, H Sultani Fadeli Luran, yang adalah anak ulama besar bernama Haji Fadeli Luran.

Haji Fadeli Luran merupakan sosok pengusaha yang dahulu banyak aktif dalam pengembangan Agama Islam. Ia tersohor dikenal sebagai pemersatu umat Islam di wilayah Sulawesi Selatan.

Haji Fadeli dikenal sebagai

sosok cerdas dan memiliki jabatan penting di sejumlah organisasi berbasis Agama Islam.

Diantaranya ia pernah menjadi ketua umum DPP IMMIM yakni Ikatan Masjid Mushalla Indonesia Muttahidah.

Selain itu ia juga pernah menjadi anggota Dewan Penyantun di UINN Alauddin, Unhas, Universitas Makassar, Universitas Muhammadiyah serta Universitas Bosowa.

Di luar itu, Fadeli Luran juga tercatat pernah menjadi anggota DPRD GR Kotapraja Makassar pada 1960an. Berkat ketokohan dan jasanya untuk kemajuan Sulawesi Selatan diabadikan dalam nama jalan di Makassar. ♦



Ragnar Oratmangoen

PEMAIN TIMNAS YANG KARIB DIPANGGIL WAK HAJI

Ragnar merupakan pemain Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Indonesia naturalisasi asal Belanda. Ia cepat populer dan banyak sekali penggemarnya di Indonesia, yang ikut-ikutan memanggilnya dengan sebutan Wak Haji.

Ragnar senang dipanggil Wak Haji, padahal ternyata atlet kelahiran Belanda pada 1998 rupanya terlahir sebagai orang Kristen. Agama Kristen dianutnya hingga ia berusia remaja.

"Saya tidak terlahir sebagai Muslim,"

menambahkan bahwa di dalam Islam, ia mendapatkan pelajaran hidup.

"Bagi saya, hal-hal yang saya pelajari tentang Tuhan," kata pemain Fortuna Sittard ketika awal ia ditarik menjadi pemain Timnas dulu.

"Teman saya juga sering mengajak

- Maluku. Nama Oratmangoen berasal dari marga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Ia mendapat darah Indonesia dari garis keturunan ayahnya.

Ia sudah beristri, namun tak pernah mempublikasikan sosok istrinya. Sikap manis Ragnar Oratmangoen ini menjadi



ucap Ragnar Oratmangoen.

"Saya dibesarkan sebagai seorang Kristen."

"Tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya menemukan jalan ke Islam," katanya

saya ke Masjid saat itu," kata pemain yang bersama istrinya bertekad menjadi pasangan yang religius.

Ragnar Oratmangoen merupakan pemain Timnas Indonesia berdarah Belanda

sorotan banyak orang. Lantaran sosok sang istri yang selama ini kerap disembunyikan mulai terlihat di hadapan publik.

Momen tersebut direkam oleh penonton lain yang videonya diunggah oleh

akun Instagram @liputantimnas.inc pada 12 Juni 2024. Terlihat di sana, Ragnar Oratmangoen berjalan kaki tanpa sepatu menuju tribun penonton.

Ia pun membawa setangkai bunga di tangan kirinya. Ragnar Oratmangoen terlihat mengamati orang-orang di tribun sambil melambaikan tangan. Ia nampak mencari seseorang.

Begitu berada di depan tribun, sosok wanita berambut pirang mendekati Ragnar. Ragnar kemudian meminta penonton lain untuk memberi jalan wanita tersebut.

"Awat, awat, awat," kata Ragnar Oratmangoen kepada penonton lain agar istrinya bisa mendekat.

Pemain di klub Eerste Divisie, FC Groningen ini kemudian memberi setangkai bunga kepada sang istri.

Wanita yang memakai jersey merah Timnas Indonesia bernomor punggung 11 itu langsung mencium tangan sang suami. Ia pun memeluk Ragnar dengan kuat.

Netizen pun ramai-ramai berkomentar, memuji adab mereka berdua yang disebut Islami.

"Masyaallah cium tangan... sweet banget istrinya wak haji," komentar apri-dianne.

"So sweet... Dia bilang 'awat awat awat' minta jalan buat istrinya," ujar anis-fadilah15.

"Pake Salim lagi..kan meleleh yang li-atnya...adem banget pasangan halal satu ini....," kata ny_min_do

"Masya Allah, adab Islamnya sangat melekat," komentar sittimustikhaa.

Dalam sebuah wawancara, Ragnar mengaku menikah dengan istrinya di usia yang muda. Ia dan istrinya adalah pasangan yang religius.

Meskipun memiliki perbedaan usia, tapi rumah tangganya

dibangun untuk kebahagiaan. Ragnar Oratmangoen menceritakan bahwa istrinya selalu memasak makanan untuk dirinya.

Diajak Teman ke Masjid

Ragnar Oratmangoen langsung menarik perhatian publik di Indonesia saat prosesnya untuk menjadi pemain Timnas tahun lalu. Ia mendapat sambutan hangat begitu diketahui memeluk Agama Islam.

Apalagi Ragnar di negaranya Belanda secara lugas memperlihatkan bahwa dirinya Muslim. Artinya, ia minoritas. Tapi status minoritas itu tetap membuat Ragnar bangga menjadi Muslim. Cuplikan videonya berbuka puasa di pinggir lapangan sebelum membela timnya Fortuna Sittard di Liga Belanda saat itu langsung viral.

Pemain kelahiran Oss, Belanda pada 21 Januari 1998 itu bercerita, ia ternyata tidak terlahir sebagai seorang Muslim. Ragnar dididik dan dibesarkan dengan ajaran Kristen, tapi memutuskan untuk memeluk agama Islam pada usia 15 tahun.

"Tidak, saya tidak terlahir sebagai muslim. Saya dibesarkan dalam keluarga kristen. Tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya memutuskan untuk memeluk Islam pada usia 15 tahun," kata pemain bernama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen.

Bagaimana awal kenal Islam? Ia jadi mualaf berawal dari dirinya sering diajak teman-teman ke masjid. Ada ketertarikan yang muncul. Ia pun banyak mengkaji dan mencari sendiri jalan kebenaran pada masa remajanya. Ragnar lantas menemukan hakikat Tuhan dalam Ajaran Islam.

"Bagi saya, hal-hal yang saya pelajari tentang Tuhan. Teman saya juga sering mengajak saya ke masjid saat itu, mereka mengajarkan saya soal Tuhan dan bagaimana agama ini bisa membantu dalam hidup. Itu menyentuh saya dan akhirnya memutuskan untuk menjadi Muslim," kata Ragnar.

Berada di Indonesia ternyata membuatnya terkesan dengan banyak hal. Salah satu yang asing baginya adalah suara lantunan adzan yang dikumandangkan melalui pengeras suara sehingga terdengar saat ia tengah menjalani latihan bersama Timnas Indonesia.

"Ya, saya pertama kali mendengarnya saat di tempat latihan. Saya mendengar adzan saat latihan dan menurut saya itu indah sekali. Saya senang bisa mendengar adzan dan merasakan suasana ini," ujarnya.

Ia juga terkesan dengan suasana bulan suci Ramadhan di Indonesia. Pemain yang baru mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada Senin (18/3/2024), baru pertama kali berada dalam satu tim atau sebuah negara yang mayoritas Muslim.

"Ya ini hal yang bagus, saya sudah dengar bahwa di tim ini banyak yang Muslim, jadi bagi saya ini adalah suasana baru. Biasanya

saya berada di tim yang hanya ada mungkin 2-4 pemain yang menjalankan Ramadhan. Jadi ini adalah hal yang spesial," kata Ragnar. ♦





BIASAKANLAH PAKAI OBAT GENERIK, LEBIH MENGUNTUNGKAN

Biasakanlah Pakai Obat Generik, Lebih Menguntungkan
Jika ada anggapan Obat Generik berkualitas rendah atau tidak mujarab, maka anggapan tersebut salah total. Obat Generik memiliki kandungan dan dosis yang sama dengan obat yang diproduksi oleh pemegang hak paten.

Hal itu terungkap dari penjelasan Ketua Umum PP Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Nofendri Roestam menjelaskan Perbedaan Obat Generik dan Obat Paten dalam keterangan persnya pada gelaran Pharmacist Xperience di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Dijelaskannya bahwa Obat Paten adalah obat yang pertama kali ditemukan oleh seseorang dan biasanya didaftarkan hak patennya. Hak Paten obat ini diberikan kepada orang yang mendaftarkannya itu, dan berlaku selama 15-20 tahun.

Wakatu 10 - 20 tahun itu diberikan kepada pemegang Hak Paten, karena hingga akhirnya obat bisa dipasarkan dan

digunakan itu butuh dana yang tidak kecil, ratusan triliun. Makanya dia dikasih hak paten sekian tahun, hanya dia yang boleh memproduksi obat tersebut selama kurun waktu itu.

Selama Hak Paten itu berlaku, orang yang mempatenkannya memiliki hak monopoli dalam produksi obat tersebut. Bagaimana setelah Hak Paten habis masa berlakunya?

Setelah Hak Paten berakhir, perusahaan farmasi lain dapat memproduksi obat yang sama dengan memperoleh lisensi dari Pemegang Paten. Obat yang diproduksi setelah Hak Patennya berakhir dikenal sebagai Obat Generik.

Obat generik dapat berupa obat ber-

merek, di mana beberapa perusahaan mendapatkan lisensi untuk memproduksi obat dengan nama berbeda.

Meskipun nama merek dapat bervariasi, kandungan Obat Generik harus sesuai dengan spesifikasi Obat Patennya.

Sebagai contoh, jika Obat Paten seperti Panadol memiliki dosis 500 miligram, Obat Generik dengan merek berbeda juga harus memiliki dosis yang sama 500 miligram.

Meskipun Obat Generik seringkali dianggap kurang efektif, pada umumnya, dosis, dan kandungan aktifnya tetap sama dengan Obat Paten, terlebih Obat Generik sudah mendapat izin dari BPOM.

"Sekali lagi, obat saat dapat izin dari



Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) itu dia sudah harus memenuhi kriteria seperti halnya obat-obatan paten yang terregistrasi di BPOM," tandasnya. .

Pasien yang merasa obat generik tidak efektif disarankan untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter untuk mencari alternatif yang sesuai.

Kalau Berobat di Luar Negeri Mau Pakai Obat Generik

OBAT-obat di Indonesia mahal? Presiden Jokowi memerintahkan Menkes Budi Gunadi Sadikin menjadikan harga obat dan alat kesehatan lebih murah di Indonesia, jika dibandingkan dengan luar negeri..

Menyikapi hal tersebut, Tjomo Tjengundoro Ketua Bidang Indus-



tri Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) Jawa Timur mengatakan, sebenarnya harga obat di Indonesia masih tergolong murah. Hanya saja! Obat di Indonesia terlihat jauh lebih mahal

dari negara tetangga karena masyarakat enggan memilih obat generik ketika berobat. Mereka lebih memilih obat jenis inovator, yang harganya jauh lebih mahal.

"Ini juga perkara mindset. Ketika masyarakat Indonesia berobat di luar negeri, mereka tidak masalah jika mendapat obat generik. Tapi saat di Indonesia, mereka tidak mau diberi obat generik dengan alasan kemujaraban," terang katanya.

Tjomo mengatakan, secara kandungan obat generik dan inovator tidak memiliki perbedaan. Obat generik yang dibuat juga sudah memenuhi tiga standar yakni kualitas, keamanan, dan efikasi.

"Salah satu contoh adalah obat kolesterol yang saat ini juga sudah banyak dijual. Meski obat itu adalah generik, secara kualitas mereka juga tidak kalah jauh dari obat inovator," lanjutnya.

Respon Tjomo Tjengundoro pun masih sama ketika ditanya mengenai tata kelola perdagangan yang disebut sebagai salah satu faktor harga obat melambung.

Menurutnya, tata kelola perdagangan obat hingga sampai ke masyarakat, baik melalui apotek ataupun BPJS, sudah dilakukan pemerintah dengan benar. ♦

PUTUSAN MK LANGSUNG MENGUBAH PETA KONTESTASI PILKADA SUMSEL

Selama berbulan-bulan kabar seputar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2024 diramaikan oleh nama-nama pasangan Ir H Mawardi Yahya-Hj RA Noeringhati SH MH atau MATAHATI serta H Herman Deru SH MM-H Cik Ujang atau HDCU.



Ada pasangan lain yaitu Dr Ir H Heri Amalindo MSI-Popo Ali Martopo B.Commerce atau HAPAL. Tapi pasangan ini jarang terpublikasi, karena masih menunggu kepastian komitmen partai-partai politik (parpol) yang akan mendukung.

HAPAL berbeda dengan MATAHATI yang mantap melangkah karena sejak awal yakin mendapatkan dukungan suara cukup dari Partai Gerindra dan Partai Golkar. Juga beda dengan HDCU yang yakin didukung Partai Nasdem dan Partai Demokrat. HAPAL bahkan sempat mengumumkan membatalkan pencalonan, yang kemudian dibantah.

KEJUTAN besar Pilkada Sumsel 2024 terjadi pada Selasa, 27 Agustus 2024, di mana PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan mengusung Cagub dan Cawagub Sumsel Ir H Eddy Santana Putra MT dan Riezky Aprilia atau ERA. Pengumuman itu sekaligus memupus harapan HAPAL untuk maju, karena semua parpol sudah habis.

MATAHATI Paling Gemuk, Diikuti HDCU dan ERA

ERA yaitu Bakal Cagub dan Cawagub Sumsel Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia begitu diumumkan, langsung memutuskan Rabu (28/8/2024), didaftarkan PDIP ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan.

ERA betul-betul lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika berdasarkan UU Pilkada yang lama, PDIP tidak

bisa mengusung pasangan calon tanpa berkoalisi dengan parpol lain. Pasca Putusan MK, PDIP bisa mengusung calon sendiri.

Suara sah PDIP pada Pemilu 2024 sebanyak 543.067 suara sah atau 10,97%, sementara batas minimal syarat adalah 371.188 suara sah. Sendirian PDIP mengusung Pasangan ERA.

"Bisa dikatakan anak tunggal karena hanya diusung PDIP. Saya kira luar biasa perubahan demokrasi saat ini karena kelu-



Bisa dikatakan anak tunggal karena hanya diusung PDIP. Saya kira luar biasa perubahan demokrasi saat ini karena keluarnya Putusan MK kemarin.

arnya Putusan MK kemarin. Suara PDIP sudah cukup untuk memenuhi 7,5% jumlah suara sah," kata Eddy Santana Putra.

Sementara itu HDCU langsung mendaftar ke KPU setelah mendapat dukungan 6 Parpol dan mengantongi 1.619.519 suara sah atau 32,72% untuk mendaftar di KPU Sumsel. HDCU mendapat dukungan dari NasDem, PKS, Demokrat dan Perindo. Kemudian partai non parlemen PBB dan PSI.

Dukungan paling gemuk diperoleh MATAHATI dengan lebih dari 50 persen suara. Matahati telah mendapat dukungan dari 10 parpol, termasuk di antaranya 2 partai non parlemen Gelora dan Garuda. Mereka juga didukung 1 Parpol bukan peserta Pemilu 2024, yakni Partai Prima.

Pengusung MATAHATI ada Golkar yang memiliki jumlah 749.720 suara sah (15,15%), Gerindra 716.413 suara sah (14,48%), PAN 411.711 suara sah (8,32%), PPP 192.097 suara sah (3,88%) dan PKN 49.435 suara sah (1%).

Kemudian PKB 478.691 suara sah (9,67%) dan Hanura 90.297 suara sah (1,82%). Selanjutnya Gelora 43.951 suara sah (0,89%) dan Garuda 13.453 suara sah (0,27%).

Total suara sah atau dukungan milik Matahati dari gabungan Parpol itu sebanyak 2.745.768 suara sah atau 55,48%. ♦



Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Selatan

ADA CALON KETIBAN BERKAH TAPI ADA YANG MENELAN KECEWA

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) hingga di tahapan sekarang berjalan mulus. Namun tidak semua bakal calon yang sudah fixed saat ini sesuai dengan keinginan masyarakat.

Ada calon-calon potensial yang telah digadang-gadang masyarakat sejak jauh-jauh hari untuk dipilih, ternyata tidak bisa maju ke Pilkada 2024. Pahalanya apa? Tidak mendapat dukungan



partai politik, yang konon harganya sangat mahal. Para calon yang memiliki banyak uang bisa memborong dukungan parpol, sehingga calon-calon

yang dananya terbatas tak kebagian apa-apa.

Kendati ada Putusan MK yang memungkinkan calon-calon potensial maju ke Pilkada 2024, tetapi datangnya sudah terlambat. Putusan MK tersebut datang setelah sebagian besar parpol yang bisa mendukung sudah memantapkan dukungan mereka kepada calon-calon tertentu.

Andai saja Putusan MK sudah dibuat lebih awal, tentu takkan ada daerah-daerah yang terpaksa menghadirkan Kotak Kosong. Juga takkan terjadi calon-calon potensial tak bisa maju karena tak dapat dukungan parpol.



Tidak hanya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 ada cerita pihak-pihak yang dikecewakan oleh putusan parpol. Di Pemilihan Bupati juga terjadi. Setidaknya di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Yang Dapat Berkah dan Yang Belum Dapat Kesempatan

Pasangan Calon yang diuntungkan Putusan MK di antaranya Ir H Eddy Santana Putra MT dan Riezky Aprilia atau ERA. Keduanya dicalonkan PDI Perjuangan yang memiliki lebih dari 10 persen suara hasil Pemilu 2024 di Provinsi Sumsel. PDIP sendiri bisa mengusung calon sesuai Putusan MK, karena syarat minimal 7,5 persen suara.

Akan tetapi, keberuntungan yang didapatkan ERA justru jadi petaka bagi Dr Ir H Heri Amalindo MSI dan Popo Ali Martopo B.Commerce (HAPAL). Den-



gan PDIP bisa mengusung calon sendiri, Partai berlambang moncong putih ini urung mendukung Pasangan HAPAL. Akibatnya HAPAL tidak mendapat suara yang cukup untuk mengusungnya di Pilkada 2024.

Tidak hanya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 ada cerita pihak-pihak yang dikecewakan oleh putusan parpol. Di Pemilihan Bupati juga terjadi. Setidaknya di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Drs H Apriyadi Mahmud MSI sudah diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Muba untuk menjadi salah satu Calon Bupati, akhirnya memilih urung mencalonkan diri di Pilkada Kabupaten Muba 2024. Hanya satu parpol yang bersedia mendukungnya tanpa mahar, selebihnya tak mau mengusungnya.

Pengalaman lebih pahit justru dialami mantan Wakil Bupati Muba dua periode sekaligus mantan Bupati

Muba Beni Hernedi. Kader sekaligus Ketua DPC PDIP Musi Banyuasin ini, justru tak dicalonkan oleh parpol yang disetiainya itu.

PDIP memilih mendukung Hj Lucianty di Pilkada Muba 2024, bukan kadernya sendiri Beni Hernedi. Padahal dengan Putusan MK, PDIP bisa memajukan calon sendiri. Fakta ini

membuat kader PDIP di Kabupaten Muba lakukan protes.

Tapi Beni Hernedi dengan tegas dan tegas meminta semua kader untuk menerima dengan legowo keputusan tersebut. Ia juga mengajak kader untuk tegak lurus dengan keputusan yang sudah ditetapkan DPP PDI Perjuangan tersebut. ♦



The Alpha Girls' Guide

BUKU PANDUAN WANITA YANG WAJIB DIBACA PRIA

Buku berjudul Buku The Alpha Girls Guide karya Henry Manampiring ini perlu dibaca oleh perempuan Generasi Z, agar menajai Alpha Female atau Perempuan Alpha. Apa itu Alpha Female?

Alpha Female adalah perempuan yang memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, mempunyai kekuatan dan berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Di dalam ruang lingkup belajar alpha female sering menduduki posisi penting, entah itu di kampus, sekolah, organisasi, atau di kelompok sosial lainnya

Buku ini mengajarkan cara melakukan improve diri untuk menentukan bagaimana berperilaku di lingkungan sekitar. Di antaranya dengan berdisiplin, bekerja keras, belajar secara sungguh-sungguh, dan attitude yang baik.

Jika memiliki semua itu maka status alpha female dapat digenggam karena pengakuan oleh anggota kelompok lain-

JUDUL BUKU:
THE ALPHA GIRLS GUIDE
PENULIS:
HENRY MANAMPIRING
PENERBIT:
GAGAS MEDIA
TAHUN TERBIT:
2015
TEBAL:
259 HALAMAN
ISBN:
978-979-780-954-6

nya walaupun tidak terlahir oleh faktor genetik. Diajarkan menjadi open minded terhadap cara atau tindakan yang dilakukan para perempuan alpha sebagai model.

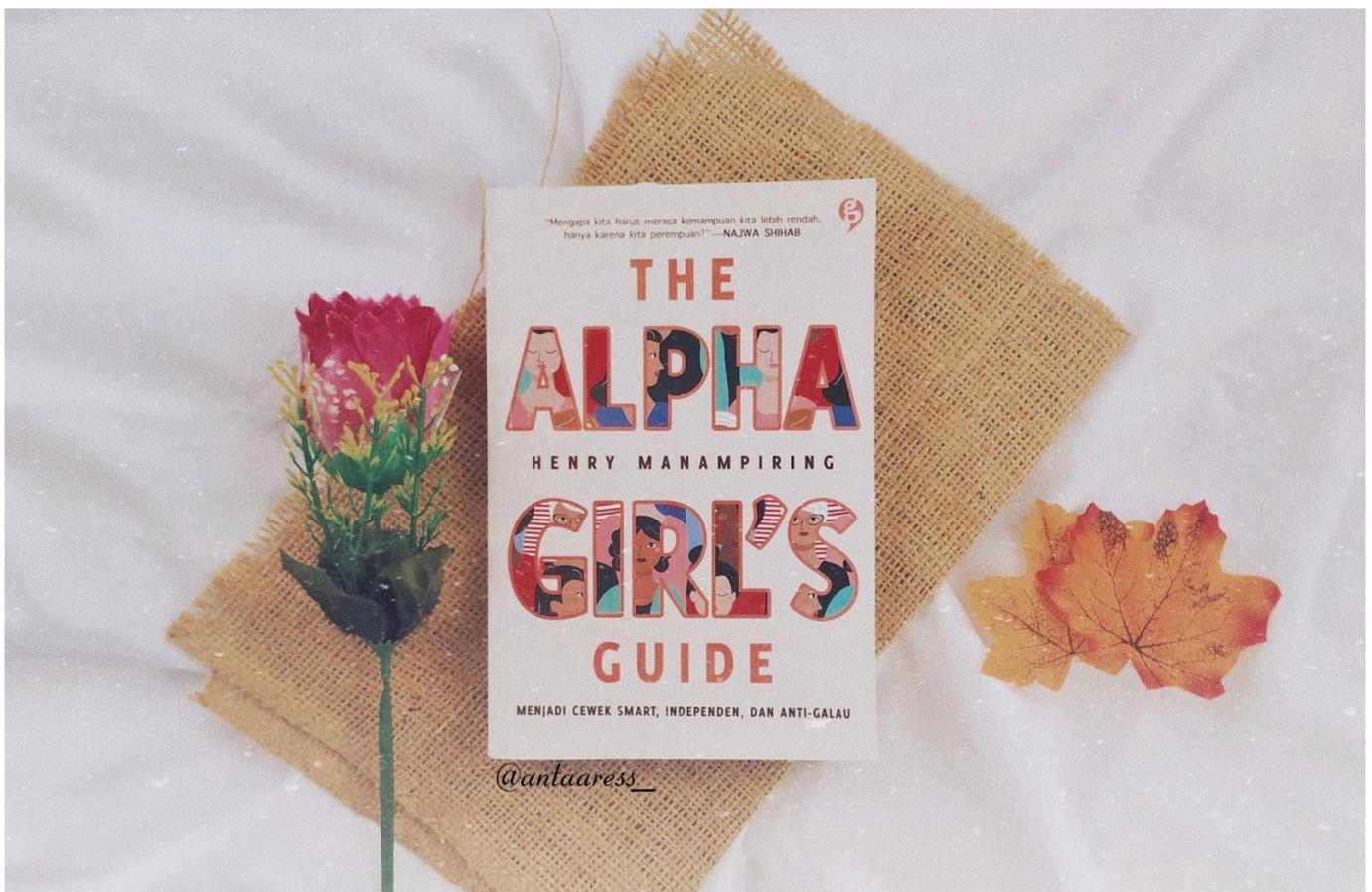
Buku ini mengajarkan antara lain: Pentingnya Pendidikan di Bab Pertama; Relationship termasuk hubungan dengan kekasih dan pekerjaan dibahas pada Bab Kedua dan Ketiga; Ada tentang

indahinya jatuh cinta; Daya tarik serta penampilan di Bab Keenam dan Ketujuh.

Bahwa Perempuan Alpha yang sedang jatuh cinta tetap mengfungsikan akal pikiran, akal harus tetap berjalan bersamaan apalagi merencanakan ke jengjang yang lebih serius yaitu pernikahan, otak harus lebih lantang mengeluarkan pendapat daripada hati, menggunakan akal dalam menentukan pendamping masa depan. Dia pun memastikan dirinya layak menjadi pendamping hidup yang terbaik.

Soal Penampilan, bukan kecantikan fisik yang terpenting. Perempuan yang tampil menarik, justru dipandang cantik. Prinsip Perempuan Alpha: Perempuan cantik belum tentu tampil menarik, tetapi perempuan yang tampil menarik pasti cantik.

Kesimpulan, buku ini penting dibaca oleh semua perempuan. Kaum pria perlu membacanya agar mampu memahami dunia perempuan, terutama Perempuan Alpha. ♦



ANDA INGIN BERLANGGANAN

3 EDISI (3 BULAN) RP 200.000
6 EDISI (6 BULAN) RP 400.000
12 EDISI (12 BULAN) RP 800.000



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

PT. INTER MEDIA DGITAL

**Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750**

TELP 021-791 96781

FAX 021-791 96786

EMAIL :

moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :

moeslimchoice

TWITTER :

@moeslimchoice

YOU TUBE CHANNEL:

moeslimchoice tv

KISAH LELAKI TAAT YANG TERJERUMUS DOSA GEGARA SEGELAS KHAMAR

Dalam Islam, larangan minum minuman keras merupakan salah satu aturan yang sangat tegas. Minuman keras didefinisikan sebagai minuman yang bisa menghilangkan akal dan kesadaran, serta bisa merusak kesehatan seseorang.

Oleh karena itu, Islam melarangnya dengan sangat tegas, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, yang memang benar-benar dibutuhkan, seperti untuk pengobatan, dengan syarat harus dilakukan atas resep dan ketentuan dari dokter yang ahli tentang hal tersebut.

Minuman keras, selain bisa merusak akal dan kesehatan, juga dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali diri, membuatnya rentan terhadap perbuatan dosa dan kesalahan.

Oleh sebab itu, umat Islam dilarang untuk mengonsumsi minuman yang bisa memabukkan, sebagai bentuk menjaga kesucian akal, tubuh dan jiwa.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan, bahwa minuman keras merupakan induk dari semua perbuatan dosa, sehingga umat Islam harus menjauhinya.

Riwayat ini berasal dari sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda: "Jauhilah oleh kalian minuman khamar, karena ia adalah pangkal dari segala kejelekan." (HR al-Baihaqi).

Berkaitan dengan hadits tersebut, terdapat suatu kisah yang sangat penting untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua, yaitu tentang seorang laki-laki taat yang terjerumus dalam perbuatan dosa, karena meminum minuman keras.

Kisah ini sebagaimana dicatat oleh Imam Majduddin Abus Sa'adat bin Muhammad al-Jazari Ibnul Atsir, dalam kitab Jami'ul Ushul fi Ahaditsir Rasul, jilid V, halaman 103.

Dilansir dari NU Online, dikisahkan, pada zaman dahulu terdapat seorang laki-laki yang dikenal sebagai sosok pribadi yang taat dan sholeh. Ia sangat rajin menjalankan ibadah, bersosialisasi dengan baik kepada sesama, dan selalu patuh dalam mengikuti ajaran agama. Ia merupakan seorang yang ditokohkan, dan masyarakat tidak pernah melihatnya melakukan sebuah kesalahan. Karena kesholehan dan kebaikannya, ia banyak dicintai oleh masyarakat dari lintas kalangan, termasuk juga wanita pelacur yang hidup dekat dengannya saat itu.

Hingga suatu saat, wanita pelacur tersebut mengutus seorang budak untuk mengundang dan memanggilnya agar bersedia menjadi saksi.

Budak itu berkata kepada laki-laki taat tersebut, "Sesungguhnya aku memanggil engkau untuk menjadi saksi."

Atas dasar undangan sebagai saksi tersebut, maka berangkatlah ia bersama dengan budak wanita yang mengundangnya. Sementara wanita pelacur bersiap-siap di rumahnya untuk menyambut kedatangan laki-laki yang dicintainya itu.

Ketika laki-laki taat tersebut, sampai di rumah yang dituju, ia masuk seorang diri tanpa didampingi sang budak, yang di



dalamnya sudah ada wanita pelacur untuk menunggu kedatangannya.

Namun ketika lelaki taat itu sudah ada di dalam, wanita pelacur tersebut langsung mengunci pintu rumahnya. Di dalam rumahnya, ia hanya berhadapan dengan wanita pelacur yang cantik dan di sampingnya terdapat anak kecil dan botol minuman berisi khamar.

Lantas wanita itu berkata: "Demi Allah, aku memanggilmu bukan untuk bersaksi, tetapi untuk bersetubuh denganku, atau membunuh anak kecil ini, atau meneguk segelas khamar."

Dari tiga pilihan tersebut, laki-laki taat itu memilih untuk meminum khamar saja. Pilihan itu bukan tanpa alasan, karena baginya, khamar adalah dosa yang paling ringan dari yang lain, sebab kaitannya hanya berdosa kepada Allah saja, sehingga bisa diampuni dengan bertobat dan meminta ampunan kepada-Nya.

Berbeda dengan dosa membunuh seorang anak kecil yang tidak bersalah dan melakukan perbuatan zina, sehingga ia

memilih khamar dari tiga pilihan yang ada.

Namun, sebagaimana disebutkan pada hadits Rasulullah SAW, bahwa minuman keras merupakan induk dari segala perbuatan dosa. Dan benar saja, setelah ia meminum segelas khamar saat itu, ia tidak hanya mabuk, namun juga melakukan zina dengan wanita pelacur yang cantik itu, hingga akhirnya ia juga membunuh anak kecil yang tidak bersalah tersebut, "Tuangkanlah untukku khamar ini pada satu gelas, kemudian wanita itu menuangkannya segelas. (Setelah meminumnya) laki-laki itu berkata, 'Tambahlah untukku,' maka tidak lama kemudian ia melakukan zina dengannya dan membunuh anak kecil tersebut."

Dari kisah ini, dapat diambil hikmah perihal betapa pentingnya menjauhi segala minuman-minuman keras, yang bisa memabukkan dan merusak akal.

Bayangkan, dalam kisah ini, laki-laki taat memilih untuk meminum segelas khamar, tujuannya tidak lain, selain agar

terhindar dari perbuatan dosa zina dan membunuh anak kecil yang tidak berdosa, namun nyatanya, segelas khamar itulah yang justru menjerumuskannya melakukan perzinaan dan pembunuhan.

Oleh sebab itu, Rasulullah mengingatkan kepada kita sebagaimana hadits, untuk benar-benar menjauh dan menghindari dari minuman khamar dan segala minuman yang memabukkan, karena minuman tersebut akan menjerumuskan setiap orang pada segala pintu perbuatan dosa.

Oleh karena itu, marilah jadikan pelajaran perihal pentingnya menjaga diri dari godaan dan mengendalikan diri dalam menghadapi cobaan. Minuman keras merupakan salah satu bentuk godaan yang bisa menjerumuskan seseorang untuk melanggar ajaran Islam dan melakukan perbuatan dosa.

Kisah ini juga mengajarkan betapa pentingnya untuk tetap teguh pada prinsip dan nilai-nilai ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW perihal betapa bahayanya minuman keras. ♦



JAGA KESEHATAN ALA KIAI MUSTOFA BISRI DAN MARTIN VAN BRUINESSEN

OLEH HAMZAH SAHAL
Penulis Buku "Humor Ngaji Kaum
Santri (2004)" dan "Ulama Bercanda
Santri Tertawa (2020)"



Masyarakat Indonesia pasti ada yang kenal Martin van Bruinessen, Indonesianis yang paling lama saat ini. Sudah 42 tahun pria asal Belanda itu meneliti Indonesia dengan tema utama keislaman.

Di Indonesia, khususnya di Jawa, Pak Martin banyak berkunjung ke pesantren dan mengenal kiai-kiai, yang saat ini sudah senior mungkin sebagian besarnya kiai-kiai sudah wafat. Mengapa banyak mengenal kiai? Sebab penelitian dia terkait keislaman, pesantren, tarekat, kitab kuning, dan tema-tema yang terkait dengan keahliannya sebagai antropolog.

Dalam obrolan sebelum syuting, salah satu yang disebut Pak Martin adalah Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus. "Yaa, saya tahu Yahya, mengenal sedikit abahnya, yang pasti saya mengenal Gus Mus," begitu jawaban Pak Martin ketika ditanya tentang keluarga Pesantren Leteh, Rembang.

Gus Mus memang terlihat akrab dengan Pak Martin, beberapa kali posting kedekatannya, seperti posting foto. Untuk keperluan catatan ringan ini, saya chat Abah, begitu saya menyebut namanya dalam sudah lebih dari 5 tahun terakhir ini— sudah sepuh loh, rasanya tidak pantas saya menyebut 'gus' terus. Saya WA beliau pukul 14.36 (11 Juni 2024). Alhamdulillah beliau merespons, pukul 23.14.

"Sering ketemu Pak Martin. Malah beliau pernah ke rumah dan saya ajak ke (pesantren) Kiai Syahid Kemadu yang dikenal juga dengan Kiai Alhamdulillah," begitu beliau merespons chat saya, "foto ini ketika sama-sama jadi narasumber di Belanda."

Saya chat antara lain mengirimkan foto Abah dan Pak Martin.

Setelah itu, pukul 23.27, Abah WA agak panjang. Saya kutip lengkap: "Pak Martin tak takoni (saya tanya), di antara narasumber dalam buku Anda, Anda menyebut nama Kiai Syahid Kemadu. Apakah itu wawancara langsung atau dari buku, saya tanya apa tidak ingin ketemu beliau. Pak Martin senang sekali ketika ketemu Kiai Syahid dan kaget mendengar pertanyaan beliau tentang bagaimana negeri tuan (Martin: Belanda) mengelola sampah."

Saya hobi menjajaki berbagai jenis makanan, saya melontarkan pertanyaan tentang makanan. Emmm.. Pertanyaan sepele mungkin, tetapi saya pikir tidak mungkin Pak Martin melewati 42 tahun bolak-balik Belanda-Indonesia dan tinggal dalam waktu lama jika jenis makanannya tidak cocok.

"Tadi siang saya makan gado-gado. Biasa juga makan soto ayam," begitu penulis buku "Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat". Tentang NU, Martin menulis antara lain, Perjuangan Meraih Kekuasaan dan Keprihatinan Sosial: Catatan Mukhtamar Krapyak 1989.

Soal makanan Pak Martin mengatakan tergantung tempatnya. "Apakah kalau di Surabaya suka makan rawon?" aku bertanya agak mengejar.

Jawabannya bikin kaget. Kurang lebih beliau menjawab begini, "Kalau makan saya hati-hati sekali, tidak sembarangan

makan daging sapi. Saya tidak ingin mati muda seperti banyak kiai, karena sembarangan makan.”

Siang itu, Sabtu 8 Juni 2024, saya dan Nurman Hakim merasa bersalah sewaktu menjemput Pak Martin di Hotel Indonesia. Bundaran HI ditutup. Ketika berputar lagi, ditutup lagi. Karena sudah lama, Pak Martin berinisiatif menyeberang, jalan kaki, dari Hotel Indonesia menuju Jalan Imam Bonjol seberangnya Hotel Mandarin. Kami betul-betul merasa bersalah, orang sepuh jalan kaki siang bolong di pusat Jakarta yang panasnya sedang memuncak, jalanan padat, dan berdebu.

Tidak lama lagi, umur Martin van Bruinessen 78 tahun. Beliau dilahirkan di Scoonhoven Belanda 10 Juli 1946. Terus beraktivitas, bahkan melakukan hal-hal serius hingga hari ini. Sepertinya riset juga menjadi motivasi berikhtiar sehat terus. Ikhtiarnya menjaga kesehatan memang luar biasa, saya pernah menyaksikan be-

liau berenang, di sela-sela acara Harlah NU, Februari 2023.

Menggelitik pernyataan Pak Martin, “Saya tidak ingin mati muda seperti banyak kiai, karena sembarangan makan”. Memang benar, banyak kiai makan sembarangan dan tidak menjaga kesehatan. Selain itu, kita tahu, banyak kiai yang wafat karena kecelakaan.

Namun, nama kiai yang saya sebut di atas adalah kekecualian kiai yang disebut Pak Martin tidak menjaga kesehatan. Ya, Abah Mustofa Bisri adalah kekecualian. Beliau terbilang masih bugar dan masih menjalankan aktivitas sebagai kiai, guru, mubaligh, seniman, senior NU. Beliau dilahirkan di Rembang 10 Agustus 1944. Artinya, 2 bulan lagi, umurnya genap 80 tahun.

Abah punya ikhtiar keras dalam menjaga kesehatan. Beliau rajin sekali jalan kaki, memutari alun-alun Rembang tiap pagi. Sampai sekarang. Ketika saya dan teman-

teman NU Online sowan, juga untuk keperluan wawancara, tanggal 10 Februari 2024, Gus Mus masuk rumah dengan berpakaian olahraga, sepatu, celana trenyeng, kaus, lengkap dengan topi. Ya, beliau baru selesai jalan pagi.

Bedanya dengan Pak Martin yang menjaga betul tidak sembarangan makan daging merah, Abah Mustofa masih makan daging kambing. Beliau pernah menginformasikan kepada saya di Peka-longan ada gulai kepala kambing langganannya, jika sedang di Jakarta jarang melewatkan makanan Timur Tengah, yang pasti kambingnya atau yang berlemak tinggi lainnya.

Akhir Mei kemarin, saya sowan beliau bersama istri dan bapak mertua, yang kebetulan bertemu rombongan keluarga Pesantren Krapyak, sajiannya bikin bulu kuduk berdiri: udang, sate srepeh, ikan sembilang bersantan, tempe goreng, dan tak ketinggalan sambal. ♦nuonline





KOTAK KOSONG LANTARAN TIADA LAWAN

Sejauh ini tercatat 43 pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Kotak kosong tak terhindarkan.

Jauh-jauh ke Sorong, Papua Barat. Di sanalah Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengemukakan masih 48 (belakangan berkurang menjadi 43) daerah di Indonesia yang hanya memiliki satu pasangan calon (paslon) atau calon tunggal pada Pilkada serentak yang terjadwal berlangsung pada Rabu, 27 November 2024.

"Dari 37 provinsi hanya ada satu yang hanya memiliki satu pasangan calon. Ya di Papua Barat ini," kata Idham, Kamis, 29 Agustus 2024.

Menurut dia, hampir seluruh partai politik di Papua Barat, mencalonkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani.

Idham mengemukakan, pasangan tersebut didukung oleh 17 partai politik, dan hanya satu parpol yang tidak memberikan

dukungan. "Calon gubernur Ketua DPW Partai NasDem, sedangkan wakilnya Ketua DPD Partai Gerindra," ujarnya.

Secara keseluruhan, sambungnya, di tingkat kota/kabupaten, dan provinsi jumlah pasangan calon tunggal terdapat di 48 daerah dengan rincian 42 tingkat kabupaten, lima kota, dan satu provinsi. Idham menambahkan, selama tiga hari dibukanya pendaftaran yaitu dari tanggal 27-29 Agustus terdapat sebanyak 1.518 bakal pasangan calon kepala daerah yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024.

Ia merinci bahwa provinsi yang menggelar Pilkada serentak 2024 berjumlah 37 provinsi dengan jumlah pendaftar sebanyak 101 pasangan calon. Sedangkan untuk tingkat kabupaten lanjut Idham, dari 415 daerah penyelenggara pilkada totalnya terdapat 1.133 pasangan calon. Sementara untuk tingkat kota terdapat 93 dengan jum-



lah 277 pasangan.

Idham memastikan pula, selama proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang berlangsung tiga hari berjalan dengan lancar dan tanpa ada gesekan yang berarti. "Semua dapat tertangani walaupun memang di beberapa daerah sempat ada kendala. Terutama persoalan administrasi misalnya formulir model B parpol datangnya terlambat," katanya.

Kedatangan Idham ke Sorong bertujuan memonitor pelaksanaan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya, dan semua dipastikan telah siap. KPU RI memastikan

kan, KPU Papua Barat Daya telah mempersiapkan pendaftaran bakal pasangan calon dengan baik, meskipun ini merupakan penyelenggaraan Pilkada yang pertama di daerah itu.

Idham menjelaskan bahwa monitoring yang dilakukannya ke daerah itu untuk memastikan semua proses penyelenggaraan pilkada serentak berjalan sesuai dengan semestinya. KPU RI pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini, tambahnya, berwenang untuk melaksanakan monitoring di semua daerah di Indonesia, guna memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu baik dan lancar.

Ternyata -

ta, di Sorong pula ada kotak kosong.

Sepulang dari Sorong Idham Holik mengatakan masa pendaftaran bakal calon kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang hanya memiliki satu pasangan calon diperpanjang pada 2-4 September 2024. Dalam sesi jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, ia mengatakan KPU daerah bakal kembali menggelar sosialisasi untuk menarik minat warga mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah pada 30 Agustus sampai 1 September 2024.

"KPU provinsi, kabupaten, kota yang hanya ada calon tunggal dan masih tersisa partai politik yang belum bisa mengajukan pasangan calonnya maka dipersilakan untuk melakukan pendaftaran. Partai politik yang dimaksud sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2024," kata Idham.

Sedangkan Ketua KPU Mochamad Afiduddin mengemukakan, dalam periode pendaftaran bakal calon kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, pada 27-29 Agustus 2024, ada 1.518 bakal calon kepala daerah yang mendaftar ke KPU daerah masing-masing.

Dari jumlah itu, sebanyak 51 bakal pasangan calon mendaftar ke KPU melalui jalur



independen atau tanpa dukungan partai politik, sementara 1.467 bakal pasangan calon didukung partai politik atau gabungan parpol.

Untuk pasangan calon tunggal yang nantinya bertarung melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024 harus memperoleh suara 50 persen lebih untuk dapat ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih. Dengan begitu, jika ada calon tunggal yang perolehan suaranya tidak mencapai 50 persen lebih dari total jumlah pemilihnya, maka selama periode pemerintahan sampai akhirnya pilkada berikutnya daerah itu dipimpin oleh penjabat sementara (Pjs).

"Sekiranya pasangan calon tunggal

atur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Jika, paslon tunggal ternyata tak juga mencapai 50 persen suara pemilih atau kalah melawan kotak kosong, Idham mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 D ayat 3 ada Pilkada ulang yang dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau sesuai jadwal lima tahun sekali. "Jika nanti diselenggarakan di tahun berikutnya berarti pemilihan akan diselenggarakan pada November 2025," kata Idham.

kan," kata Idham.

Menurut dia, kesempatan itu diberikan karena KPU berkomitmen mendorong daerah-daerah agar tidak ada calon tunggal selama proses pencalonan pada Pilkada 2024. "Tetapi, kalau sampai batas masa perpanjangan pendaftaran, tetap satu paslon atau calon tunggal, yang mana parpol yang belum mendaftar tersebut dan tidak memenuhi ambang batas, ternyata tidak bisa daftar, itu tidak masalah," kata Idham.

Alasannya, berbeda dengan pemilihan presiden (pilpres). Pada Pilkada, sambungannya, partai politik yang tidak mengusung bakal pasangan calon kepala daerah tak mendapatkan sanksi seperti untuk Pilpres.

Kemudian, langkah lainnya untuk mengatasi calon tunggal, Idham menyebut KPU juga mempersilakan pasangan calon perseorangan, yaitu mereka yang menggunakan jalur independen untuk mendaftar. "Di masa perpanjangan ini (calon perseorangan) bisa mendaftar. Jadi, Pasal 135 (PKPU Nomor 10 Tahun 2024) mengatur kondisi yang demikian," kata Idham.

Apapun, di mata Pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Angraini, fenomena calon tunggal Pilkada berpotensi menurunkan kepercayaan publik kepada partai politik. Partai politik, sambungannya, semestinya menominasikan calon kepala daerah dan menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik.

"Partai politik sebagai institusi kaderisasi, rekrutmen politik, yang menjadi bagian instrumen demokrasi yang negara berikan otoritas untuk merebut kekuasaan tetapi itu justru tidak dimanfaatkan, bisa-bisa justru masyarakat makin tidak percaya atau apatis kepada partai politik," kata Titi dalam diskusi The Constitutional Democracy Initiative (CONSID) di Jakarta.

Selain itu, menurut Titi, calon tunggal juga bisa menumbuhkan sikap apatis karena masyarakat merasa tidak punya pilihan yang memfasilitasi praktik demokrasi secara optimal. "Mereka bisa merasa bahwa pilkada tidak menjanjikan kompetisi. Akhirnya, mereka apatis, pragmatis, tidak mau datang ke TPS (tempat pemungutan suara), dan tidak mau ambil peran," ujarnya.

Meski demikian, Titi berpendapat, calon tunggal di kelompok masyarakat yang dinamis justru menciptakan keaktifan untuk menunjukkan perlawanan politik, yakni dengan mendukung kotak kosong alih-alih calon tunggal. "Misalnya di Kota Pangkalpinang. Ketika calon tunggal mendaftar, ditandingi dengan masyarakat yang mengantarkan pendaftaran kotak kosong ke KPU Kota Pangkalpinang," kata Titi mencontohkan. ♦



tidak memenuhi syarat ketentuan untuk dinyatakan terpilih, yaitu dengan ketentuan memperoleh suara sah lebih dari 50 persen, ternyata tidak melampaui batas ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka akan diadakan pemilihan pada pemilihan selanjutnya. Kapan pemilihan selanjutnya? Yaitu pada 2029," kata Idham

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu mengatur Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sedangkan ketentuan mengenai penjabat sementara, Idham menyebut itu di-

Apakah masih bisa mengurangi jumlah paslon tunggal? Idham Holik menjelaskan ada beberapa langkah untuk mengatasi calon tunggal, antara lain memberi kesempatan bagi partai politik mengatur ulang komposisi dukungannya, sehingga ada bakal pasangan calon lain yang mendaftar selama masa pendaftaran diperpanjang pada 2-4 September 2024.

"Di satu wilayah dengan calon tunggal menyisakan partai politik yang tidak melampaui ambang batas perolehan suara sah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan maka kami persilakan partai politik yang telah bergabung ke dalam calon tunggal untuk berpikir ulang, apakah dia bakal mengusung calon lainnya, itu kami persila-

DAFTAR DAERAH DENGAN PASANGAN CALON TUNGGAL PILKADA SERENTAK 2024;

Pemilihan Gubernur:
Papua Barat

Pemilihan Bupati dan Wali Kota:
Aceh:
Kabupaten Aceh Utara
Kabupaten Aceh Tamiang

Sumatera Utara:
Kabupaten Tapanuli Tengah,
Kabupaten Asahan,
Kabupaten Pakpak Bharat,
Kabupaten Serdang Bedagai,
Kabupaten Labuhanbatu Utara,
Kabupaten Nias Utara.

Sumatera Barat:
Kabupaten Dharmasraya

Jambi:
Kabupaten Batanghari.

Sumatera Selatan:
Kabupaten Ogan Ilir
Kabupaten Empat Lawang

Bengkulu
Kabupaten Bengkulu Utara

Lampung:

Kabupaten Lampung Barat,
Kabupaten Lampung Timur,
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kepulauan Bangka Belitung:
Kabupaten Bangka,
Kabupaten Bangka Selatan,
Kota Pangkal Pinang

Kepulauan Riau:
Kabupaten Bintan.

Jawa Barat:
Kabupaten Ciamis.

Jawa Tengah:
Kabupaten Banyumas,
Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Brebes.

Jawa Timur
Kabupaten Trenggalek,
Kabupaten Ngawi,
Kabupaten Gresik
Kota Pasuruan
Kota Surabaya.

Kalimantan Barat:
Kabupaten Bengkayang.

Kalimantan Selatan:
Kabupaten Tanah Bumbu
Kabupaten Balangan

Kalimantan Timur:
Kota Samarinda

Kalimantan Utara:
Kabupaten Malinau
Kota Tarakan.

Sulawesi Utara:
Kabupaten Kepulauan Siau, dan Tagulandang Biaro (Sitaro)

Sulawesi Selatan:
Kabupaten Maros

Sulawesi Tenggara:
Kabupaten Muna Barat

Gorontalo
Kabupaten Pohuwato.

Sulawesi Barat:
Kabupaten Pasangkayu

Papua Barat:
Kabupaten Manokwari
Kabupaten Kaimana. ♦





1 BULAN SAJA UNTUK PANSUS ANGKET HAJI

Panitia Khusus Angket Haji DPR yang terbentuk pada awal Juli 2024 baru dapat bekerja sekitar 40 hari kemudian. Dalam sebulan, katakanlah pertengahan September 2024, Pansus harus menyelesaikan tugasnya.

Satu bulan bukanlah waktu yang panjang untuk Pansus Angket Haji DPR. Namun, begitulah. Masa kerja DPR periode 2019-2024 akan berakhir sebelum pelantikan Anggota DPR periode 2024-2029 yang terjadwal pada 1 Oktober 2024.

Mulai bergulir pada Senin, 1 Juli 2024, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyatakan bersepakat segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 usai mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan haji musim ini. "Kita ingin segera dibentuk pansus angket menyangkut pelaksanaan detail dari ibadah Haji 2024," kata Ketua Timwas Haji Abdul Muhaimin Iskandar yang juga Wakil Ketua DPR di awal Juli 2024 itu

pada 21 Juni-22 Juli 2024.

Toh sejak awal, Timwas sudah menyoroti penambahan kuota haji Indonesia menjadi 241 ribu sebagai tantangan bagi penyelenggara haji 2024. "Yang kedua, jumlah tambahan kuota baru yang diberikan oleh Saudi sejumlah 20 ribu jamaah baru ini hendaknya digunakan dengan amat sangat sungguh-sungguh, tidak ada permainan, sehingga penambahan ini tidak membuat kecemburuan jamaah-jamaah yang sudah mengantre begitu lama. Di satu sisi pelayanannya tetap optimal dan memberi keamanan dan kenyamanan para jamaah," kata Gus Muhaimin.

Begitulah, dalam perkembangan selanjutnya, Gus Muhaimin menyebutkan, ada kecurigaan di masyarakat mengenai dis-

Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (pansus)," katanya di Mekkah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024.

Ia mengatakan, beberapa kasus yang terjadi pada penyelenggaraan haji 2024 merupakan pengulangan tiap tahun yang kemudian lenyap ketika evaluasi atau tidak ditindaklanjuti. "Pansus ini penting untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji berikutnya," ujarnya.

Namun, tindak lanjut pembentukan Pansus itu terkendala oleh waktu dan soal teknis. Kendala waktu adalah masa reses yang berlangsung tiga hari setelah pengesahan pembentukannya. Pada masa reses, lazimnya tak ada persidangan atau rapat, digantikan dengan kunjungan ke daerah pemilihan atau acara di luar gedung par-



Membersamai penyelenggaraan haji 2024, DPR memberangkatkan 40 anggota Timwas Haji 2024. Timwas Haji terdiri dari dua orang pimpinan DPR, 28 anggota Timwas Haji dari Komisi VIII, dan 10 anggota Timwas Haji dari Komisi/badan terkait. Timwas DPR diketuai Gus Muhaimin --panggilan ringkas Wakil Ketua DPR, berangkat dalam dua tahap. Tahap I pada 6 Juni dan tahap II pada 9 Juni 2024.

Inisiatif pembentukan Pansus ini memang muncul sebelum penyelenggaraan haji selesai. Sedangkan jamaah haji Indonesia mulai berangsur pulang ke Tanah Air

tribusi kuota visa yang dianggap tidak adil. Kecurigaan itu terkait distribusi kuota untuk antrean haji reguler yang digunakan travel-travel tertentu berbasis haji khusus atau yang dikenal sebagai haji furoda (mandiri).

Lebih lanjut, Gus Muhaimin menyoroti berbagai masalah terkait penyelenggaraan haji 2024 agar segera ditindaklanjuti. Dia mengungkapkan pula, hampir semua masalah yang ditemukan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah transportasi, katering, dan tenda bagi jamaah. "Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan

lemen untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Masa reses kali ini berlangsung antara 12 Juli hingga 15 Agustus 2024 disusul sidang paripurna berikutnya menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi, 17 Agustus. Alhasil, rapat perdana untuk memilih pimpinan Pansus Angket Haji pun tertunda.

Semula rapat itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 17 Juli 2024. Jadwal ulang rapat diagendakan lagi pekan depan. "Ya ditunda sementara karena faktor teknis sambil memberi kesempatan reses satu minggu di dapil. Insya Allah minggu depan

kita rapat perdana,” kata Anggota Pansus Angket Haji DPR Luluk Nur Hamidah.

Sebelumnya, anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Wisnu Wijaya Adi Putra sudah mengkonfirmasi akan ada rapat perdana yang ternyata tertunda itu. Wisnu mengungkapkan, Pansus juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan DPR untuk menggelar rapat dalam masa reses.

“Sudah dari Ibu Puan (Ketua DPR Puan Maharani), sudah tanda tangan. Sudah terbit juga berita acara terkait pembentukan pansus angket haji,” ungkap Wisnu.

Toh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Pansus Angket

Angket Haji oleh DPR.

Gus Yahya meyakini masyarakat pun juga tidak melihat ada permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. “Ya kami melihatnya enggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini. Dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi,” ujarnya dalam jumpa pers di sela acara Rapat Pleno PBNU yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu, 28 Juli 2024.

Dalam kesempatan itu Gus Yahya mengatakan, ada banyak jemaah haji asal Indonesia yang bisa ditanya mengenai pengalaman selama berhaji di tahun 2024 ini. Menurut dia, jika diperlukan, dibuat saja

asi konflik yang menyiratkan ketegangan hubungan antara kedua organisasi dalam beberapa waktu terakhir.

Untuk itu dia telah menugaskan Wakil Rais Aam Kiai Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni untuk mendalami masalah tersebut. Mereka nantinya akan memberikan rekomendasi sebelum keputusan resmi diambil.

“Kita lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut mendalami masalah ini, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU, mengenai langkah-langkah yang harus diambil,” kata Staquf.

Toh proses Pansus Angket Haji berlanjut



Pengawasan Haji 2024 baru bisa bekerja pada masa sidang selanjutnya atau setelah 16 Agustus 2024 karena sedang memasuki masa reses sejak 11 Juli 2024. “Kemarin karena sudah keburu reses, itu belum berjalan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.

Menurut Dasco putusan Pansus melanjutkan proses pada masa sidang berikutnya berdasarkan Rapat Pimpinan (Rapim) DPR. Selain itu, sambungnya, juga Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Masih dalam rangkaian proses pembentukan Pansus Angket Haji, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengeluarkan pernyataan tidak ada masalah pelaksanaan ibadah haji 2024 yang menjadi alasan cukup untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak

survei terkait kepuasan penyelenggaraan haji 2024, dengan respondennya yaitu jemaah itu sendiri.

Ia pun menduga Pansus Haji, yang turut didorong oleh Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR Gus Muhaimin sebenarnya ingin mengincar dirinya melalui adiknya, Menteri Agama (Menag) Yaquut Cholil Qoumas. “Makanya itu kami juga, gara-gara marah kepada PBNU, terus adik saya diincar apa bagaimana kan begitu sih. Kita enggak tahu, kita lihat saja nanti bagaimana ya,” ucap Gus Yahya.

Nah, dalam konteks Rapat Pleno PBNU, salah satu poin rekomendasi hasil rapat Pleno, Gus Yahya mengemukakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu akan mengkaji ulang hubungan NU dengan PKB. Langkah itu dilakukan menyusul nar-

ragi setelah masa reses Juli 2024 berakhir dengan masa persidangan berikutnya. Gus Muhaimin mengemukakan Pansus Angket Haji 2024 akan mulai bekerja lagi.

“Insha Allah pada hari Senin akan mulai kerja Pansus Haji,” kata Cak Imin ditemui usai mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Ia mengemukakan Pansus Angket Haji 2024 merupakan pansus monumental yang digulirkan DPR. “Setiap pidato Mbak Puan (Ketua DPR RI Puan Maharani) ‘kan selalu mengangkat ini, sudah dua kali pidato karena memang itu produk yang paling monumental,” ucapnya.

Memang, dalam sidang tahunan MPR, DPR dan DPD yang juga dihadiri Presiden

Joko Widodo itu, Ketua DPR Puan Maharani memamerkan bahwa DPR telah menggunakan hak angket untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 sejak 10 Juli 2024. Puan mengemukakan, Pansus Haji dibentuk untuk mengungkap berbagai masalah terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

"Secara khusus, DPR RI menggunakan hak angket atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, yang banyak menimbulkan berbagai masalah pelaksanaan Haji pada tahun 2024," ungkap Puan yang berbalas tepuk tangan meriah dari para anggota parlemen yang hadir saat itu.

Setelah itu, Puan meminta komitmen pemerintah untuk mendukung kerja-kerja DPR. Ia berharap pemerintah bisa menindaklanjuti masukan DPR yang sudah



Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (pansus),"

disepakati dalam rapat resmi. "Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya," ungkap Puan yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Pansus Angket Haji 2024 dibentuk DPR, sambungnya, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan haji. "Ini adalah pansus kebanggaan DPR karena baru kali ini ada angket yang menjadi hak kontrol DPR," kata dia.

Proses pun berlanjut dengan kesepakatan antara Pansus Angket Haji DPR RI dan Pimpinan DPR RI untuk mengangkat Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar menjadi Ketua Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI melalui pemilihan secara musyawarah mufakat.

"Saudara Nusron Wahid jadi Ketua Pansus Angket Haji," kata Wakil Ketua DPR RI Gus Muhaimin yang memimpin rapat perdana pansus tersebut dengan agenda pemilihan dan penetapan ketua di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Muhaimin mengatakan terbentuknya pansus itu merupakan sejarah karena selama 10 tahun terakhir tidak ada pansus hak angket di DPR RI.

Selain menetapkan Nusron, Muhaimin juga menetapkan tiga orang Wakil Ketua Pansus Angket Haji, yakni Marwan Dasopang dari Fraksi PKB, Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP, dan Ledia Hanifah dari Fraksi PKS.

Dia mengatakan pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu sesuai dengan Pasal 105 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan pimpinan pansus meru-

pansus tersebut memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena pansus tersebut mendapatkan kewenangan yang luar biasa dan aktivitasnya dilindungi oleh undang-undang. "Gunakan waktu sebaik-baiknya. Kita cuma punya waktu satu bulan, tidak punya waktu lagi," ujarnya.

Menurut dia, pansus itu perlu menghasilkan produk evaluasi manajemen penyelenggaraan haji yang lebih baik. Pasalnya, dia menilai sejauh ini penyelenggaraan haji selalu memiliki permasalahan setiap tahunnya. "Pansus ini fondasi agar Menteri Agama yang akan datang betul-betul menjadikan rekomendasi pansus ini



pakan satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegal. "Jadi saya harap tidak usah sebut ketua, karena semuanya sama, dalam hal kolektif kolegal," kata dia.

Setelah terpilih, Gus Muhaimin berharap semua pimpinan pansus tersebut benar-benar amanah dan melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya. Gus Muhaimin juga memberikan waktu maksimal satu bulan kepada Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji guna menghasilkan kesimpulan.

Dia meminta para pimpinan dan anggota

sebagai rujukan bagi pelaksanaan haji, sehingga aman dan nyaman," kata dia.

Dia menjelaskan sebetulnya penyelenggaraan haji merupakan ranah dari Komisi VIII DPR RI. Namun karena setiap tahun terdapat masalah pada penyelenggaraan haji maka komisi tersebut menarik lebih luas lagi hingga ke rapat paripurna DPR RI.

Kita tunggu dinamika Pansus Angket Haji 2024 berikutnya hingga satu bulan sejak terpilihnya Nusron Wahid sebagai Ketuanya. Akhir September 2024 semuanya akan lebih jelas. ♦



SAAT PANSUS HAJI MULAI BEKERJA

Pansus Haji bergerak cepat. Sempat pula meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengangkat sumpah dengan Alquran.

Segera setelah mengemban amanah sebagai Ketua Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI, Nusron Wahid mengemukakan tiga ruang lingkup yang

menjadi fokus persoalan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan haji oleh pemerintah. "Yang sudah kita sepakati tadi ada tiga ruang lingkungnya," kata

Nusron usai mengikuti rapat Pansus Angket Haji DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Pertama, kata Nusron, Pansus akan mendalami dugaan penyalahgunaan ke-



wenangan Menteri Agama (RI) dalam hal mengalokasikan kuota haji tambahan. "Yang harusnya untuk reguler, digunakan untuk jamaah haji khusus," ucapnya.

Ruang lingkup kedua, kata dia, masalah manajemen operasional haji. Mulai dari, rekrutmen sumber daya manusia hingga servis dan tingkat kepuasan jamaah.

Sedangkan ruang lingkup ketiga, lanjut dia, pembenahan sistem keuangan haji. "Bagaimana pengelolaan sistem keuangan haji itu yang transparan, akuntabel, dan menjamin manajemen risiko dan mitigasi risikonya," sambung Nusron.

Terkait tiga cakupan itu Nusron menyebutkan Pansus Angket Haji DPR akan memanggil pihak-pihak terkait untuk di-

mintai keterangan, terutama dari kalangan regulator penyelenggaraan haji.

Sebelumnya, Pansus Angket Haji DPR RI menetapkan anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid sebagai ketua, serta tiga orang lainnya yakni Marwan Dasopang, Diah Pitaloka, dan Ledia Hanifa Amaliah sebagai wakil ketua.

Dalam kaitan itu, Ledia mengundang masyarakat melapor jika mengalami persoalan terkait dengan penyelenggaraan Haji pada penyelenggaraan 2024. "Mungkin ada masyarakat yang

garaan haji ke depan lebih baik lagi. Jadi, kalau semua menginginkan jamaah haji yang berangkat berikutnya jadi lebih baik lagi, ayo silakan berikan masukan, catatan-catatan. Mudah-mudahan, bisa meningkatkan layanan haji ke depan," katanya.

Esok harinya, Rabu, 21 Agustus 2024, Pansus Angket Haji memulai persidangan untuk meminta keterangan sejumlah saksi. Kali ini Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful



sebenarnya punya persoalan-persoalan terkait dengan penyelenggaraan Haji 2024, terutama yang seharusnya berangkat, tidak berangkat. Yang mestinya belum berangkat, jadi berangkat atau ketika di sana mengalami persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan," kata Ledia kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.

Ia mengemukakan, masyarakat terutama jamaah haji dapat menyampaikan aduan, laporan, maupun masukan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 melalui saluran WhatsApp di 0821-2891-6124 atau melalui email angkethaji_2024@dpr.go.id. Layanan pengaduan itu, kata dia melanjutkan, aktif mulai 20 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024 setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

Lebih lanjut dia menjelaskan, saluran aduan, laporan, dan masukan tersebut dibuat oleh Pansus Angket Haji demi memastikan ke depannya penyelenggaraan haji dapat terlaksana lebih baik. "Ini konteksnya Pansus Hak Angket Haji ini adalah ingin perbaikan sistem penyeleng-

Mujab hadir sebagai saksi.

Politikus Golkar, Ketua Pansus Haji Nusron Wahid membuka rapat perdana Pansus Hak Angket Haji 2024. Agenda pemeriksaan saksi perdana adalah meminta keterangan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief.

"Apakah narasumber kali ini, dapat kita ambil sumpahnya sebagai narasumber?" ujar Nusron Wahid.

Kendati demikian, interupsi hadir dari salah satu anggota pansus haji, yang berkeberatan karena kedatangan Hilman Latief sebagai seorang pejabat, bukan dalam kapasitas memberikan kesaksian.

Toh Nusron beranggapan siapapun yang terlibat dalam penyelenggaraan haji merupakan saksi, baik dia regulator maupun penyelenggara haji di lapangan. "Berarti Dirjen ini saksi. Jadi perlu diambil sumpah gak?" tanya Nusron.

Alhasil, Dirjen Hilman Latief kemudian diambil sumpahnya. Maka persidangan berlanjut.

Tak ayal isu jual beli kuota haji menjadi salah satu poin yang diangkat dan ditanyakan Pansus Angket Haji DPR RI pada

persidangan perdana itu. Sejumlah anggota Pansus menanyakan dan mengkonfirmasi isu yang mereka dengar tentang jual beli kuota haji.

Pada penyelenggaraan haji 2024, kuota jamaah Indonesia berjumlah 221.000, orang terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Selain itu, Indonesia juga mendapat 20.000 kuota tambahan. Total kuota haji Indonesia adalah 241.000 orang, terdiri atas 213.320 orang haji reguler dan 27.680 haji khusus.

Dirjen Hilman menegaskan tidak ada kasus jual beli kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi. "Kemenag tidak ada penjualan kuota," ujarnya.

Menurut dia, secara sistem, jual beli

kuota tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Agama. Jika ada yang mendapat info tersebut, sambungnya, bisa melaporkan ke Kementerian Agama sehingga bisa ditelusuri baik secara data, proses penjualan, cara, serta oknum yang dituduhkan. "Kami akan tindaklanjuti setiap pengaduan. Kami mohon info lebih valid. Saya khawatir ini yang menjadi kecurigaan atau pandangan negatif terhadap proses bisnis Kemenag dalam penyelenggaraan haji," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab. Menurut dia, jamaah yang berangkat haji tahun ini sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

"Kalau ada kasus, laporkan secara ter-

tulis. Apakah orang Kemenag atau bukan. Saya ingin tahu siapa yang main. Kita semua sudah berbasis aplikasi. Kalau ada yang menawarkan, jelas itu penipuan," kata Saiful.

Toh sanggahan datang dari Anggota Pansus Wisnu Wijaya. Ia menyoroti kejanggalan terhadap keterangan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief dalam rapat dengan Pansus Angket Haji DPR pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Wisnu menilai keterangan terkait usulan pembagian rata kuota haji tambahan reguler-khusus yang disampaikan dalam rapat itu bersifat inkonsisten. "Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kemenag lewat Dirjen Haji dan Umrah saat rapat bersama Komisi VIII DPR pada 20 Mei 2024, disebutkan bahwa pembagian rata kuota haji tambahan 50:50 tersebut berdasarkan persetujuan dari otoritas Saudi lewat sistem e-Haji," ucap Wisnu.

Dari keterangan itu, sambungnya, Komisi VIII DPR sempat berpikir bahwa pembagian rata kuota haji tambahan tersebut atas dasar kebijakan otoritas Arab Saudi. "Namun, belakangan terungkap lewat rapat Pansus 21 Agustus 2024 lalu, usulan pembagian rata kuota haji tambahan itu justru datang dari Kementerian Agama yang kemudian ditetapkan oleh otoritas Saudi dalam bentuk MoU," kata Wisnu.

Terlebih lagi, kata dia, dalam Rapat Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama pada November 2023 sudah ada informasi tentang kemungkinan kuota tambahan itu, "Meski belum ada kepastian jumlahnya. DPR telah menekankan agar kuota haji tambahan ini diprioritaskan buat lansia reguler. Spirit kami, Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, saat itu adalah bagaimana kuota tambahan ini betul-betul bisa mengurangi panjangnya waktu antrean bagi jamaah," ujar Wisnu.

Ternyata, pembagiannya tidak mengindahkan prioritas bagi lansia, tapi 50 persen untuk kuota reguler, dan 50 persen haji khusus. Wisnu, menyebutkan pembagian secara 50 banding 50 persen itu tidak hanya mengecewakan DPR dan jamaah haji reguler, tetapi juga Presiden Joko Widodo.

Wisnu mengemukakan, Presiden Jokowi hirau terhadap persoalan antrean itu sehingga melobi langsung Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed Bin Salman (MBS) di Riyadh pada 20 Oktober 2024 untuk memperoleh kuota tamba-



han. "Tujuan Presiden melobi langsung ini sejatinya untuk memperpendek lamanya antrean jamaah haji Indonesia yang bisa mencapai 47 tahun. Lewat kuota tambahan ini, jamaah reguler diharapkan dapat terbantu sehingga tidak terlalu lama menunggu. Namun, yang dilakukan oleh Kemenag justru bertolak belakang dengan niat baik Presiden sehingga patut disesalkan," kata dia.

Tak hanya menyesalkan, pada sidang Pansus Angket Haji berikutnya, Senin, 26 Agustus 2024, Anggota Pansus Saleh Partaonan Daulay mengingatkan dan meminta pejabat Kementerian Agama (Kemenag) yang hadir sebagai saksi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) un-

anan Haji Luar Negeri Kemenag sebetulnya mengetahui adanya penambahan kuota haji serta ikut mempersiapkan fasilitas jamaah haji reguler. Oleh sebab itu, apabila nantinya terdapat penjelasan saksi lain yang bertentangan, maka keterangan-keterangan saksi dapat dikonfrontasi lebih lanjut.

"Selama dia (Subhan) mempersiapkan jamaah haji reguler itu, dia pasti tau berapa jumlah yang disiapkan sebab setiap orang (jamaah haji) harus ada tempatnya, makannya, dan transportasinya. Kan begitu. Jadi beliau ini tahu semua terkait dengan itu," kata dia.

Sedangkan Anggota Pansus Hak Angket Haji DPR RI Iskan Qolba Lubis me-

tidak?" tanya Iskan kepada Subhan.

Selain itu, Iskan juga mempertanyakan alasan kuat Kemenag untuk membagikan kuota haji khusus kepada beberapa travel haji tanpa memberi tahu Komisi VIII DPR sebagai pihak yang bermitra dengan Kemenag. Menjawab dua pertanyaan Iskan, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

Terkait 20 ribu kuota haji tambahan yang dibagi rata masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan haji khusus, Subhan menjelaskan pertimbangan tersebut dilakukan mengingat adanya keterbatasan lokasi untuk jamaah haji reguler di Mina.



tuk bersikap kooperatif, termasuk dalam menjawab pertanyaan yang diajukan Pansus.

"Saya minta, Bapak kooperatif dengan DPR. Tidak apa-apa, kan kita tidak ada masalah ini," kata Saleh kepada Subhan.

Apabila saksi tidak menjawab pertanyaan secara kooperatif, Saleh mengingatkan hal tersebut nantinya dapat membuah citra (image) yang tidak baik di masyarakat. Apalagi, ujar dia, Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag memiliki tempat yang strategis terkait dengan kondisi jamaah haji selama di Tanah Suci.

Saleh menyimpulkan Direktur Pelay-

nilai adanya ketidakonsistenan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dengan masalah kuota haji. Dalam salah satu rapat dengan Menag Yaqut, jelas Iskan, Komisi VIII DPR menanyakan apakah memungkinkan kuota tambahan diberikan kepada haji khusus sebab tahun sebelumnya banyak tidak terserap.

Namun, imbu Iskan, pada saat itu Menag mengatakan bahwa kuota tambahan untuk haji khusus tidak diperbolehkan di Arab Saudi. Iskan pun mempertanyakan, apakah terdapat legal standing dari Arab Saudi yang menyatakan hal tersebut. "Yang (kuota tambahan) 20 ribu dibagi 50 persen itu ada kebijakan Saudi Arabia

Luasan Mina yang diperuntukkan bagi jamaah haji Indonesia, sebut Subhan, yaitu seluas 172 ribu meter persegi atau 17,2 hektare. Apabila lokasi tersebut ditempati oleh 203.320 orang calon haji reguler tanpa tambahan kuota, maka setiap jamaah hanya mendapatkan kapasitas tenda dengan luas 0,8 meter persegi.

"Terkait dengan pembagian kuota, kami tentu sebatas memberikan pertimbangan realita-realita yang ada. Apabila jumlah jamaah terus bertambah sedangkan space dan luasan Mina itu tidak bertambah, tentu kondisinya akan semakin padat," ungkap Subhan. ♦



BABAK AKHIR PANSUS HAJI

Rapat demi rapat berlangsung intensif antara Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 dan pihak pemerintah. Bagaimana akhir Pansus Haji?

Tekanan waktu mempersamai Pansus Angket Haji. Tak hindarkan. Sejak penetapan pimpinan, pada 19 Agustus, target penyelesaian tugasnya hanya satu bulan. Berarti sebelum 19 September 2024, Pansus harus menyusun simpulan. Tak ada perpanjangan waktu karena DPR periode 2019-2024 segera berakhir pada 1 Oktober 2024 saat pelantikan anggota parlemen periode 2024-2029.

Lagi pula beberapa anggota Pansus tak akan lagi duduk di DPR periode 2024-2029. Apapun, rapat-rapat Pansus memang berlangsung serius mendalami apakah terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan haji 2024.

Dalam rapat yang berlangsung pada Selasa, 27 Agustus 2024 misalnya, anggota Pansus Angket Haji Abdul Wachid mempertanyakan alasan adanya masyariq –pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk melayani jamaah haji) wanprestasi (melanggar kesepakatan) pada pelaksanaan Haji 2023.

Ternyata masyariq itu dilibatkan kembali pada penyelenggaraan haji 2024.

Menanggapi itu, Kepala Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi Nasrullah Jasam menyampaikan bahwa semua syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji mengalami kendala dalam pelaksanaan ibadah haji. Alhasil, semua syarikah tidak dapat memberikan layanan optimal kepada jamaah. "Saya kira untuk kasus 2023, ini saya tidak punya kepentingan apa-apa. Tetapi, memang, dalam 2023 itu hampir semua syarikah memiliki kendala yang sama, Pak," kata Nasrullah yang mengemukakan pula kendala seperti membludaknya jumlah jamaah juga dialami oleh syarikah dari negara-negara lain.

Sebelumnya, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid telah menjelaskan mengenai syarikah di 2023 itu, yakni Syarikah Masyariq Al-Mutamayyazah. Subhan mengatakan pada 2024, Syarikah Masyariq Al-Mutamayyazah kembali terpilih setelah melalui tahap pemilihan, sebagaimana diatur dalam pedoman yang ada,

mulai dari tahapan pendaftaran sampai pengumuman.

"Kenapa Syarikah Masyariq ini terpilih kembali, padahal pada 2023 itu terjadi masalah? Pada 2023 itu, masalah menerima semua syarikah yang melayani jamaah di Masyair Al-Muqaddas, tidak terkecuali Syarikah Masyariq Al-Mutamayyazah," ucap Subhan. Pada seleksi penyelenggaraan haji 2024, kata dia melanjutkan, Masyariq Al-Mutamayyazah menduduki peringkat pertama berdasarkan penilaian dari Pemerintah Arab Saudi.

Dengan demikian, Subhan mengatakan terpilihnya kembali Syarikah Masyariq Al-Mutamayyazah sebagai syarikah di tahun 2024 berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan oleh pihak Arab Saudi. Alhasil, Al-Mutamayyazah terlibat kembali pada penyelenggaraan 2024.

"Syarikah ini juga memiliki pengalaman yang sangat panjang dalam melayani jamaah dari Asia Tenggara. Mereka sudah paham betul terkait dengan karakteristik jamaah yang akan dilayani, sementara

syarikah yang lain, pengalamannya melayani jamaah dari benua yang lain. Mereka belum bisa menyajikan kira-kira apa yang akan mereka berikan terhadap jamaah kita (Indonesia)," jelas Subhan.

Pertanyaan senada dikemukakan oleh Anggota Pansus Selly Andriany Gantina. "Dari beberapa temuan di lapangan, ada masyariq yang wanprestasi. Terbukti misalnya konsumsi yang selama ini kami temukan di lapangan pada 2023 dia memang sudah wanprestasi. Tapi, di tahun 2024 masih dipakai juga," kata Selly.

Lebih dari mempertanyakan, Selly meminta izin dari Nasrullah untuk memperoleh data terkait kontrak dengan masyariq yang merupakan pihak penyedia layanan haji bagi jamaah asal Indonesia itu. "Bolehkah kami dari pansus mendapatkan data dari kontrak-kontrak yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, terutama Kemenag, karena kami sudah mendapatkan beberapa bukti ada beberapa masyariq dan syarikah yang ternyata wanprestasi?" ujarnya.

Menanggapi pertanyaan itu, Ketua Pansus Angket Haji Nusron Wahid dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Selly berhak memperoleh data itu. Ia menjelaskan demi kepentingan penyelidikan, setiap pihak yang dimintai data oleh Pansus wajib memberikan data itu.

"Didaftar saja dokumen apa saja yang dibutuhkan, yang Pansus butuhkan, nanti kita minta beliau kirim. Pada prinsipnya, demi kepentingan penyelidikan Pansus DPR, semua pihak yang dimintai data wajib untuk memberikan. Itu perintah undang-Undang," ujar Nusron.

Soal permintaan Selly itu diatur dalam Pasal 205 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal itu menyebutkan bahwa dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Lalu, pihak-pihak itu wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada panitia khusus.

Banyak lagi pertanyaan tentang penyelenggaraan haji 2024. Misalnya, adanya jamaah haji yang jadwal keberangkatannya dimundurkan sebagaimana dikemukakan oleh Anggota Pansus Iskan Oolba Lubis. Malah Anggota Pansus Arteria Dahlan meminta pimpinan Pansus agar Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) diaudit secara forensik.

"Saya minta melalui pimpinan, saya minta Siskohat ini diaudit secara forensik. Kita minta diaudit secara forensik, kalau perlu kita pakai Bareskrim di sini," kata Arteria dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Haji DPR RI bersama Kasubdit Siskohat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag

Hasan Affandi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 28 Agustus malam.

Nah, tenggat waktu kian mendesak, sementara masih banyak hal yang perlu didalami oleh Pansus. Apakah Pansus dapat tiba di simpulan sesuai dengan waktu yang tersedia pada pekan ketiga September 2024. Kita lihat saja bersama-sama. ♦



MENJAGA BUDAYA PESANTREN DI ERA MODERN

Oleh: Moh Tohari
Alumni Pondok Pesantren Nurul
Muchlishin Pakondang, Rubaru,
Sumenep

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Di pesantren, para santri diajarkan ilmu agama, adab serta nilai-nilai kehidupan yang baik dan norma-norma sosial yang harus dijunjung tinggi. Kini pesantren dituntut terus menyesuaikan diri dengan era virtual-digital.

Budaya pesantren telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pesantren memiliki tradisi yang unik, seperti pengajian rutin, shalat berjamaah, dan pengajian kitab suci. Di era virtual-digital ini, banyak pesantren yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses belajar mengajar dan menjaga tradisi yang sudah ada.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang marak digunakan oleh pesantren adalah media sosial. Melalui media sosial, pesantren dapat memperluas jangkauan informasi dan kegiatan pesantren, seperti pengajian online dan informasi terkini seputar pesantren. Dengan adanya media sosial, para santri juga dapat terhubung dengan para kiai dan ustadz yang merupakan pilar utama di pesantren.

Selain itu, pesantren juga telah banyak memanfaatkan platform pembelajaran online untuk mengajar santri. Dengan adanya platform tersebut, proses belajar mengajar dapat dilakukan secara fleksibel dan efisien. Para santri tidak perlu lagi datang ke pesantren setiap hari, karena mereka dapat mengakses materi pembelajaran dari rumah masing-masing.

Penerapan teknologi di pesantren hendaknya tetap harus ada pengawasan dan pengendalian yang ketat. Pesantren harus tetap menjaga nilai-nilai dan tradisi yang sudah ada, serta menghindari penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Unsur pengurus juga harus terus mengedepankan pendidikan karakter dan moral yang menjadi ciri khas dari pesantren.

Di era virtual-digital, pesantren tetap harus menjaga budaya dan tradisi yang sudah ada, serta memanfaatkan teknologi dengan bijak. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun tetap memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya yang diterapkan di pesantren. Dalam perkembangannya, pesantren akan tetap menjadi tempat yang berkontribusi besar dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berwawasan

luas, sekaligus menjaga keberlangsungan budaya pesantren di era virtual-digital ini.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keislaman, sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi era digital ini. Banyak pesantren yang telah menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajarnya. Namun, di sisi lain, ada juga pesantren yang masih mempertahankan budaya pesantren klasik tanpa penyesuaian dengan perkembangan zaman.



Dengan semakin mudahnya akses internet, banyak santri yang mulai memanfaatkan media sosial dan aplikasi chatting untuk berinteraksi dengan teman-teman mereka di luar pesantren. Ini merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari, mengingat kebutuhan akan komunikasi dan informasi sangatlah penting bagi remaja. Tidak mengherankan juga jika ada pesantren yang memperbolehkan santri untuk membawa handphone dan laptop ke dalam lingkungan pesantren, meskipun masih ada juga pesantren yang melarangnya.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh pesantren di era virtual-digital ini tidak berhenti di situ. Adanya media sosial dan berbagai platform digital lainnya, membuat pesantren juga harus memperhatikan konten yang diakses oleh santri. Hal ini dikarenakan, di era digital ini, informasi dapat dengan mudah diakses dan tersebar tanpa filter yang memadai. Maka dari

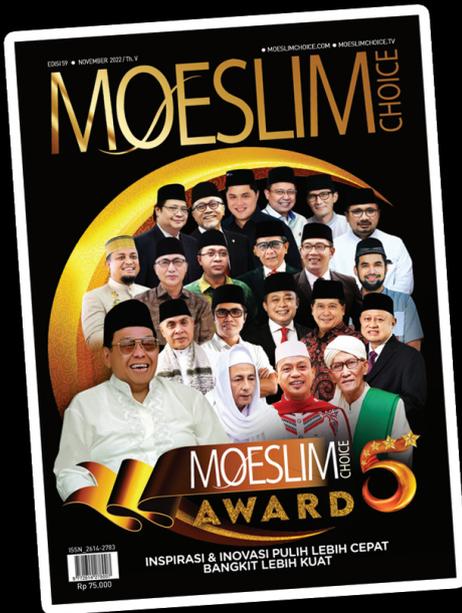
itu, pesantren harus memperkuat pendidikan karakter bagi santri agar mereka dapat menjadi pengguna internet yang bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, pesantren juga harus memperkuat nilai-nilai keislaman dalam era digital ini. Banyaknya informasi yang beredar di internet, kadang membuat santri kebingungan dan terpengaruh oleh pemahaman yang kurang benar mengenai agama. Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama harus mampu memberikan pemahaman yang benar dan membangun kritisnya santri untuk dapat memilah informasi yang benar dan yang salah.

Di sisi lain, pesantren juga harus memperhatikan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas

pendidikan dan pengajaran di pesantren. Dengan teknologi, proses belajar mengajar dapat lebih menarik dan interaktif. Misalnya, menggunakan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses oleh santri di mana saja dan kapan saja. Hal ini akan memudahkan proses belajar mengajar di pesantren dan membuat santri lebih termotivasi untuk belajar.

Namun, nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, dan kemandirian juga harus tetap ditanamkan kepada santri. Dengan demikian, budaya pesantren di era virtual-digital ini tidak akan hilang, tetapi justru akan semakin berkembang dan menguat. Pesantren harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman sambil tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah diajarkan sejak lama. Dengan begitu, pesantren akan tetap menjadi lembaga pendidikan yang berkontribusi besar dalam membangun kehidupan beragama dan beradab di Indonesia. ♦nuonlinejatim



**IKLAN 1 HALAMAN FC
Rp50.000.000**



**IKLAN BACK COVER FC
Rp75.000.000**



**IKLAN 1/2 HALAMAN FC
Rp25.000.000**

**Media yang Tepat Untuk
Promosi Usaha Anda**

MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC)
- IKLAN 1/2 CENTERSPEAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC),
- IKLAN ADVERTORIA L/INFORIAL (FC)
- IKLAN CENTERSPREAD (FC), DILUAR EDISI KHUSUS
- IKLAN COVER 2 (FC)
- IKLAN COVER 3 (FC)
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN DISPLAY (FC), 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 13, 15 & 17 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN

MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai dengan Topik Bahasan
- Pilihan Halaman Iklan yang mudah disimak Pembaca
- Harga Iklan Bertabur Diskon



**IKLAN CENTER SPREAD FC
Rp80.000.000**



CONTACT PERSON: NIKEN

**021 - 791 96 781
0896 4369 4121**

Email: moeslimchoice@gmail.com



MOESLIM CHOICE



ISSN_2614-2783



9 772614 278007

Rp 75.000

ADU KUAT MENUJU SUMSEL 1

SUMSEL
BERLAGA
DI PON XXI
ACEH-SUMUT

PILKADA
DI SUMSEL
PASCA
PUTUSAN MK

NU DAN
MUHAMMADIYAH
SIAP URUS
TAMBANG

ZULHAS DAN
EKONOMI UMAT
DI MUSLIM
LIFEFEEST

DESTINASI
WISATA
HALAL
DI SUMBAR